



MENGADU NASIB DI KEBUN KARET

KEHIDUPAN BURUH ONDERNEMING KARET
DI ACEH TIMUR, 1907 - 1939

MAWARDI UMAR

Direktorat
Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

305.511

MAW

M

**MENGADU NASIB DI KEBUN KARET:
KEHIDUPAN BURUH ONDERNEMING KARET
DI ACEH TIMUR, 1907 - 1939**

Penulis

Mawardi Umar

Editor

Prof. Amirul Hadi, Ph.D

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH

2015

**MENGADU NASIB DI KEBUN KARET:
KEHIDUPAN BURUH *ONDERNEMING* KARET
DI ACEH TIMUR, 1907 - 1939**

Penulis:
Mawardi Umar

Editor:
Prof. Amirul Hadi, Ph. D.

Cetakan Pertama, 2015

ISBN: 978-602-9457-54-4

Penerbit:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

Redaksi:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh
e-mail: bpnbbandaaceh@yahoo.co

KATA SAMBUTAN

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Aceh sebagai daerah yang memegang peranan penting dalam perjalanan sejarah di Nusantara, memiliki banyak aspek peninggalan sejarah dan budaya, baik sebelum, selama maupun sesudah kesultanan Aceh, belum terungkap secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap usaha menggali, memelihara, dan mengabadikan peristiwa sejarah dan budaya bangsa patut dihargai di tengah-tengah masih kurangnya bacaan tentang sejarah dan budaya lokal. Buku yang berjudul *Mengadu Nasib di Kebut Karet: Kehidupan Buruh Onderneming Karet di Aceh Timur, 1907-1939* ini merupakan bagian dari buku-buku tentang sejarah dan budaya yang dimaksud.

Permasalahan buruh ternyata sudah lama terjadi, sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, buruh menempati lapisan paling bawah sehingga secara sosial ekonomi buruh selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan, baik karena perilaku semena-mena di tempat mereka bekerja maupun akibat dari regulasi yang tidak memihak buruh. Oleh karena itu, urgensi penerbitan buku ini berkaitan dengan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sedang membangun, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kedudukan dan peranan sejarah lokal sangat penting, salah satu caranya adalah dengan mempublikasikannya. Untuk itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh berinisiatif mempublikasikan buku ini.

Buku ini bukan hanya penting bagi masyarakat Aceh, tetapi penting, diperlukan, dan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Mengenal sejarah dan budaya masyarakat Aceh merupakan bagian dalam usaha mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Dengan demikian, kita lebih kaya akan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempelajari dan mengenal identitas bangsa kita sendiri dan historis kulturilnya, suatu hal yang mutlak diperlukan bagi pembangunan bangsa.

Terbit buku ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada penulis dan editor. Kami menyadari pula bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga buku ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa.

Banda Aceh, November 2015

Irin Dewi Wanti, S.S., M.SP
NIP 197105231996012001

KATA PENGANTAR

Dalam stratifikasi sosial komunitas perkebunan sejak masa kolonial, buruh menempati lapisan paling bawah. Oleh karenanya, secara sosial ekonomi buruh juga selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada masa kolonial khususnya, ketidakberuntungan ini terjadi secara struktural yang dengan sengaja direayasa demi keuntungan perusahaan perkebunan yang kapitalis. Untuk mengikat buruh di perkebunan, dibuat berbagai aturan yang bertujuan mengikat buruh berada di perkebunan walaupun pendapatan yang mereka peroleh sangat sedikit. Pendapatan yang didapat buruh hanya cukup untuk bisa bertahan hidup. Kondisi ini juga dialami oleh buruh yang bekerja pada perkebunan karet di Pantai Timur Aceh.

Naskah asli dari tulisan ini berasal dari Tesis S-2 Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada tahun 2005 di bawah bimbingan yang sangat intensif dari Prof. Dr. Bambang Purwanto, dan diuji oleh Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, MA, Prof. Dr. Djoko Suryo, dan Prof. Dr. Soegijanto Padmo, M. Sc. (alm). Tulisan yang terdiri atas enam bab utama dan lampiran-lampiran ini membahas kehidupan buruh pada onderneming karet di Pantai Timur Aceh masa colonial secara utuh. Kehidupan buruh dibahas

dalam tulisan ini dilihat dari berbagai aspek yang berpengaruh pada kehidupannya, seperti aspek spatial kewilayahan (fisik, sosial, ekonomi dan politik), aspek struktural yang dengan sengaja diciptakan oleh pemilik modal yang kapitalis dan didukung oleh pemerintah kolonial, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penerapan aturan tersebut terhadap kehidupan buruh, dan resistensi dari buruh terhadap aturan tersebut.

Tulisan ini tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa arahan dari Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Arahan-arahan dan masukan-masukan yang sangat berharga dan tidak bosan-bosannya dari beliau yang telah membuka wawasan penulis dalam melihat berbagai aspek sejarah buruh, sehingga dapat memperkaya tulisan ini. Selain itu, ketegasan dan pentingnya komitmen kepada tujuan yang beliau ajarkan telah memicu semangat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Beliau. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan seluruh dosen dan sekaligus kolega di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah yang telah membantu dan memperluas wawasan penulis mengenai banyak hal.

Akhirnya, secara khusus penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda M. Umar Hs (alm.), Ibunda Ainal Mardhiah, Ayah Mertua Abdullah Husen, dan Ibu mertua Cut Fathimah Zuhra yang menyertai dengan doa-doa. Tulisan ini penulis persembahkan kepada isteri tercinta Furaida, S. Pd. dan anak-anak tersayang Rizki Wahidi, Risna Isnanda, dan Ridha Isham Maulana. Tulisan ini tidak akan pernah selesai tanpa pengorbanan mereka, untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
 BAB I PENGANTAR	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Pendekatan dan Kerangka Analitis	17
F. Metode Penelitian dan Sumber	22
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II ACEH TIMUR AWAL MASUKNYA <i>ONDER-</i> <i>NEMING</i> KARET	 27
A. Kenegerian dan Penduduk	27
B. Mata Pencaharian Penduduk	37
C. Penetrasi Kekuasaan Kolonial Belanda	41
D. Pembangunan Prasarana Ekonomi	48
E. Perkembangan <i>Onderneming</i> Karet	52
 BAB III BURUH DALAM KOMUNITAS PERKEBUNAN KARET DI ACEH TIMUR	 70
A. Kehadiran Golongan Manajerial Kulit Putih	70
B. Buruh dan Sistem Perekrutannya	77
C. Sistem Kerja dan Kontrol Buruh	98
D. Beban Kerja Buruh	105
E. Pengaruh Perkebunan terhadap Perubahan Ruang Ekonomi di Aceh Timur	109
 BAB IV KESEJAHTERAAN BURUH PERKEBUNAN KARET DI ACEH TIMUR, 1907-1939	 117

A. Pendapatan (Upah)	118
B. Perumahan	131
C. Kesehatan	134
D. Pendidikan Anak	143
E. Pengaruh Perang Dunia I terhadap Kesejahteraan Buruh...	148
F. Pengaruh Depresi Ekonomi terhadap Buruh	152
 BAB V HUKUMAN DAN KEKERASAN DI PERKEBUNAN.....	156
A. Hukuman-hukuman Terhadap Buruh	157
B. Kekerasan Fisik Terhadap Buruh	169
C. Desersi dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Kuli.....	175
 BAB VI KESIMPULAN	179
 DAFTAR PUSTAKA	183
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	192

DAFTAR TABEL

	hlm.
Tabel 2.1 : Ekspor Pinang dan Kopra Aceh Timur, 1904-1907.....	40
Tabel 2.2 : Luas Konsesi, Luas Penanaman dan Produksi Karet Aceh Timur, 1906-1939	65
Tabel 2.3 : Jenis Usaha Onderneming-onderneming di Aceh, 1929-1938	68
Tabel 3.1 : Jumlah Komunitas Kulit Putih dan Komunitas Lain di Aceh Tahun 1920	75
Tabel 3.2 : Jumlah Komunitas Kulit Putih dan Komunitas Lain pada Onderneming-onderneming di Aceh Timur Tahun 1920	76
Tabel 3.3 : Jumlah Kuli yang Terdaftar pada Pos-pos Registrasi (1 Juni 1909-Oktober 1910)	84
Tabel 3.4 : Jumlah Kuli yang Diberangkatkan Melalui Tiga Embarkasi di Pulau Jawa (April 1916- April 1917)	85
Tabel 3.5 : Persebaran Orang Jawa dalam Tiga Onder- afdeling di Aceh Timur Berdasarkan Sensus Tahun 1930	97
Tabel 3.6 : Perbandingan Jumlah Buruh dengan Staf Perkebunan di Aceh	104
Tabel 3.7 : Perbandingan Jumlah Buruh dengan Luas Usaha, dan Jumlah Produksi Onderneming Karet di Aceh Timur, 1920-1939	108
Tabel 3.8 : Kampung-kampung yang Muncul di Sekitar Perkebunan-perkebunan Besar di Aceh Timur ...	114
Tabel 3.9 : Produksi Karet Rakyat Aceh Timur, 1925-1937 ..	116
Tabel 4.1 : Upah Harian Buruh Onderneming di Aceh Menurut Suku dan kebangsaan, 1912-1919	121
Tabel 4.2 : Upah Minimum Harian Kuli Onderneming Karet Kelompok AVROS, 1919-1938.....	122
Tabel 4.3 : Impor Beras ke Aceh dan Aceh Timur, 1913- 1919 (dalam ton)	124
Tabel 4.4 : Harga Beras di Kota-kota Besar di Pulau Jawa dan Sumatera, 1919-1938	125
Tabel 4.5 : Harga Beras pada Onderneming Karet di Pantai Timur Sumatra dan Aceh, 1919-1938	125
Tabel 4.6 : Inspeksi Budget Kuli untuk Pantai Timur Sumatra, 1923-1934	127
Tabel 4.7 : Jumlah Rata-rata Upah dan Pengeluaran Buruh Per-bulan di Sumatra Timur	129
Tabel 4.8 : Jumlah Pondok untuk Kuli yang Sudah Berkeluarga di Aceh, 1929-1939	133

Tabel 4.9 : Penyebab Kematian Kuli di Aceh, 1925 dan 1927	138
Tabel 4.10 : Jumlah Kuli yang Meninggal di Aceh, 1919-1937	139
Tabel 4.11 : Jumlah Anak Kuli di Aceh yang Meninggal, 1927-1939	141
Tabel 4.12 : Jumlah Sekolah Onderneming dan Jumlah Anak Kuli Umur Sekolah, 1930-1938	145
Tabel 5.1 : Jumlah Kuli Kontrak yang Dihukum dengan Artikel-artikel dalam koeliordonantie 1915	161
Tabel 5.2 : Jumlah Kuli Kontrak yang Dihukum dengan Artikel-artikel Koeliordonantie 1931	162
Tabel 5.3 : Jumlah Kuli Kontrak yang Dihukum dengan Artikel-artikel Koeliordonantie dan Hukum lain	165
Tabel 5.4 : Jumlah Kuli Kontrak dan Kuli Bebas Onderneming di Aceh yang Dipecat, 1919-1938	168
Tabel 5.5 : Kasus Pemukulan (Klapzaken) terhadap Kuli Onderneming di Aceh, 1925-1939	173
Tabel 5.6 : Jumlah Kuli Kontrak yang Desersi dari Perkebunan di Aceh Timur, 1919-1938	175
Tabel 5.7 : Penyerangan yang Dilakukan oleh Kuli terhadap Staf Onderneming dan Mandor di Aceh, 1930-1939	177

DAFTAR LAMPIRAN

	hlm.
Lampiran 1 : Peta Aceh Tahun 1914	192
Lampiran 2 : Peta Topografi Aceh Timur (Langsa) Tahun 1913	193
Lampiran 3 : Luas Penanaman Onderneming-onderneming Karet di Aceh Timur, 1915-1930	194
Lampiran 4 : Onderneming-onderneming di Luar Aceh Timur Tahun 1927	196
Lampiran 5 : Jumlah Buruh di Aceh, 1910-1938	197
Lampiran 6 : Jumlah Buruh Kontrak dan Buruh Bebas pada Onderneming di Aceh berdasarkan Suku dan Kebangsaan, 1912-1938	198
Lampiran 7 : Rumah Sakit Pusat Rujukan Onderneming Karet di Aceh Timur	199
Lampiran 8 : Rata-rata Harga Karet di London, 1910-1939 ..	200
Lampiran 9 : Jumlah Pemilikan Mobil di Amerika Serikat 1900-1917	201
Lampiran 10: Konversi Berat dan Ukuran	201
Lampiran 11: Pasal-pasal Koeliordonantie 1915 yang Dilanggar Buruh di Aceh	202
Lampiran 12: Pasal-pasal Koeliordonantie 1931 yang Dilanggar Buruh di Aceh	203
Lampiran 13: Besluit Pendirian Perkebunan Karet Pemerintah di Langsa	204
Lampiran 14: Besluit Penerapan Koeliordonantie untuk Aceh Tahun 1916	208
Lampiran 15: Foto Lahan yang sudah Dibersihkan untuk Penanaman Karet Milik H.V.A.	212
Lampiran 16: Foto Lahan yang sudah Siap untuk Penanaman Karet Milik H.V.A.	213
Lampiran 17: Foto Kompleks Pondok Buruh Perkebunan Karet Milik H.V.A.	214
Lampiran 18: Foto Pondok Buruh Perkebunan Karet di Langsa	215
Lampiran 19: Foto Tempat Tidur Buruh Perkebunan Karet Di Langsa	216
Lampiran 20: Foto Perumahan Asisten dan Pasanggrahan pada Perkebunan Karet Milik H.V.A.	217

DAFTAR SINGKATAN

- ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia.
- AVROS : Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra.
- BKI : Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
- H.V.A. : Handelsvereeniging "Amsterdam"
- IG : Indische Gids.
- KITLV : Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde
- LTV : Landbouw Vereeniging Takengon.
- MvO : Memories van Overgave
- PDIA : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- TAG : Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap.
- TBB : Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan aspek terpenting dalam ekonomi Indonesia masa kolonial selama lebih dari satu abad (1830 – 1940). Mula-mula di pulau Jawa, kemudian di bagian-bagian tertentu di luar Jawa, produksi hasil tanaman yang berorientasi ekspor secara besar-besaran menjadi pokok perhatian utama pemerintah dan pengusaha-pengusaha swasta. Pola organisasi, penentuan jenis tanaman, serta lokasi penanaman, telah terjadi perubahan yang sangat besar selama kurun waktu tersebut; tetapi industri perkebunan secara keseluruhan tetap merupakan unsur utama perekonomian Hindia Belanda.¹

Aktivitas pemerintah, khususnya pembentukan administrasi yang efektif di Luar Jawa, berperan besar terhadap perkembangan ekonomi di wilayah ini setelah tahun 1900. Sejalan dengan itu, perkebunan-perkebunan swasta berkembang pesat, yang dipengaruhi juga oleh permintaan dunia terhadap komoditas-komoditas yang dihasilkan Hindia Belanda, terutama karet. Meningkatnya penggunaan mobil sebagai alat transportasi di

¹ William J. O'Malley, "Perkebunan 1830 – 1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth, et al., *Sejarah ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.197.

Eropa dan Amerika Utara berpengaruh besar terhadap tingginya permintaan karet dan minyak bumi. Pada tahun 1925, karet telah menggantikan gula sebagai komoditas ekspor utama Hindia Belanda.²

Salah satu daerah penghasil karet utama di Hindia Belanda adalah Pantai Timur Sumatra. Diawali dengan perkebunan tembakau, diikuti karet, teh, kelapa sawit, dan serat nenas, wilayah yang dinamakan *Cultuurgebeid* ini telah berubah dari rimba raya tak terbatas tahun-tahun 1860-an menjadi wilayah perkebunan nomor satu di dunia.³ Lebih dari 300 perkebunan yang terpisah-pisah menyewa lebih dari 500.000 orang pekerja untuk menghasilkan komoditas ekspor di wilayah ini.⁴ Karet merupakan komoditas ekspor utama perkebunan-perkebunan di wilayah ini.⁵

Pesatnya perkembangan perkebunan di Sumatera Timur menyebabkan tingginya permintaan terhadap tanah. Setelah tanah

² G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya; A Study in Economic Development*. (New York: The Macmillan Company, 1968), hlm. 30.

³ William J. O'Malley, *op. cit.*, hlm. 224.

⁴ Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth; An Economic History of East Sumatera 1863 – 1942*. (Jakarta: National Institute of Economic and Social Research, 1977), hlm. 41.

⁵ William J. O'Malley, *op. cit.*, hlm. 226.

di Sumatera Timur mulai terbatas, upaya perluasan perkebunan karet harus diarahkan ke daerah yang berdekatan dengan pusat-pusat perkebunan yang telah ada. Aceh Timur⁶ merupakan salah satu alternatif yang tepat karena daerah itu berbatasan langsung dengan Sumatera Timur. Hal ini ditunjang juga oleh kondisi keamanan wilayah dan prasarana ekonomi yang semakin baik sejak awal abad kedua puluh. Kondisi inilah menyebabkan para penanam modal swasta memilih Aceh Timur sebagai areal perkebunan dalam upaya pengembangan usaha perkebunan yang sudah mereka lakukan sebelumnya di Sumatera Timur.⁷

Sampai dengan akhir abad ke-18, Aceh Timur masih kurang berarti dari segi politik dan ekonomi. Kondisi ini berubah drastis sejak paruh pertama abad ke-19. Mulai saat itu daerah ini menjadi salah satu sentra produksi lada yang sangat penting bagi Kerajaan Aceh. Penanaman lada ini dilakukan oleh para migran yang datang dari daerah lain di Aceh. Aktivitas penanaman lada

⁶ Sekarang ini, Aceh Timur merupakan salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Aceh. Sebelum dilakukan pemekaran wilayah tahun 2002, wilayah Aceh Timur meliputi juga wilayah yang sekarang menjadi Daerah Tingkat II Kota Langsa, dan Kabupaten Tamiang.

⁷ M. Gade Ismail, "Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840– 1942". (*Disertasi Doktor*, Universitas Leiden, 1991), hlm. 161.

tersebut berdampak pada munculnya kenegerian-kenegerian baru di wilayah ini.⁸

Pada akhir abad ke- 19, Aceh Timur menjadi semakin penting artinya secara ekonomi setelah ditetapkan sebagai daerah pusat penanaman modal swasta Barat pertama di Aceh pada tahun 1898, terutama pada sektor perkebunan dan pertambangan. Mulai saat itu, beberapa perusahaan perkebunan tembakau dari Deli memperluas usahanya ke wilayah Tamiang.⁹ Usaha perusahaan perkebunan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Aktivitas penanaman modal ini tidak berlangsung lama. Penanaman tembakau dihentikan pada tahun 1901 karena tanahnya tidak cocok untuk tanaman ini. Hal serupa dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan pertambangan,

⁸ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 36.

⁹ Sampai tahun 1907, wilayah Tamiang masih berada dalam administrasi Sumatra Timur, berdasarkan ketentuan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1865 yang mengakui kenegerian-kenegerian di Tamiang berada di bawah Pangeran Langkat, Sumatera Timur. Baru dengan Keputusan pemerintah tanggal 4 Februari 1908 nomor 20 (Lembaran Negara Nomor 112) *Onderafdeeling* Tamiang dipisahkan dari Keresidenan Sumatra Timur dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Gubernur Aceh sebagai satu *Onderafdeeling* dalam *Afdeeling* Aceh Timur. W.H.M. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*. (Amsterdam: Sumatra Instituut, 1919), hlm. 127. Lihat juga *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1908.

karena ternyata cadangan minyak di Tamiang tidak menguntungkan untuk dieksploitasi.¹⁰

Sampai tahun 1907, Aceh Timur menjadi *vacum* dari penanaman modal swasta Barat. Diawali dengan pembukaan perkebunan karet Pemerintah Hindia Belanda di Langsa tahun 1907, wilayah ini mulai ramai lagi dari aktivitas modal swasta. Salah satu tujuan Pemerintah membuka perkebunan ini sebenarnya memang untuk memberi contoh kepada pemilik modal swasta, bahwa daerah ini sangat cocok untuk penanaman karet.¹¹

Usaha Pemerintah Hindia Belanda ini mendapat tanggapan positif dari pemilik modal Swasta Barat. Mereka mulai menanamkan modalnya kembali dalam bidang perkebunan di Aceh Timur, terutama karet. Perluasan perkebunan karet Swasta Barat berkembang sangat pesat. Sampai tahun 1914, sudah terdapat perkebunan karet seluas 210.000 Ha di Aceh.¹² Pesatnya perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur dapat juga dilihat dari kesaksian J.J. van de Velde, saat dia pertama kali datang ke Aceh pada tahun 1928, dengan ungkapan “hingga Langsa kami

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141 – 143.

¹¹ J. Langhout, *Vijftig Jaren Economische Staatkunde in Atjeh*. (Den Haag: W.P. van Stockum & Zoon, 1923), hlm. 90 – 91.

¹² Paul van't Veer, *Perang Belanda di Atjeh*, terj. Aboebakar. (Banda Atjeh: Dinas P & K D.I. Atjeh, 1969), hlm. 273.

melewati daerah yang mirip dengan Deli (Sumatera Timur), di mana banyak perkebunan-perkebunan karet".¹³

Sama halnya dengan di Sumatera Timur, persoalan tenaga kerja (buruh) merupakan masalah utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan perkebunan karet di Aceh Timur sejak awal pembukaannya. Hal ini disebabkan oleh jarangny penduduk lokal dan keengganan mereka bekerja pada perkebunan Barat. Untuk mengatasi kelangkaan buruh lokal ini didatangkan buruh migran dari Jawa dan Cina.¹⁴ Mereka didatangkan dengan perantara agen-agen (makelar). Buruh Cina didatangkan melalui Semenanjung Malaya, sedangkan buruh Jawa langsung dari Pulau Jawa.¹⁵ Buruh ini diikat dengan suatu kontrak berdasarkan *koelie ordonnantie*, 1880, yang di dalamnya termasuk *poenale sanctie*. Kebijakan dan peraturan perburuhan dan asisten perkebunan untuk Aceh secara keseluruhan berlaku sama dengan Sumatera Timur dan Tapanuli.¹⁶

¹³ J.J. van de Velde, *Surat Surat dari Sumatera 1928 – 1949*, terj. Pustaka Ajeta. (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 83.

¹⁴ M. Gade Ismail, *op.cit.*, hlm. 207.

¹⁵ Muhammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe; Dengan Derita dan Kemarahannya*. (Medan: Waspada, 1977), hlm. 35.

¹⁶ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, tahun 1515 no. 421, 1916 no. 46, 138, 334, dan 447, 1919 no. 776, 1920 no. 535, dan 1921 no. 39.

Dengan masuknya buruh migran ini, terbentuklah suatu komunitas baru di Aceh Timur, yaitu komunitas perkebunan. Komunitas ini terdiri dari staf kulit putih, mandor, dan buruh migran (buruh pribumi dan buruh Cina). Meskipun mereka bekerja bersama dalam produksi dan pemeliharaan perkebunan, namun terdapat suatu pemisahan yang cukup tajam antara staf kulit putih dengan buruh, dengan para mandor berada di tengahnya. Struktur sosial komunitas perkebunan berbentuk piramid, di mana staf kulit putih dengan jumlah sedikit berada di puncak menguasai buruh dalam jumlah banyak yang berada pada posisi paling bawah. Garis pemisah ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, dan melanggarnya merupakan sesuatu yang sangat terlarang.¹⁷

Kondisi ini sudah menjadi ciri khas komunitas perkebunan. Perkebunan itu sendiri merupakan sebuah masyarakat total, di mana status pekerjaan seseorang berkaitan langsung dengan status sosialnya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh gerak lembaga ekonomi yang ada. Keadaan ini kemudian menciptakan tumpang tindihnya berbagai aspek kehidupan. Mereka sering tidak

¹⁷ Jan Breman, *Taming the Coolie Beast. Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia*. (New Delhi: Oxford University Press, 1989). Lihat juga Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870 - 1979*. (London: Yale University Press, 1985).

dapat membedakan lagi antara tugas perusahaan dengan tugas untuk kepentingan yang memberi perintah. Hal ini telah menjadi norma kehidupan komunitas perkebunan.¹⁸

Struktur dan norma yang berlaku dalam komunitas perkebunan ini telah menyebabkan terjadinya dominasi staf kulit putih terhadap golongan buruh. Dominasi ini juga berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi kedua kelompok. Staf kulit putih hidup dalam kemewahan dengan segala fasilitas dan yang mereka dapatkan. Sebaliknya, golongan buruh hanya mendapat upah yang rendah dan fasilitas yang terbatas, berakibat kelompok ini hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Hal ini tidak lepas dari tujuan perkebunan itu sendiri yang diorganisir untuk suatu tujuan keuntungan dengan didasari pada buruh lokal yang murah.¹⁹ Oleh karena secara kuantitatif buruh merupakan unsur dominan dalam komunitas perkebunan, maka komunitas perkebunan selalu identik dengan kemiskinan dan kemelaratan.

¹⁸ George L. Beckford, *Persistent Poverty: Under-development in Plantation Economies of the Third World*. (New York: Oxford University Press, 1972).

¹⁹ J. H. Boeke, *The Structure of Netherlands Indian Economy*. (New York: International Secretariat Institute of Pacific Relation, 1942), hlm. 76.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul satu permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu “kondisi sosial ekonomi buruh perkebunan karet di Aceh Timur dalam kaitannya dengan perubahan tingkat eksploitasi onderneming tempat mereka bekerja antara tahun 1907-1939.” Untuk memudahkan proses analisis, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur antara tahun 1907-1939?
2. Mengapa perkebunan karet di daerah ini membutuhkan buruh migran dan bukan penduduk lokal untuk menjadi tenaga kerja? Dari mana dan bagaimana buruh migran yang bekerja pada perkebunan karet di Aceh Timur?
3. Sebagai kelompok yang berada pada strata paling bawah dalam komunitas perkebunan, bagaimanakah tingkat kemampuan adaptasi ekonomi buruh migran pada perkebunan karet di Aceh Timur terhadap sistem kapitalisme perkebunan antara tahun 1907-1939?
4. Apakah keadaan ekonomi buruh tersebut merupakan akibat dari ketidakmampuan mereka beradaptasi, atau akibat tekanan dari sistem kapitalisme perkebunan yang sangat keras yang membuat buruh tidak punya pilihan lain?

5. Adakah perbedaan kemampuan adaptasi ekonomi antar kelompok sosial dalam komunitas buruh perkebunan ini? Kalau ada, mengapa berbeda? Kalau tidak, mengapa tidak berbeda?
6. Mengingat buruh onderneming karet di Aceh Timur merupakan buruh migran, apakah kehadiran mereka berakibat pada terbentuknya kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah ini?
7. Apakah kehadiran buruh migran ini juga berakibat pada perubahan ruang ekonomi di Aceh Timur? Kalau ya, mengapa hal itu terjadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Menjelaskan kondisi sosial ekonomi buruh Onderneming karet di Aceh Timur masa kolonial Belanda. Hal ini penting karena sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada satupun kajian ilmiah dalam historiografi Aceh yang mengkaji persoalan buruh secara khusus.
- ii. Mendokumentasikan historiografi buruh onderneming di Aceh yang masih luput dari kajian sejarawan.
- iii. Untuk menjelaskan apakah kemiskinan kaum buruh onderneming karet di Aceh Timur merupakan akibat

ketidakmampuan mereka beradaptasi terhadap sistem kapitalisme perkebunan ataupun sebagai akibat tekanan dari onderneming.

- iv. Untuk mengungkapkan apakah terdapat perbedaan adaptasi antar kelompok sosial dalam komunitas buruh perkebunan tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya historiografi Aceh khususnya, dan historiografi Indonesia secara umum. Hal ini penting, karena sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dalam karya historiografi Aceh, yang masih didominasi persoalan sosial politik, terutama perang dan konflik, sedangkan kajian sosial ekonomi masih sangat sedikit. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menutupi kekosongan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini masih terjadi ketimpangan yang sangat kontras dalam karya historiografi tentang Aceh. Tema-tema sosial politik, terutama perang dan konflik jauh lebih diminati dibandingkan dengan tema sosial ekonomi. Sejak Snouck Hurgronje²⁰ menyelesaikan karyanya tentang Aceh, penelitian

²⁰ C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers I & II*. (Leiden: E. J. Brill, 1892).

ilmiah mengenai masyarakat Aceh, terutama dalam aspek sosial politik telah maju pesat. Karya-karya tersebut antara lain adalah: James T. Siegel, Anthony Reid, Nazaruddin Sjamsuddin, T. Ibrahim Alfian, dan karya M. Isa Sulaiman.²¹

Sebaliknya, kajian aspek sosial ekonomi dalam sejarah Aceh yang telah dilakukan, baik oleh ahli ekonomi maupun ahli sejarah masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh sumber yang dapat digunakan untuk menulis sejarah ekonomi Aceh sangat terbatas, sehingga banyak penulis yang kecewa karenanya.²² Dari semua hasil kajian sejarah ekonomi Aceh yang sudah dilakukan, baik buku, Disertasi S-3, Tesis S-2, maupun artikel, secara umum berdasarkan aspek kajian, dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, kajian-kajian yang menyoroti gambaran umum ekonomi dan perdagangan Aceh pada kurun waktu tertentu. Kajian tersebut antara lain dilakukan oleh: J. Langhout, R. Boersma, J.R.C. Gonggrijp, A.K. Das Gupta, Ibrahim Hasan,

²¹ James T. Siegel, *The Rope of God*. (Berkeley: University of California Press, 1969); Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra; Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858-1898*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969); Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt; A Study of the Achenese Rebellion*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985); T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1987); M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1997).

²² M. Gade Ismail, "Ekonomi Dualistis Aceh Selama Periode Kolonial Akhir", dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: PSSAT UGM, 2002), hlm. 269.

Syamsuddin Mahmud, M. Gade Ismail, dan S. Margana²³ ; kedua, membahas kelompok pedagang, yaitu karya M. Syarief Isa, dan Zulfan²⁴; dan ketiga, karya yang mengkaji pengaruh ekonomi terhadap perubahan sosial suatu kelompok masyarakat (*uleebalang*) dalam suatu lokalitas (Aceh Timur), dan merupakan satu-satunya karya historiografi ekonomi tentang Aceh Timur, yaitu Disertasi Doktor M. Gade Ismail.²⁵ Dari semua kajian tersebut, belum ada satupun yang mengkaji aspek buruh perkebunan secara khusus; hanya karya M. Gade Ismail dan S. Margana yang menyinggung sedikit persoalan ini, sebagai suatu

²³ J. Langhout, *loc.cit.* ; R. Boersma, *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*. (Utrecht: Boekhandel Cohen, 1923); J.R.C. Gonggrijp, *Overzicht van de Economische Ontwikkeling van Atjeh Sedert de Pacificatie (tijdperk 1923 – 1938)*. (Den Haag: W.P. van Sockum & Zoon, 1944) ; A.K. Das Gupta, “Aceh and Indonesian Trade and Politic 1600 – 1641”. (*Disertasi Doktor*, Cornell University, Ithaca, 1962); Ibrahim Hasan, “Masalah Ekonomi dan Perdagangan di Kerajaan Aceh Darussalam”, dalam *Sinar Darussalam*, 96/97, Banda Aceh, 1978, hlm. 510 – 517; Syamsuddin Mahmud, “Sejarah Ekonomi dan Keuangan dalam Kerajaan Aceh Darussalam”, dalam *Sinar Darussalam*, 96/97, Banda Aceh, 1978, hlm. 540 – 546; dan M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm 269-293 ; dan S. Margana, “Perdagangan dan Perkembangan Ekonomi Aceh, 1900 – 1940”, dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1, No. 1, 1997: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, hlm 44-80.

²⁴ M. Syarief Isa, “Perkembangan Historis Penguasa di Daerah Aceh; Suatu Tinjauan”, dalam *Sinar Darussalam*, 104/105, Banda Aceh, 1981, hlm. 69 – 77 ; dan Zulfan, “Kelompok Pengusaha Pada Masa Kemerdekaan di Aceh, 1945 – 1949”. (*Tesis S-2*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995).

²⁵ M. Gade Ismail, *loc.cit.*

variabel kecil dalam kaitannya dengan variabel ekonomi yang lebih besar.

Di wilayah lain, khususnya Sumatra Timur²⁶, karya historiografi buruh telah maju pesat. Kajian mengenai buruh perkebunan telah menarik minat banyak ahli sejarah dan ahli ilmu sosial baik dari dalam maupun luar negeri. Jan Breman,²⁷ dengan diilhami oleh penemuan laporan Rhemrev, memfokuskan kajiannya pada kekerasan dan kebrutalan yang sistematis oleh pemilik perkebunan dan aparatnya terhadap buruh, terutama pada perkebunan tembakau di Deli. Dia melihat bahwa kekerasan dan kebrutalan tersebut memang sengaja dilakukan sebagai teror terhadap buruh untuk tetap loyal terhadap perkebunan. Oleh karenanya, kekerasan kebrutalan terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan buruh.

Aspek kekerasan di perkebunan juga ditinjau oleh Mohammad Said.²⁸ Menurut dia, kekerasan ini sebagai akibat dari penerapan *poenale sanctie* dalam mengatur sistem perburuhan.

²⁶ Oleh karena perkebunan karet di Aceh Timur merupakan kelanjutan perkembangan dari Sumatera Timur, dan karakteristik perkebunan di kedua tempat ini juga hampir sama, maka hampir semua peraturan yang berlaku juga sama. Oleh karenanya, kajian-kajian pada kasus Sumatera Timur sangat relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

²⁷ Jan Breman, *loc. cit.*

²⁸ Mohammad Said, *loc. cit.*

Poenale sanctie menurut Mohammad Said telah memberi legalitas kepada pemilik perkebunan untuk melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap buruh. Akibat tekanan yang terlalu keras menurut dia akan berakibat pada resistensi dari buruh yang melahirkan konflik-konflik.

Adanya konflik di perkebunan di Sumatra Timur juga didapati dalam karya Ann Laura Stoler.²⁹ Stoler lebih banyak menyoroti dua hal, yaitu hubungan antara kekuasaan dan produksi yang membentuk sistem perkebunan, dan kehidupan komunitas (buruh) di dalamnya. Dalam melihat tekanan sistem kapitalis dan konsekuensinya, Stoler lebih terfokus pada strategi kontrol buruh dan resistensi yang ditimbulkan. Dia melihat banyak terjadinya konflik antara strategi perusahaan perkebunan dan kepentingan buruh. Dalam kurun waktu yang cukup panjang (1870-1979) yang diambil, dia berkesimpulan bahwa tidak terjadi perubahan struktural dalam sistem perkebunan.

Aspek pendapatan buruh perkebunan di Sumatra Timur dikaji oleh Sjafrin Sairin.³⁰ Dengan membandingkan pendapatan yang diterima golongan kulit putih, dia melihat terjadi jurang yang sangat kontras. Golongan Eropa menerima gaji yang sangat tinggi

²⁹ Ann Laura Stoler, *loc. cit.*

³⁰ Sjafrin Sairin, "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatera Utara" dalam *Prisma* No. XX, April 1991.

dan fasilitas yang sangat bagus, sebaliknya kelompok buruh memperoleh gaji yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan (*subsistence*) dan fasilitas yang sangat buruk. Aspek yang sama juga telah dilakukan oleh Langeveld,³¹ terutama komposisi gaji buruh, perkembangan gaji dan perbaikan standar hidup buruh antara 1920-1940. Dia berkesimpulan bahwa pendapatan dan standar hidup buruh sangat berkaitan dan kebijakan kolonial sangat berpengaruh terhadap tingkat gaji buruh.

Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa kajian buruh dalam berbagai lokalitas, aspek dan dimensi, yang terkumpul dalam Vincent J. H. Houben et al.³² Sistem buruh secara umum, proses perekrutan dari Jawa, dan kualitas hidup buruh di Indonesia kolonial dikaji oleh Vincent J. H. Houben; kondisi buruh dalam perusahaan-perusahaan Swasta Barat di Sumatra Timur dan di luar Sumatra Timur oleh J. Thomas Lindblad; aspek pendapatan oleh Ellen Leenarts; aspek psikologis akibat keterasingan di Kalimantan Tenggara oleh Trudi Nierop; dan kondisi buruh pertambangan yaitu pertambangan batu bara di

³¹ H.J. Langveld, "Arbeidstoestanden op de Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het Licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten", dalam *Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 41*, hlm. 294-368.

³² Vincent J. H. Houben, et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. (Wiesbaden: Harrassowitz Verslag, 1999).

Sumatra Barat dan pertambangan di Balliton, masing-masing oleh Carin van Empel dan Jurrien van den Berg.

Dari semua kajian yang telah disebutkan, tidak satupun yang secara eksklusif memfokuskan kajiannya pada buruh perkebunan karet. Kajian tentang buruh pada perkebunan karet di Sumatra Timur dalam bentuk Tesis S-2 telah dilakukan oleh Lukitaningsih.³³ Akan tetapi, Lukitaningsih hanya memfokuskan kajiannya pada aspek buruh perempuan saja. Kajian ini juga lebih banyak bersandar pada data-data kualitatif, daripada data-data kuantitatif yang cukup lengkap dari Inspektorat Tenaga Kerja. Oleh karenanya, kajian mengenai kondisi sosial ekonomi buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ini diharapkan dapat menutupi celah tersebut dalam historiografi buruh di Indonesia secara umum dan historiografi Aceh khususnya.

E. Pendekatan dan Kerangka Analitis

Studi ini merupakan studi sejarah sosial ekonomi dari suatu komunitas perkebunan karet yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan komunitas perkebunan-perkebunan lainnya. Dalam kajian ini, perkebunan karet di Aceh

³³ Lukitaningsih, "Buruh Perempuan di Perkebunan Karet di Sumatra Timur, 1900-1940". (*Tesis S-2 UGM*, Yogyakarta, 2003).

Timur dipahami sebagai suatu sistem, yang merupakan unit produksi komoditas ekspor (karet). Oleh karenanya, kajian ini lebih difokuskan pada proses pengungkapan hubungan antara unsur-unsur dan dimensi-dimensi ekonomi dalam unit perkebunan karet tersebut.³⁴ Buruh sebagai salah satu unsur dari sistem produksi perkebunan dijelaskan dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain dalam sistem perkebunan.

Penentuan Aceh Timur sebagai batasan spasial dalam penelitian ini didasarkan pada wilayah produksi perkebunan karet³⁵ yang dipadu dengan batasan administrasi pemerintahan.³⁶ Penentuan batas spasial ini penting untuk melihat hubungan unsur-unsur ekonomi perkebunan tersebut dalam konteks Aceh Timur. Periode waktu 1907 – 1939 diambil lebih didasari pada alasan praktis dari pada alasan metodologis. Tahun 1907 merupakan tahun pertama dibukanya perkebunan karet oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Langsa, Aceh Timur, sedangkan

³⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 54.

³⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah, FIB-UGM, 2003), hlm. 98.

³⁶ Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi – 2, 1988), hlm. 13.

tahun 1939 sebagai batas akhir karena data utama penelitian ini (data statistik dari Inspektorat Tenaga Kerja).

Perkebunan karet di Aceh Timur, sebagaimana juga perkebunan di Hindia Belanda pada umumnya, merupakan milik Swasta Barat, dan produknya untuk tujuan ekspor terutama ke negara Eropa, maka penggunaan perspektif “ketergantungan (*Dependence*)” tidak bisa dielakkan. Suatu wilayah disebut tergantung apabila perkembangannya dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi oleh ekonomi lain. Perkembangan wilayah *pheripheri* sangat tergantung pada kelanjutan permintaan produknya di wilayah pusat (*center*). Konsekuensinya, fluktuasi ekonomi di daerah *center* akan berdampak negatif pada daerah *pheripheri*; sebaliknya, krisis di *pheripheri* hampir tidak berpengaruh besar pada daerah *center*. Selain ketergantungan dalam hubungan perdagangan, juga ketergantungan berdasarkan pada hampir semua perangkat produksi dimiliki oleh pihak asing (*center*).³⁷ Dengan menggunakan perspektif ini dapat diungkapkan pengaruh ekonomi dan politik global terhadap kondisi perkebunan di Aceh Timur.

³⁷ Peter Evens, *Dependent Development; The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979), hlm. 26-27.

Oleh karena data pokok penelitian ini merupakan data-data kuantitatif yang cukup lengkap dari laporan Inspektorat Tenaga Kerja, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Proses analisis data-data tersebut digunakan model analisis yang dikembangkan oleh V. J. H. Houben³⁸ yang meliputi 4 komponen, yaitu: buruh, meliputi: lamanya buruh tersebut berada di perkebunan, perubahan-perubahan dalam ukuran penduduk buruh dalam satu perusahaan, dan situasi di pasar tenaga kerja perusahaan, meliputi: fase keberadaan perusahaan, posisi finansial atau profitabilitas perusahaan, jenis kegiatan ekonomi perusahaan, ukuran perusahaan, dan lokasi perusahaan daerah, yaitu situasi umum daerah, terutama kondisi kesehatan; dan terakhir Inspektorat Tenaga Kerja, yaitu dampak dari kunjungan inspektur yang berulang-ulang dan tekanan-tekanan yang dilakukan kepada para pemilik perkebunan untuk melakukan perbaikan kesejahteraan buruh. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁸ Vincent J. H. Houben, "Inspektorat Tenaga Kerja dan Kondisi Tenaga Kerja di Luar Jawa dan Jawa, 1900-1940", dalam J. Thomas Linblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002), hlm. 226-241.

	Kuli - Kedatangan - Jumlah - Pasar tenaga kerja	
Perusahaan - Fase - Cabang - Ukuran - Lokasi	Kondisi Materiel - Kesehatan, Kesakitan, dan Kematian Kondisi Immateriel - Desersi, kekerasan, dan Penghukuman	Daerah - Situasi Kesehatan Umum
	Inspektorat Tenaga Kerja -Dampak pada Hubungan-hubungan Kerja	

Sebenarnya, hampir seluruh data kuantitatif dari Inspektorat Tenaga Kerja yang dipakai dalam kajian ini menggambarkan keadaan buruh onderneming di Aceh secara keseluruhan. Hanya beberapa data saja yang secara eksplisit menggambarkan keadaan buruh onderneming karet di Aceh Timur. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh, sampai akhir masa kolonial sebagian besar perkebunan yang beraktivitas di Aceh berada dalam wilayah Aceh Timur, dan sebagian besar darinya merupakan perkebunan karet. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan didukung oleh data-data lainnya, data Inspektorat Tenaga Kerja ini dapat digunakan untuk menginterpretasi keadaan buruh perkebunan karet di Aceh Timur.

F. Metode Penelitian dan Sumber

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian arsip dan perpustakaan. Sumber utama penelitian ini adalah delapan belas jilid laporan resmi dari kantor tenaga kerja, yaitu *Verslag van de Arbeidinspectie*. Delapan belas jilid laporan ini, jilid 1 tahun 1911 sampai jilid 18 tahun 1939, sangat penting karena terdapat catatan mengenai kondisi buruh di perkebunan dalam berbagai aspek. Meskipun mempunyai beberapa perangkat metodologis sebagaimana dikatakan V. J. H. Houben,³⁹ laporan Inspektorat Tenaga Kerja merupakan sumber informasi yang teratur dan terlengkap mengenai kondisi-kondisi tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan Barat di Luar Jawa.

Merurut Houben, paling kurang ada tiga alasan Laporan Inspektorat Tenaga Kerja dapat dijadikan sebagai sumber informasi historis. Pertama, Meskipun Laporan Inspektorat Tenaga Kerja banyak ditolak karena lembaga itu dekat dengan pemerintah kolonial yang diduga mendukung kepentingan pengusaha kapitalis Barat, tetapi setelah proses desentralisasi administrasi kolonial awal abad ke-20 mulai terjadinya persaingan antar berbagai departemen pemerintah sebagaimana perumusan ideologis orientasi-orientasi tugas. Inspektorat Tenaga Kerja sering menggunakan semangat neo-Multatutlian melawan kepentingan

³⁹ Vincent J. H. Houben, *ibid.*

para pengusaha dan pangreh praja Eropa. Kedua, Inspeksi-inspeksi yang dilakukan secara reguler (paling kurang setahun sekali) memungkinkan inspektur tenaga kerja mencatat perubahan-perubahan pada perusahaan individual, data angka tertentu diambil secara langsung dari catatan-catatan perusahaan dan tidak dengan mudah dimanipulasi, pelanggaran-pelanggaran persetujuan lisan dapat mempunyai akibat-akibat hukum. Terakhir, dari data karir para inspektur tenaga kerja menunjukkan bahwa sebagian besar mereka direkrut dari golongan tengah birokrasi kolonial yang terdiri dari mantan kontrolir, asisten residen dan pejabat militer yang banyak pengalaman di luar Jawa. Hal ini penting karena mereka merupakan administrator berpengalaman yang dapat dianggap mampu berdiri tegak terhadap tekanan-tekanan yang dipergunakan oleh para manajer perusahaan yang dikunjungi.

Sumber lainnya adalah *Archief voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indie, Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultuures (Rubber, Koffie, Klappers, Thee en Oilpalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli; Rubber en Koffie, dan Opgave omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verscheeping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh*. Ketiga sumber ini penting untuk melihat

perkembangan perkebunan karet itu sendiri. Selanjutnya, sumber yang dianggap penting adalah sumber resmi pemerintah, yaitu: *Staatblad van Nederladsch-Indie*, *Koloniaal Verslag*, *Memorie van Overgave* Asisten Residen dan Kontroler di Aceh Timur, dan *Tijdschrift van de Binnenland Bestuur*. Seterusnya, dipakai juga majalah dan surat kabar, yaitu: majalah *De Planter*, *De Indische Gid*, dan *Prisma*; Surat Kabar *Oetoesan Ra'jat* terbitan Langsa, dan Surat Kabar *Pewartar Deli* terbitan Medan.

Penelusuran sumber terutama dipusatkan di Jakarta, yaitu di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, beberapa sumber diperoleh dari koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Perpustakaan Yayasan Prof. Ali Hasjmy, Perpustakaan Daerah NAD, Pemerintah Daerah Tk II Aceh Timur, koleksi pribadi Dr. M. Gade Ismail, M.A. (alm.), dan koleksi di beberapa perpustakaan di Yogyakarta, yaitu Perpustakaan Daerah, Perpustakaan St. Ignatius, Perpustakaan Sonobudoyo, Perpustakaan Yayasan Hatta, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara (PSSAT) UGM, Perpustakaan Pusat Studi Kependudukan, Perpustakaan Pusat Studi Pedesaan UGM, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Oleh karena fenomena yang ingin dieksplorasi adalah fenomena historis, maka sumber-sumber tersebut diproses dalam bingkai metode sejarah. Mulai dari proses pengumpulan bahan sampai ke tahap penulisan akhir dilakukan dengan mengacu pada metode sejarah.⁴⁰

G. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini lebih terarah dan menjadi satu uraian yang sistematis, maka pembahasannya disusun dalam lima bab. Bab pertama berupa pengantar, berisi latar belakang perlunya penelitian ini dilakukan, permasalahan-permasalahan yang menarik untuk diteliti, dan tujuan yang ingin di capai. Dalam bab ini dijelaskan juga pendekatan dan kerangka analitis yang digunakan serta sumber-sumber utama yang digunakan.

Kedadaan sosial ekonomi Aceh Timur awal masuknya *onderneming* ditempatkan dalam bab tersendiri. Semua bagian dalam bab ini seperti kenegerian, penduduk dan mata pencaharian, birokrasi kolonial, dan prasarana ekonomi, dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai perkembangan *onderneming* karet.

⁴⁰ Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*. (East Fordham Road, New York: Fordham University Press, 1957). Sartono Kartodirdjo, *loc. cit.* Lihat juga Kuntowijoyo, *loc. cit.*

Inti pembahasan ditempatkan dalam bab tiga, bab empat, dan bab lima. Dalam bab tiga, pembahasan lebih difokuskan pada keadaan buruh dalam sistem perkebunan karet di Aceh Timur. Pembahasan diawali dengan kehadiran golongan manajerial kulit putih, sistem perekrutan buruh, sistem kerja dan kontrol buruh, dan terakhir pengaruh perkebunan karet terhadap perubahan ruang ekonomi di Aceh Timur. Dalam bab empat, pembahasan lebih difokuskan pada keadaan sosial ekonomi buruh perkebunan karet di Aceh Timur dalam temporal 1907 – 1939. Pembahasan diawali dengan hak yang diperoleh buruh, upah, perumahan, dan fasilitas kesehatan. Semua hak ini dibandingkan dengan hak yang diperoleh kelompok non buruh. Bab ini juga membahas pengaruh Perang Dunia I, resesi ekonomi, dan penghapusan *poenale sanctie* terhadap kondisi sosial ekonomi buruh. Terakhir, bab lima, pembahasan lebih difokuskan pada akibat dari tekanan-tekanan pengelola perkebunan terhadap buruh dan bentuk-bentuk reaksi dari buruh.

Semua uraian dalam penelitian ini diambil kesimpulannya. Oleh karenanya ia ditempatkan dalam bab tersendiri yang diletakkan pada bagian paling akhir.

BAB II

ACEH TIMUR AWAL MASUKNYA ONDERNEMING KARET

A. Kenegerian dan Penduduk

Secara geografis, Aceh Timur merupakan daerah pesisir pantai yang terletak dari muara Sungai Jambu Ayer di utara, batas dengan *Onderafdeeling* Aceh Utara, sampai dengan Muara Sungai Ayer Masen di selatan, batasan dengan *Onderafdeeling* Langkat, Sumatra Timur. Daerah ini membujur di sepanjang Selat Malaka di bagian pantai, sedangkan di bagian pedalaman terbentang jajaran pegunungan Bukit Barisan.¹

Wilayah Aceh Timur dialiri oleh banyak sungai, baik yang besar dan panjang, maupun yang kecil dan pendek. Sungai-sungai besar bersumber di pedalaman, Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Jambu Ayer (panjang 200 km), Sungai Tamiang (180 km), Sungai Peureulak (140 km), dan Sungai Bayeun (80 km), sedangkan sungai-sungai yang lebih pendek diantaranya adalah Sungai

¹ P. J. Veth, "Geographische Aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh", dalam *TAG*, II, (Amsterdam: C. F. Stemler, 1877), hlm. 237. Lihat juga M. Gade Ismail, M. Gade Ismail, "Seuneubuk Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840 – 1942" (*Disertasi Doktor*, Universitas Leiden, 1991), hlm. 20.

Langsa, Sungai Bayeun, Sungai Ranto Panjang, Sungai Alue Nireh, Sungai Idi dan Sungai Arakundoe ².

Hampir semua sungai tersebut dapat “dilayari” sehingga mempunyai arti ekonomis yang sangat penting dalam perjalanan sejarah wilayah ini. Ia menjadi sarana transportasi komoditas yang dihasilkan di pedalaman, terutama lada.³ Di antara sungai-sungai tersebut, Sungai Tamiang merupakan salah satu sungai terpenting di Aceh Timur. Sungai ini menjadi sarana penghubung beberapa kenegerian, seperti Seruwey, Radja Bendahara, Kota Karang sampai ke Simpang Kiri dan Simpang Kanan. Komoditas yang dihasilkan oleh negeri-negeri tersebut diangkut melalui Sungai Tamiang. Transportasi di sungai ini dapat dilakukan dengan menggunakan perahu tradisional maupun dengan perahu uap (*stoombarkas*).⁴

Selain sebagai sarana transportasi yang menguntungkan, Sungai Tamiang juga sering merugikan karena banjir apabila hujan terlalu deras. Akibatnya, banyak tanaman pangan masyarakat hancur, seperti yang dilaporkan terjadi pada tahun

² M. Gade Ismail, *Ibid.*

³ P. J. Veth, *ibid.*

⁴ *Ibid.*

1908.⁵ Sungai lain yang sering mengalami banjir adalah Sungai Jambu Ayer. Meluapnya Sungai Jambu Ayer sering berakibat pada hancurnya tanaman pangan masyarakat di Kenegerian Simpang Ulim yang rendah. Untuk menghindari bencana tahunan ini, kepala kenegerian telah memerintahkan rakyatnya untuk menggali sebuah kanal dari sungai ini menuju daerah Arakundur.⁶ Setelah pembuatan kanal ini, tidak dilaporkan lagi terjadinya banjir yang parah di kenegerian Simpang Ulim. Selain kedua sungai tersebut, tidak ditemukan laporan mengenai akibat banjir yang parah karena meluapnya sungai-sungai yang lain di Aceh Timur.

Bila dibandingkan dengan wilayah Aceh lainnya, kenegerian-kenegerian di Aceh Timur relatif masih muda. Pada saat Perang Belanda di Aceh pecah tahun 1873, sudah terdapat 15 kenegerian di Aceh Timur.⁷ Sebagian besar kenegerian tersebut terbentuk pada awal abad ke-19 dari pengembangan tanaman lada

⁵ *Koloniaal Verslag* tahun 1909.

⁶ *Koloniaal Verslag* tahun 1900-1901.

⁷ Kenegerian-kenegerian di Aceh Timur pada tahun 1873, satu persatu dari barat ke timur, yaitu: Simpang Ulim, Tanjung Seumantok bersama Meurbo, Julok Rayeuk, Julok Cut bersama Bugeng dan Bagok, Idi Cut, Idi Rayeuk bersama Peudawa Cut, Peureulak bersama Jingki, Sungai Raya bersama Bayeun, Langsa bersama Birem Rayeuk, Manyak Paet bersama Raja Tua, Telaga Muku dan Sungai Iyu, Karang, Kejuruan Muda, Sutan Muda, dan Bendahara. E. B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog*, Jilid I, ('-Gravenhage: De Gebroeders van Cleef, 1883), hlm. 43. Lihat Juga M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 50.

yang dilakukan para pendatang. Hanya empat kenegerian yang sudah terbentuk sebelum abad ke-19, yaitu: Kenegerian Peureulak⁸, Kenegerian Langsa, Kenegerian Karang, dan Kenegerian Kejuruan Muda.

Kenegerian Peureulak, yang merupakan kenegerian yang paling tua di Aceh Timur, terletak di barat laut Kenegerian Langsa dan di tenggara Kenegerian Idi Rayeuk. Kenegerian ini mempunyai beberapa daerah takluk (*onderhoorigheden*), yaitu: Peudawa Rayeuk dan Peudawa Cut, Jingki, dan Sungai Raya dan Bayeun. Penduduk kenegerian ini adalah Orang Aceh, yang pada tahun 1877 berjumlah sekitar 8.000 jiwa.⁹

Kenegerian Langsa berbatasan dengan Sungai Iyu di selatan dan Sungai Raya di utara, dengan kepala kenegeriannya bergelar *Kejuruan Langsa*. Pada tahun 1875 kepala kenegerian ini meninggal akibat kolera, dan Asisten Residen de Scheemaker menunjuk anaknya Teuku Bintara Blang sebagai pengganti. Adapun penduduk Kenegerian Langsa mayoritas Orang Aceh, yang pada tahun 1875 berjumlah sekitar 3.000 jiwa.¹⁰

⁸ Kenegerian Peureulak sudah terbentuk sejak akhir abad ke-8, seperti dilaporkan oleh Marco Polo. Denys Lombard, (terj. Winarsih Arifin), *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 41.

⁹ P. J. Veth, *op. cit.*, hlm. 238.

¹⁰ *Ibid.*

Kenegerian Karang dan Kenegerian Kejuruan Muda berada di wilayah Tamiang. Daerah ini merupakan salah satu penghasil lada yang sangat penting di Aceh Timur. Oleh karenanya, beberapa kali terjadi persengketaan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Siak memperebutkan wilayah ini. Penduduk Tamiang terdiri atas dua suku dominan, yaitu Orang Aceh dan Orang Melayu Tamiang (*Teumieng*). Jumlah penduduk di Kenegerian Karang pada tahun 1875 sekitar 3.500 jiwa¹¹, sedangkan mengenai penduduk Kenegerian Kejeruan Muda tidak diperoleh data.

Sementara itu, kenegerian-kenegerian lain terbentuk lebih kemudian akibat perpindahan penduduk dari daerah Aceh lain. Perpindahan penduduk merupakan suatu fenomena baru di Aceh berkaitan dengan penanaman lada. Kegiatan ini dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *buka seuneubok* (membuka kebun lada). Pemimpin pelopor pembuka *seuneubok* ini berasal dari golongan *uleebalang*,¹² terutama dari Aceh Besar. Mereka dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 237.

¹² *Uleebalang* adalah kepala kenegerian yang ditetapkan oleh adat berdasarkan warisan turun-temurun secara *patriarchal*. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 40. Lihat juga J. Kreemer, *Atjeh*, Twee Deel, Leiden: E.J. Brill, 1923, hlm. 263. Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra; Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858-1898*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 3. M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 52.

mudah mendapatkan orang di Aceh Besar atau di Pidie yang mau mencoba keberuntungan di daerah baru ini, baik sebagai pekerja musiman maupun menjadi penduduk permanen.¹³ Dari pusat-pusat pemukiman penanaman lada yang berhasil ini kemudian menjadi sebuah negeri dengan seorang *uleebalang*. Ia diakui sebagai *uleebalang*, baik oleh penduduk yang berdiam di daerah itu maupun oleh *uleebalang* di sekitarnya apabila dia berhasil memperoleh sebuah surat pengangkatan resmi dari sultan Aceh (*Sarakata*).¹⁴

Penduduk yang bermigrasi ke Aceh Timur berasal dari tiga daerah, yaitu: Pasai, Pidie, dan Aceh Besar. Migrasi penduduk dari ketiga daerah tersebut yang terjadi pada awal abad ke-19 bukan karena faktor pendorong yang berakar pada kondisi ekonomi di daerah asal,¹⁵ tetapi lebih dikarenakan oleh faktor penarik yang

¹³ Anthony Reid, *ibid.*, hlm. 15.

¹⁴ *Sarakata* adalah surat pengangkatan resmi yang dikeluarkan Sultan Aceh, pada bagian atasnya diberi stempel atau cap resmi kerajaan yang disebut *cap sikureung* atau cap halilintar. C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, II. (Leiden: E.J. Brill, 1893), hlm. 136. Lihat juga M. Gade Ismail, *loc. cit.*

¹⁵ Ketiga daerah tersebut merupakan daerah penghasil beras di Aceh. Malahan pada saat Inggris mulai membuka pelabuhannya di Pulau Pinang, beras dari Pidie telah diekspor ke daerah tersebut. James T. siegel, *The Rope of God*. (Barkeley: University of California Press, 1969), hlm. 15. Lihat juga John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra*. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1826), hlm. 222.

ditawarkan oleh daerah baru. Daerah Aceh Timur yang kosong, dari segi ekonomi memberikan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Besarnya permintaan lada di pasar internasional dengan harga yang sangat tinggi pada tahun 1820-an menyebabkan munculnya keinginan di kalangan penduduk untuk mencari daerah baru yang belum berpenghuni yang cocok untuk penanaman lada.¹⁶

Dari segi politik, terutama dilihat pada mobilitas politik, daerah baru ini juga memberikan kemungkinan besar kepada sejumlah besar orang, terutama para kepala penanaman lada untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dalam bidang politik, yang di daerah asalnya kemungkinan untuk itu sudah tertutup.¹⁷ Dalam sistem pemerintahan pada tingkat kenegerian di Aceh, apabila seorang *uleebalang* meninggal, hanya boleh digantikan oleh putranya yang tertua dari isteri yang *graha*.¹⁸ Beberapa keluarga *uleebalang* yang di daerah asalnya tidak memungkinkan memperoleh kesempatan menjadi *uleebalang*, melakukan migrasi ke Aceh Timur untuk membuka kembali

¹⁶ Harga lada pada tahun 1806 berkisar sekitar 8 Ringgit Spanyol per pikul meningkat menjadi 10 Ringgit Spanyol per pikul. M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 59 – 63.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 64.

¹⁸ James T. Siegel, *op. cit.*, hlm. 27.

kesempatan itu di daerah baru. Nyak Sim, misalnya, saat masih berada di Julok hanya berkedudukan sebagai panglima perang, setelah berhasil dalam penanaman lada di Idi Rayeuk menjadi *uleebalang* pertama di kenegerian itu. Teuku Muda Angkasah, dalam contoh lain, merupakan adik *uleebalang* Blang Me, Pasai, menjadi *uleebalang* di Meureubo.¹⁹

Dari kenegerian-kenegerian yang muncul di Aceh Timur pada sekitar pertengahan abad ke-19, Kenegerian Julok Rayeuk merupakan kenegerian yang paling awal terbentuk. Kenegerian ini dibentuk pada tahun 1840 oleh para migran yang berasal dari Pasai. Kenegerian ini pada tahun 1876 berpenduduk 6.000 jiwa dan menghasilkan 8.000 pikul lada pertahun. Para pendatang dari Pasai ini kemudian meneruskan pembentukan kenegerian-kenegerian baru sebagai pengembangan dari Kenegerian Julok Rayeuk, yaitu Julok Cut, Bugeng, Bagok, Idi Cut, Idi Rayeuk dan Meureubo.²⁰

Para migran dari Pidie yang datang kemudian ikut menanam lada di kenegerian-kenegerian yang telah dibentuk oleh pendatang dari Pasai, terutama di Idi Rayeuk, Peudawa Rayeuk dan Peureulak. Kenegerian Idi Rayeuk merupakan kenegerian

¹⁹ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

terkaya kedua di Aceh Timur setelah Simpang Ulim. Penduduknya berasal dari Pasai, Pidie, dan daerah Aceh lainnya, yang pada tahun 1875 berjumlah sekitar 8.000 jiwa, dan menghasilkan 15.000 pikul lada per tahun. Sedangkan tetangganya, Idi Cut, hanya berpenduduk sekitar 1.200 jiwa, dan hanya menghasilkan 1.800 pikul lada pertahun.²¹

Satu-satunya kenegerian yang didirikan oleh pendatang dari Pidie adalah Sungai Iyu, di daerah Tamiang.²² Kenezerian ini merupakan satu kenegerian kecil, hanya menghasilkan 1.200 pikul lada. Kepala kenegerian dengan gelar *Teungku Chik* merupakan bawahan dari Raja Bendahara.²³ Sayangnya, data mengenai jumlah penduduk kenegerian ini tidak didapatkan.

Meskipun pendatang dari Aceh Besar memasuki Aceh Timur lebih kemudian dibanding pendatang Pasai, namun mereka berhasil juga mendirikan dua kenegerian. Hal ini dimungkinkan oleh karena mereka mendapat dukungan dari Sultan Aceh. Kenezerian-kenezerian yang mereka dirikan adalah Simpang Ulim dan Tanjong Seumantok. Kenezerian Simpang Ulim antara tahun 1860 sampai dengan pecahnya perang Belanda di Aceh

²¹ P. J. Veth, *op. cit.*, hlm. 243.

²² M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 55.

²³ P. J. Veth, *op. cit.*, hlm. 237.

merupakan kenegerian terkaya di Aceh Timur dengan menghasilkan 35.000 pikul lada pertahun, dan jumlah penduduk sekitar 9.000 jiwa pada tahun 1876.²⁴

Dua kenegerian lain yang terbentuk setelah tahun 1850-an, yaitu Peudawa Rayeuk dan Sungai Raya, dibangun oleh orang-orang turunan Arab yang berasal dari Pasai. Kedua kenegerian ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Mangkubumi Lhokseumawe (Aceh Utara) kepada dua orang turunan Arab, Sayid Yusuf dan Sayid Aqil, sebagai balas jasa atas bantuan yang mereka berikan saat Mangkubumi melaksanakan tugas Sultan Aceh untuk menegaskan kembali kekuasaannya terhadap kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur pada tahun 1854.

Dengan memperoleh pengikut dari Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie, Sayid Yusuf berhasil menjadi *uleebalang* Peudawa Rayeuk pada tahun 1855. Keneferian ini menjadi rebutan antara Peureulak dan Idi Rayeuk. Penduduk kenegerian ini adalah Orang Aceh, yang pada tahun 1875 berjumlah 1.500 jiwa, dan produksi lada 6.000 pikul pertahun,²⁵ sedangkan Sayid Aqil, dengan memperoleh banyak pendatang orang-orang Melayu dari Langkat,

²⁴ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 56.

²⁵ P. J. Veth, hlm. 241.

menjadi *uleebalang* daerah Sungai Raya dalam wilayah Langsa.²⁶ Pada tahun 1875 Sayid Aqil meninggal dan diganti oleh putranya Sayid Djafar. Penduduk Sungai Raya saat itu adalah sekitar 500 orang, mayoritas Orang Melayu dan menghasilkan sedikit lada dan hasil hutan.²⁷

B. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Aceh Timur dibangun oleh para pendatang penanam lada. Dengan demikian, mata pencaharian utama penduduk wilayah ini sampai dengan masuknya kolonial Belanda adalah penanam lada. Malahan, dengan aktivitas penanaman lada ini telah menjadikan pemimpin pembuka *seuneubok* sebagai *uleebalang*, yang di daerah asalnya sudah tertutup baginya.

Selain sebagai penanam lada, penduduk Aceh Timur juga menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pertanian padi merupakan kegiatan yang sudah lama mereka lakukan di daerah asalnya sebelum hijrah ke Aceh Timur. Bertani padi adalah mata pencaharian paling penting bagi orang Aceh. Hal ini sesuai dengan pribahasa Aceh yang berbunyi, “*Seumayang pangulee ibadat, meugoe pangulee hareukat.*” Artinya, shalat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁷ P. J. Veth, *op. cit.*, hlm. 238.

adalah bagian terpenting dari ibadah, sedangkan bertani padi adalah sumber mata pencaharian utama. Peribahasa lain berbunyi, "*Kaya meuh hana meusampe, kaya pade meusampurna*," artinya, kaya emas tidaklah cukup, kaya padi barulah sempurna.²⁸

Berbeda dengan di daerah asalnya, usaha pertanian padi di Aceh Timur kurang memberikan hasil yang memuaskan. Menurut M. Gade Ismail²⁹, terdapat tiga faktor yang menyebabkan usaha pertanian padi kurang berkembang di daerah ini. *Pertama*, kesuburan tanah yang kurang, berdampak tanaman padi membutuhkan usaha yang sangat intensif. Hal ini tidak dapat mereka lakukan dalam waktu yang bersamaan dengan tanaman lada yang juga membutuhkan usaha yang sama. *Kedua*, curah hujan yang kurang dan tidak tersedianya irigasi³⁰ ikut menghambat penanaman padi di sawah. Oleh karena tidak adanya irigasi, tanaman padi hanya dapat ditanam di ladang. Ketergantungan pada curah hujan menyebabkan tanaman padi

²⁸ T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hlm. 47. Lihat juga Kreemer, *op. cit.*, hlm. 440.

²⁹ M. Gade Ismail, *loc. cit.*, hlm. 31 – 32.

³⁰ Irigasi baru mulai dibangun di Aceh Timur pada tahun 1912, yaitu di kenegerian Idie Rayeuk, Idi Cut, dan Julok Rayeuk. Seluruhnya hanya dapat mengairi 1.300 Ha. *Ibid.* hlm. 31.

sering mengalami kegagalan.³¹ *Terakhir*, faktor harga yang lebih menguntungkan menanam lada daripada menanam padi. Pada tahun 1876 di Pulau Pinang, harga beras \$ 95 perkoyan, sementara harga lada mencapai \$ 240 perkoyan. Dengan demikian, kebutuhan bahan makanan dengan mudah dapat mereka beli dari hasil penjualan lada.

Areal penanaman padi di Aceh Timur sedikit lebih luas terdapat di *Onderafdeeling* Idi, Langsa dan Tamiang. Di kenegerian Julok Cut, Julok Rareuk, Idi Cut, dan Idi Rayeuk dalam *Onderafdeeling* Idi terdapat beberapa kompleks persawahan yang namanya sama dengan nama sungai yang mengairinya. Di kenegerian Bagok dan Bugeng, misalnya, pertanian padi dilakukan dengan sistem sawah tadah hujan dan sistem ladang. Ladang di sini dibentuk dengan cara pembakaran hutan. Setelah padi ladang selesai, lahan biasanya digunakan untuk menanam pinang, kelapa dan kadang-kadang lada.³² Di kenegerian Peureulak, pada kedua sisi sungainya terdapat sekitar 6.000 Ha areal persawahan yang sangat baik, tetapi masih belum sepenuhnya ditanami. Sementara

³¹ *Algemeene Platenteelt*. (Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1911), hlm. 4.

³² ANRI, Film no. 11, *MvO*. Asisten Residen Van Exel, *Beschrijving van het Zelfbestuurend landschap Bago' en Bugeng, afdeeling Oostkust van Atjeh* 1935.

itu, di Tamiang tanaman padi hampir sepenuhnya ditanam di ladang.³³

Selain usaha penanaman lada dan padi, penduduk Aceh Timur juga mengusahakan jenis tanaman lainnya, yaitu pinang dan kelapa (kopra). Kedua tanaman ini menjadi komoditas penting penduduk daerah ini di samping lada. Menurut laporan, ekspor kedua komoditas tersebut melalui dua pelabuhan utama wilayah ini, yaitu pelabuhan Idi dan pelabuhan Bayan, sudah dilakukan sejak 1904.

Tabel 2.1 : Ekspor Pinang dan Kopra Aceh Timur, 1904-1907.

Tahun	Komoditas ekspor	
	Pinang (koyan)	Kopra (pikul)
1904	553,49	-
1905	789,13	-
1906	761,08	40,00
1907	-	528,01

Sumber : Koloniaal Verslag, Laporan Tahun 1907 dan 1908.

Data dalam Tabel 2.1 dapat ditafsirkan bahwa meskipun baru dilaporkan tahun 1904, pinang sudah ditanami oleh masyarakat Aceh Timur jauh sebelum masuknya kekuasaan kolonial. Sebaliknya, tanaman kelapa sebagai komoditas ekspor masih merupakan hal yang baru bagi masyarakat Aceh Timur. Hal ini diperkirakan sebagai respons masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah dalam paket kebijakan pasifikasi di Aceh

³³ J. Kreemer, *op. cit.*, hlm. 442.

secara keseluruhan. Dari peningkatan jumlah ekspor kopra yang cukup signifikan dari 40 pikul tahun 1906 menjadi 528,01 pikul tahun 1907, mengindikasikan bahwa komoditas ini mulai sangat diminati masyarakat Aceh Timur.

C. Penetrasi Kekuasaan Kolonial Belanda

Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah sangat besar perannya bagi masuknya investasi swasta ke Aceh Timur. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dilontarkan oleh seorang tokoh penting Perusahaan Deli, T. J. Cremer, pada tahun 1896 yang mengusulkan tindakan tegas untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di Aceh. Hanya dalam kondisi yang demikian menurutnya, semakin banyak perusahaan swasta yang mau tinggal di Aceh. Dengan cara ini Aceh akan menjadi pusat perdagangan dengan seluruh Sumatera, Penang, dan daerah-daerah di sekitar Teluk Benggala. Secara umum, dia menetapkan bahwa dalam perkembangan luar Jawa, Aceh bisa memberikan sumbangan penting bagi sarana keuangan secara umum dan bagi perkembangan perdagangan dan industri secara khusus, sebagai akibat desentralisasi wilayah yang dimungkinkan di sini.³⁴

³⁴ A.H.P. Clemens dan Thomas Linblad, *Het Belang van de Buitengewesten; Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*. (Amsterdam: NEHA, 1989), hlm. 29.

Secara politik, sejak tahun 1877, hanya 4 tahun sejak pecahnya Perang Belanda di Aceh 1873, semua kenegerian di Aceh Timur sudah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Hal ini dapat disebutkan karena semua *uleebalang* telah menandatangani surat pengakuan kedaulatan Hindia Belanda (*Korte Verklaring*). Idi Rayeuk merupakan daerah paling cepat berdamai dengan Belanda dengan mengibarkan bendera Belanda sejak 7 Mei 1873, dan secara resmi mengakui kedaulatan Hindia Belanda pada 15 April 1874. Sungai Raya malah sudah mengakuinya lebih dahulu, yaitu tanggal 25 Maret 1874. Kenegerian-kenegerian lain juga memberi pengakuannya kepada Hindia Belanda secara berturut-turut: Karang dan Bendahara di Tamiang pada 3 Mei 1874, Peureulak pada 2 Agustus 1874, Julok Rayeuk dan Julok Cut pada 22 Oktober 1874, Bugeng dan Bagok pada 25 Januari 1875, dan Peudawa Rayeuk pada 18 Maret 1875.³⁵

Tiga kenegerian lainnya, yaitu: Simpang Ulim, Tanjong Seumantok dan Langsa baru mengakui kedaulatan Hindia Belanda melalui proses penaklukan. Penaklukan ke luar Aceh Besar ditunda sampai tahun 1874, saat van Lansberge merasa yakin kedudukan mereka di Aceh Besar sudah kuat untuk melakukan ekspedisi ke luar. Sasaran utama penaklukan adalah

³⁵ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hal. 85 – 100.

Simpang Ulim dan Tanjong Seumantok. Tanjong Seumantok dan Meurbo baru berhasil ditaklukkan pada 14 Nopember 1876, disusul Simpang Ulim pada 29 Nopember 1876. Terakhir, *uleebalang* Langsa mengakui kedaulatan Hindia Belanda pada 12 Mei 1877.³⁶

Dengan takluknya Langsa, secara politik seluruh Aceh Timur sejak 1877 sudah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda menata administrasi pemerintahan di daerah ini. Dari 26 April 1873 sampai tahun 1875, Ch. Bogaert, Komandan kapal "Timor" yang sekaligus menjadi kepala stasiun Angkatan Laut Hindia Belanda di Aceh Timur bertugas sebagai penghubung Pemerintah Hindia Belanda dengan para *uleebalang* di Aceh Timur. Birokrasi resmi pemerintahan baru dibentuk pada tahun 1875, dengan menempatkan Aceh Timur berada di bawah Asisten Residen yang pada awalnya berkedudukan di Idi Rayeuk dan kemudian dipindahkan ke Langsa. Asisten Residen pertama ditunjuk L. de Scheemakers pada 26 Maret 1875 untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh Komandan Stasion Angkatan Laut Hindia Belanda untuk urusan-urusan politik.³⁷

³⁶ Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 188. Lihat juga M. Gade Ismail, *ibid.*

³⁷ M. Gade Ismail, *op.cit.*, hlm. 2.

Sampai tahun 1907, kenegerian-kenegerian di Tamiang belum masuk dalam administrasi Aceh Timur. Sejak tahun 1865 Pemerintah Hindia Belanda mengakui kenegerian-kenegerian di Tamiang berada di bawah Pangeran Langkat, Sumatera Timur.³⁸ Baru dengan Keputusan pemerintah tanggal 4 Feruari 1908 nomor 20 (Lembaran Negara Nomor 112), *Onderafdeeling* Tamiang dipisahkan dari Keresidenan Sumatra Timur dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Gubernur Aceh, sebagai satu *onderafdeeling* dalam *Afdeeling* Aceh Timur.³⁹ Sejak tahun 1908, Aceh Timur bertambah satu *onderafdeeling* lagi dengan masuknya Gayo Lues⁴⁰ berdasarkan Keputusan Pemerintah tanggal 10 Juni 1908 nomor 17 (Lembaran Negara nomor 401).⁴¹ Dengan masuknya Tamiang dan Gayo Lues, *Afdeeling* Aceh Timur menjadi lima *onderafdeeling*, yaitu: Idi, Langsa, Tamiang, Serbajadi, dan Gayo Lues.

Sama halnya dengan di daerah-daerah lain di Nusantara, Pemerintah kolonial Belanda tidak menjalankan pemerintahan

³⁸ W.H.M. Schadee, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*, (Amsterdam: Sumatra Institut, 1919), hlm. 127.

³⁹ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1908.

⁴⁰ Sebelum tahun 1908 Gayo Lues berada dalam administrasi *Afdeeling* Aceh Utara.

⁴¹ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1909.

langsung di Aceh. Kebijakan pemerintahan di Aceh dijalankan dengan perantaraan pemerintahan adat yang sudah terbentuk secara historis.⁴² Oleh karenanya, *onderafdeeling-onderafdeeling* di Aceh Timur ini dibagi lagi dalam wilayah-wilayah yang secara historis dikuasai oleh *uleebalang*, yaitu:

1. *Onderafdeeling* Idi, meliputi wilayah: Tanjong Seumantok dan Meureubo, Simpang Ulim, Julok Cut, Julok Rayeuk, Bagok dan Bugeng, Idi Rayeuk, Idi Cut, dan Peudawa Rayeuk, di bawah Kontrolir *Binnenlandsch Bestuur* yang berkedudukan di Idi.
2. *Onderafdeeling* Langsa, meliputi wilayah: Peureulak, Sungai Raya, dan Langsa, di bawah Asisten Residen, Kepala *Afdeeling*, dengan kedudukan di Langsa.

⁴² Setiap calon pemangku *uleebalang* diharuskan menandatangani pernyataan ikrar setia kepada Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verklaring*) terlebih dahulu. Tugas *uleebalang* mencakup urusan pemerintahan, kepolisian atau ketertiban, kehakiman dan kemakmuran. Sebagai imbalan, Pemerintah Kolonial membayar tunjangan tetap (*ondesstand*) setiap bulan yang diambil dari kas daerah yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada senioritas dan potensi wilayahnya. Demikian pula anggota keluarganya, baik lelaki maupun perempuan juga mendapat tunjangan bulanan. Lihat A.J. Piekaar, *Atjeh en Oorlog Met Japan*. (Bandung: Vitgeverij W. Van Hoeve S'Grovenhage, 1949), hlm. 7. Lihat juga M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) hlm. 19.

3. *Onderafdeeling* Tamiang, meliputi wilayah: Karang, Bendahara, Sungai Iyu, dan Kejeruan Muda dan Sutan Muda, di bawah Penguasa Sipil yang berkedudukan di Kuala Simpang.
4. *Onderafdeeling* Serbajadi, meliputi wilayah: Kejeron Abog, Penghulu Penaron, Kejeron Tandelen dari Penghulu Jerneh, dan juga mencakup beberapa kompleks kampung Tampor dalam wilayah Kejeron Petiambang (Gayo Lues), di bawah Penguasa Sipil yang berkedudukan di Lokop.
5. *Onderafdeeling* Gayo Lues, meliputi wilayah *Kejeron* Petiambang, berada di bawah Penguasa Sipil yang berkedudukan di Blang Kejeran.⁴³

Daerah-daerah *uleebalang* ini dibagi lagi dalam wilayah *Uleebalang Cut* (Bangsawan Kecil). Pembagian ini secara *de facto* sudah ada sebelum datangnya Kolonialis Belanda⁴⁴. Akan tetapi,

⁴³ J. Paulus, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede Druk, Eerste Deel. (Leiden : E. J. Brill, 1917), hlm. 71.

⁴⁴ Pembagian daerah *uleebalang* dalam *Uleebalang Cut* bukan asli Aceh dan tidak berlaku di seluruh Aceh. Sistem pemerintahan Aceh pada akhir abad ke-19, setiap negeri diperintah oleh seorang raja kecil yang disebut *uleebalang*. Dalam pemerintahan mereka mempunyai pembantu yang disebut *banta* atau *bangta*, terdiri dari adik laki-laki atau saudaranya. Mereka bertindak sebagai hakim dalam daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh seorang yang mengerti masalah *hukum*, yang disebut *kadhi* (kadi). Mereka juga menjadi pemimpin militer dengan dibantu oleh panglima-panglimanya, yang disebut *rakan*. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hlm. 40. J. Kreemer, *op. cit.* II, hlm. 263. Lihat juga J.A. Kruyt, *Atjeh en de Atjehers: Twee Jaaren Blokkade*, 1877, hlm. 61.

sebagian dari *Uleebalang Cut* dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintahan. Di Peureulak misalnya, sebelum tahun 1900 hanya terdapat 4 *uleebalang cut*, setelah 1900 menjadi 10 *Uleebalang Cut*, yang secara tegas baru diatur pada tahun 1919.⁴⁵

Dengan pembentukan sistem administrasi baru ini, pemerintahan mulai berjalan baik, dan kondisi keamanan juga semakin kondusif. Bila dibandingkan daerah Aceh lainnya pada waktu yang sama, kondisi keamanan di Aceh Timur jauh lebih baik. Gangguan keamanan hanya terjadi di beberapa tempat dalam skala kecil. Secara temporal pun, gangguan-gangguan ini hanya terjadi sampai tahun 1910. Setelah itu hampir tidak terdengar lagi gangguan keamanan di daerah ini.

Berdasarkan laporan, gangguan keamanan hanya terjadi di Peudawa Rayeuk oleh Panglima Kaum Labait, tahun 1879,⁴⁶ di Peureulak, oleh Nyak Dawod dari Alue Lhok, dan di Langsa oleh Panglima Prang Usuh, tahun 1900.⁴⁷ *Onderafdeeling* Idi merupakan wilayah yang paling sering mengalami gangguan

⁴⁵ ANRI, Film no. 11, *MvO*, J. J. C. H. van Waardenberg, *Onderafdeeling* Langsa, Juni 1931.

⁴⁶ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1879.

⁴⁷ *Koloniaal Verslag*, Lapora Tahun 1900.

keamanan. Penyerangan dilaporkan terjadi pada tahun 1901 oleh kelompok Tengku Usen Ulee Gajah dan Pang Mak Asan,⁴⁸ dan tahun 1907 oleh kelompok dari Keureutoe (Aceh Utara).⁴⁹ Setelah tahun 1907, gangguan keamanan mulai jarang dilaporkan. Laporan tahun 1910 menyebutkan bahwa kondisi politik di *afdeeling* pantai timur, terutama *onderafdeeling* Idi, Langsa dan Tamiang, tidak begitu mengkhawatirkan. Para pemimpin dan penduduk menunjukkan harapan yang besar di masa depan. Secara bersama-sama mereka melakukan pembukaan sawah dan saluran air baru, membangun jembatan dan mendirikan sekolah-sekolah.⁵⁰

D. Pembangunan Prasarana Ekonomi

Prasarana ekonomi sangat penting sebagai penunjang usaha perkebunan. Pada awal abad ke-20, Aceh Timur telah memiliki beberapa prasarana ini, antara lain; pelabuhan, jalan, dan jaringan kereta api. Pembangunan prasarana ekonomi oleh Pemerintah Kolonial Belanda merupakan bagian dari usaha perbaikan perekonomian rakyat untuk meredakan perlawanan.

⁴⁸ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1902-1903.

⁴⁹ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1907.

⁵⁰ *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1910.

Kebijakan ini kemudian lebih dikenal dengan politik “pasifikasi”, anjuran C. Snouck Hurgronje.⁵¹

Sebelum masuknya kekuasaan Belanda, Aceh Timur telah memiliki dua pelabuhan ekspor-impor komoditas-komoditas penting dari dan ke daerah ini, yaitu Pelabuhan Idi dan Pelabuhan Bayeun. Komoditas yang diekspor melalui kedua pelabuhan ini adalah: lada, kopra, pinang dan hasil hutan, sedangkan komoditas yang diimpor adalah antara lain: beras, ikan asin, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁵² Setelah dikuasai Belanda, Pelabuhan Idi yang sempat ditutup dibuka kembali untuk perdagangan umum seperti sebelumnya, sedangkan perdagangan di Pelabuhan Bayeun nantinya dialihkankan ke Pelabuhan Langsa⁵³. Pelabuhan Langsa, dengan teluknya yang dalam, dapat disinggahi oleh kapal-kapal milik KPM dengan aman tanpa harus menunggu air pasang untuk mengangkut hasil perkebunan, dan hasil bumi lainnya dari Aceh Timur.⁵⁴ Sebaliknya, Pelabuhan Bayeun (Damar Tutong) hanya

⁵¹ J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh: Vroeger en Nu.* (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hlm. 77-85.

⁵² J. Kreemer, *op.cit.*, hlm. 16- 25.

⁵³ Pelabuhan Langsa masih menjadi pelabuhan utama yang sangat penting artinya untuk daerah ini sampai sekarang. Pelabuhan ini mulai dibuka untuk perdagangan umum pada 1 Februari 1907, menggantikan pelabuhan Bayeun sebagai pelabuhan ekspor. Lihat *Koloniaal Verslag* tahun 1907.

⁵⁴ Anonim, “De Langsarbaai” dalam *IG*, II, Tahun 1905, (Amsterdam: J. H. De Bussy), hlm. 1656-1661.

dibuka untuk perahu-perahu tradisional berdasarkan Lembaran Negara tahun 1901 nomor 188, tanggal 1 September 1901. Akan tetapi, dalam kenyataannya perahu-perahu uap milik perkebunan juga diberi izin masuk.⁵⁵

Selain Pelabuhan, prasarana lainya yang juga sangat penting bagi usaha perkebunan adalah transportasi darat, terutama jalan raya dan jaringan kereta api. Pada awal abad ke-20, Aceh Timur sudah mempunyai kedua prasarana ini. Berdasarkan laporan tahun 1900-1901, pembangunan jalan raya berjalan lancar dan telah dapat menghubungi Sungai Jambu Ayer, perbatasan di barat dengan Kuala Simpang di Tamiang. Penggunaan jalan ini terbukti ketika Gubernur Sipil dan Militer bersama staf dan satu regu pasukan kavaleri berangkat dari Jambu Ayer (Teupin Teungku di Bayu) ke Idi (50 km), tanggal 30 Agustus dari Idi menuju Bayeun (48 km), pada tanggal 1 September dari Bayeun menuju Keude Langsa, dan keesokan harinya (2 September) menuju Kuala Simpang (masing-masing 24 km).⁵⁶

Pembangunan jaringan kereta api juga berjalan lancar. Meskipun pembangunan jaringan Kereta Api Aceh (*Atjeh-Tram*)

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Koloniaal Verslag* Tahun 1900-1901.

sangat bermuatan politik, namun angkutan ini juga berpengaruh dalam lapangan ekonomi.⁵⁷ Sarana pengangkutan ini telah terbukti sangat besar artinya bagi pengangkutan hasil produksi perkebunan di Aceh Timur.⁵⁸ Jaringan Kereta Api Aceh yang pertama sekali dibangun pada tahun 1876 hanya dapat menghubungkan Ulee Lheu ke Kutaraja (Banda Aceh) sejauh 5 Km, telah berkembang dengan cepat sekali. Hanya tiga tahun sejak perluasan jaringannya ke Sigli (luar Aceh Besar), 1898, jaringan Kereta Api Aceh sudah mencapai Idi (Aceh Timur), dan dua tahun kemudian (1903) sudah memasuki Langsa. Selanjutnya, pemerintah berusaha menghubungkan Kereta Api Aceh dengan Kereta Api Deli (*Deli Spoor*) yang jaringannya berakhir di Pangkalan Brandan (Sumatera Timur). Usaha ini direalisasikan dengan pembangunan rel dari Langsa ke Kuala Simpang (1910), Kuala Simpang ke Sungai Liput (1914) dan kemudian mencapai Besitang (1915). Dengan mencapai Besitang panjang jaringan kereta api Aceh 450 Km, dan sekaligus telah terhubung dengan

⁵⁷ Pembangunan jaringan Kereta Api Aceh merupakan bagian dari tujuan pasifikasi. J. Jongejans, *op. cit.*, hlm. 132.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

kereta api Deli yang juga telah membuka jaringannya sampai Besitang.⁵⁹

E. Perkembangan *Onderneming* Karet

Pohon karet menghasilkan lateks, suatu cairan berwarna putih yang keluar saat kulitnya dipotong. Lateks akan keluar selama sekitar 3 jam dan ditampung dalam suatu wadah yang diletakkan pada pohon yang dipotong (disadap). Jumlah lateks yang dikumpulkan tergantung pada kondisi alamiah batang, pada keahlian penyadapan, frekuensi dan metode penyadapan. Adanya liburan sisipan dari rutinitas harian penyadapan memberi kesempatan pada batang untuk memperbaharui kulitnya, menjaga produktivitas tetap tinggi, dan mencegah terlalu sering penyadapan. Metode penyadapan yang benar akan mencegah kerusakan pada batang dan memperlancar keluarnya lateks. Meskipun banyak cara penyadapan namun metode seperempat dan setengah spiral merupakan metode yang lazim dilakukan. Suatu cara mudah membekukan lateks dan menghasilkan karet mentah adalah mencampur lateks dengan asam atau cuka, yang akan menghasilkan karet lempengan. Lateks beku ini kemudian

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 131- 139. Lihat juga J. Kreemer II, *op. cit.*, hlm. 71-78.

diproses lagi untuk menghasilkan karet kualitas terbaik, baik dalam bentuk *sheet* maupun karet *crepe*.⁶⁰

Hasil karet utama Indonesia masa kolonial adalah daerah Luar Jawa. Pembukaan Luar Jawa dengan penegakan kekuasaan kolonial Belanda dalam aspek politik berpengaruh terhadap kenaikan kehadiran orang Barat di sana. Baru setelah perluasan aparatur pemerintah pusat dan aturan-aturan lebih lanjut tentang hubungan kekuasaan pemerintah terbukti sanggup dan siap menjamin keamanan orang dan wilayah. Penegakan kekuasaan kolonial juga ditujukan kepada para investor, khususnya ketika para pejabat yang ambisius membuat propaganda bagi peluang masa depan wilayahnya. Selalu ada pertukaran antara inisiatif pemerintah dan respon pihak swasta.⁶¹ Keadaan ini sangat jelas terlihat pada kasus pembukaan wilayah Aceh Timur bagi investor pada awal abad ke 20.

Awal masuknya *onderneming* karet ke Aceh Timur berkaitan erat dengan perkembangan perkebunan karet di Indonesia secara umum, dan Sumatra Timur secara khusus. Di Indonesia

⁶⁰ Bambang Purwanto, "From Dusun to the Market; Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890 – 1940" (*Disertasi Doktor*, University of London, 1992), hlm. 101.

⁶¹ J. Thomas Linblad, "Ontwikkeling van de Buitengewesten", dalam A.H.P. Clemens dan Thomas Linblad, *Het Belang van de Buitengewesten; Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*. (Amsterdam: NEHA, 1989), hlm. 3.

penanaman karet pada tanah perkebunan mengikuti contoh dari budidaya tanaman ekspor yang sudah mantap, khususnya tebu dan tembakau. Pola organisasi perusahaan yang diterapkan juga sama, sehingga menarik para investor dan pegawai manajerial dari Eropa. Juga terjadi pengalihan sumber dari perkebunan-perkebunan yang ada dengan mengubah penanamannya dengan karet. Perusahaan perkebunan karet merupakan organisasi yang relatif besar, dengan manajemen dan tenaga kerja yang secara hirarkhis terstruktur, yang menghasilkan jenis komoditas seragam melalui pabrik pengolahan pusat. Ekspor karet dan penjualannya di pasaran dunia diselenggarakan melalui agen dan makelar (*broker*) karet.⁶²

Industri perkebunan karet baru diusahakan di Indonesia pada pertengahan akhir abad ke 19. Jenis *ficus elastica*, jenis karet alam Asia Tenggara, mulai ditanam dalam jumlah terbatas di Jawa pada tahun 1860, dan kemudian jenis *castilloa elastica*, dari Amerika Tengah dan Selatan, juga dicoba. Kedua jenis karet tersebut lebih rendah baik produktivitas maupun kualitas lateksnya dibandingkan dengan jenis *hevea brasiliensis* yang ditanam Malaysia. Pada tahun 1903 manajemen *Pamanoekan en*

⁶² William J. O'Malley, "Perkebunan 1830 – 1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth et al., *Sejarah ekonomi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 259-261.

Tjiasemlanden (*P.&T. Land*) mengirim seorang stafnya mengunjungi perkebunan karet di Malaysia dan Srilangka. Setelah pulang ke Indonesia, dengan sangat antusias dia menganjurkan perusahaannya menanam jenis *havea*. Anjuran staf tersebut mendapat respon yang baik dari perusahaan dengan mulai menanam jenis *havea* pada salah areal perkebunan milik Tiedeman dan Kerchem dalam tahun yang sama, dan tidak lama kemudian sudah meliputi lahan yang sangat luas.⁶³

Sebagian besar tanaman karet masa awal di Jawa ditanam pada lahan bekas tanaman kopi yang mati diserang penyakit pada awal abad ke 20. Di Sumatra Timur sebaliknya, tanaman karet awalnya ditanam pada lahan yang disiapkan untuk tanaman tembakau. Perkembangan industri perkebunan karet di Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada konversi dari tanaman terdahulu ke tanaman baru, tidak juga pada inisiatif perusahaan yang telah mapan. Akan tetapi, modal dan perusahaan dari negara-negara Eropa di luar Belanda sangat berminat mengadu keberuntungan pada komoditas baru ini setelah diberlakukannya politik liberal di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan jenis komoditas ini. Negara yang paling aktif

⁶³ G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya; A Study in Economic Development*. (New York: The Macmillan Company, 1968), hlm. 117.

membuka perkebunan baru selain Belanda adalah Inggris dan Belgia-Perancis.⁶⁴

Perkebunan karet berkembang pesat di luar Jawa, khususnya Sumatera Timur, karena jumlah tanah yang melimpah sehingga pengusaha dapat mengembangkan perkebunannya dalam skala besar.⁶⁵ Khusus untuk Sumatera Timur, selain faktor tanah juga fondasi yang telah dibangun oleh industri perkebunan tembakau Deli seperti prasarana pelayanan administrasi dan keuangan, kesenangan kota, fasilitas pengiriman barang dengan kapal, dan jaringan pengangkutan menarik perhatian perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan perkebunan jenis lain. Waktu ditemukan bahwa lahan yang agak tinggi di luar wilayah utama perkebunan tembakau sangat cocok untuk pohon dan tanaman keras, dan waktu itu terbukti bahwa pengaturan lahan dan pekerja sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan tembakau di Kerajaan Melayu lain dan di wilayah Batak Simalungun, pada dasawarsa pertama abad ke 20 terjadilah ekspansi mengejutkan dalam ekonomi perkebunan Sumatra Timur.⁶⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam masa kira-kira 1899 sampai 1905 hanya terlihat proyek-proyek percobaan,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ William J. O'Malley, *op. cit.*, hlm. 226.

sedang produksi karet komersial dalam jumlah besar baru mulai dengan sungguh-sungguh tahun 1906, setelah proyek-proyek percobaan itu menunjukkan cocoknya tanah dan iklim Sumatra Timur untuk tanaman karet. Karet adalah juru selamat bagi banyak *onderneming* tembakau dan kopi yang bangkrut di tanah-tanah liparitik Sumatra Timur.⁶⁷ Keberhasilan di Sumatra Timur ini membuat pemerintah Keresidenan Aceh mencoba menarik modal swasta Barat untuk mengembangkan usahanya ke Aceh.

Aceh Timur sebenarnya telah mulai dibuka untuk modal swasta Barat sejak 1898, saat Pemerintah Hindia Belanda secara resmi membuka Tamiang untuk perusahaan-perusahaan Swasta Barat. Beberapa perusahaan perkebunan tembakau dari Deli memperluas usahanya ke Tamiang. Pada waktu yang sama, perusahaan pertambangan minyak bumi, *De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indie*, yang sebelumnya melakukan eksploitasi minyak di Telaga Said, Langkat, mulai melakukan pencarian minyak ke Tamiang. Berdasarkan perjanjian dengan kepala-kepala di Tamiang, mereka memperoleh dua konsesi pencarian minyak di

⁶⁷ Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant; Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1978), hlm. 75.

Simpang Kanan dan Simpang Kiri.⁶⁸ Kedua usaha ini mengalami kegagalan dan ditutup pada tahun 1901. Perusahaan tembakau dihentikan karena tanah yang digunakan di Tamiang ternyata tidak cocok untuk tanaman tembakau. Demikian juga dengan perusahaan pertambangan yang terpaksa harus menghentikan usahanya karena cadangan minyak tidak menguntungkan untuk dieksploitasi.⁶⁹

Kegagalan ini berdampak pada kurang baiknya citra wilayah Aceh Timur bagi para investor selama beberapa tahun kemudian. Mereka menganggap bahwa Aceh Timur merupakan daerah yang tidak cocok untuk usaha perkebunan dan pertambangan, dan tidak mau berspekulasi dan mengalami kerugian seperti pendahulu mereka. Hal ini terbukti setelah kegagalan ini tidak ada satupun perusahaan Swasta Barat yang tertarik untuk menanam modalnya ke Aceh Timur sampai tahun 1907.

Untuk menarik kembali minat pemilik modal swasta, Pemerintah Hindia Belanda mengambil inisiatif membuka perkebunan karet di Langsa pada tahun 1907, dengan konsesi

⁶⁸ Wilayah Simpang Kiri dan Simpang Kanan saat ini dimasukkan dalam administrasi *Onderafdeeling* Tamiang.

⁶⁹ M. Gade Ismail, *op. cit.* hlm. 143. Lihat juga *Koloniaal Verslag*, Laporan Tahun 1900.

seluas 5.000 HA.⁷⁰ Perkebunan ini dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Karet Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernements-Caoutchouconderneming*). Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan Aceh Timur tidak cocok untuk usaha perkebunan, dan menarik kembali minat kalangan Swasta Barat untuk menanam kembali modal mereka di Aceh Timur, khususnya dalam sektor perkebunan.⁷¹

Pembukaan Aceh secara keseluruhan bagi masuknya modal Swasta Barat telah menimbulkan perbedaan pendapat para ahli. Beberapa penulis berpendapat bahwa latar belakang pembukaan itu hanya sebagai alat pasifikasi.⁷² Sementara itu, M. Gade Ismail berpendapat bahwa latar belakang pembukaan itu bukan hanya sebagai alat pasifikasi, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda. Kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lainnya.⁷³

⁷⁰ Saat ini yang menjadi Gubernur Aceh adalah Kolonel G.C.E. van Daalen, dan dialah orang yang sangat berperan dalam pembukaan perkebunan karet Pemerintah di Langsa. J. Langhout, *Vijftig Jaren Economische Staatkunde in Atjeh* (Den Haag: W.P. van Stockum & Zoon, 1923), hlm. 90 – 91.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Pendapat ini dikemukakan oleh J. Jongejans, Colijn, dan Teukoe Mohsin. M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 143 – 144.

⁷³ *Ibid.*

Istilah pasifikasi bererti penaklukan. Sebenarnya, sejak tahun 1877 seluruh *uleebalang* di Aceh Timur telah mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Akan tetapi, pejabat Pemerintah Hindia Belanda di Aceh, mulai dari Van Heutsz, Van Daalen, dan H.N.A. Swart berpendapat bahwa pengakuan kekuasaan Hindia Belanda oleh para *uleebalang* saja belumlah cukup untuk mengatakan Aceh telah ditundukkan. Dengan demikian, pengertian pasifikasi tidaklah hanya pada tingkat pengakuan kekuasaan Hindia Belanda, tetapi perlu diusahakan satu tahap lagi oleh Pemerintah Hindia Belanda agar penduduk mau bekerjasama dan tidak melakukan perlawanan. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki perekonomian rakyat yang telah hancur karena perang yang lama, sebagaimana pernah diusulkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1892. Meskipun tidak berpengaruh langsung, masuknya perusahaan-perusahaan swasta Barat juga diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal dan tersedianya pasar untuk penjualan produksi penduduk.⁷⁴

Selain tujuan pasifikasi, kepentingan ekonomi pembukaan Aceh Timur dapat dilihat dari motif pembukaan perkebunan karet pemerintah di Langsa. Keinginan membuka perkebunan karet ini berdasarkan usul dari Direktur Pertanian pada Departemen Pertanian pada tahun 1905 setelah dia mengunjungi perkebunan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 146-149.

karet (*Havea Brazilianensis*) di Selangor, Malaysia. Setelah kembali, dia mengusulkan agar tanaman serupa juga ditanam di Sumatera pada daerah yang berhadapan dengan Selangor di sebelah Selat Malaka. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan iklim yang sama. Setelah dilakukan penelitian terbukti daerah Langsa dan sekitarnya sangat cocok untuk perkebunan karet.

Dengan pertimbangan bahwa keuntungan besar akan diperoleh apabila perkebunan itu dikelola langsung oleh perusahaan pemerintah, maka perkebunan karet di Langsa berada langsung dalam pengelolaan perusahaan pemerintah Hindia Belanda. Keuntungan besar dimungkinkan oleh empat faktor. *Pertama*, tanah yang dipakai tidak perlu membayar retribusi karena dipakai pemerintah sendiri. *Kedua*, tanah yang paling cocok untuk tanaman karet dapat dipilih terlebih dahulu secara leluasa. Berdasarkan laporan, perluasan areal perkebunan karet Pemerintah tidak hanya dilakukan pada lahan yang belum digarap, tetapi juga pada wilayah yang sudah menjadi perkampungan penduduk.⁷⁵ *Ketiga*, modal yang dipakai untuk

⁷⁵ Kampung Alue Itam, Kenegerian Langsa yang sebelum tahun 1828 masih merupakan perkampungan penduduk, berdasarkan laporan tahun 1828, kampung tersebut sudah tidak ada lagi, tanah-tanahnya telah menjadi kebun karet Pemerintah di Langsa yang diserahkan oleh perkebunan Sungai Lueng. Seri Informasi Aceh Tahun VI No. 1, *Laporan politik Gubernemen Aceh*

usaha perkebunan tidak terikat dengan bunga pinjaman. *Terakhir*, perusahaan yang dikelola pemerintah itu dapat mempergunakan berbagai fasilitas pemerintah.⁷⁶

Usaha Pemerintah untuk mendatangkan kembali modal Swasta Barat dan meningkatkan iklim penanaman karet di Aceh Timur mengalami sukses besar dengan meningkat pesatnya permintaan konsesi untuk perkebunan tersebut di wilayah ini.⁷⁷ Menurut M. Gade Ismail⁷⁸, terdapat empat faktor yang menyebabkan pemilik modal swasta masuk kembali ke Aceh Timur, yaitu: pertama, letak daerah ini berbatasan langsung dengan Sumatera Timur, sehingga perusahaan-perusahaan perkebunan yang sebelumnya berinvestasi di Sumatera Timur dengan mudah dapat meluaskan usahanya ke Aceh Timur⁷⁹;

dan Daerah Takluknya Selama Pertengahan Pertama Tahun 1928, Alih Bahasa : Aboe Bakar (Banda Aceh : PDIA, 1982), hlm. 34.

⁷⁶ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 145.

⁷⁷ C. Lulofs, "Een Kijkje te Langsar en op de Gouvernement Rubber-Onderneming Aldaar", dalam *TBB* no. 47, 1914, hlm.232-238.

⁷⁸ M. Gade Ismail, *loc. cit.*

⁷⁹ J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh: Vroeger en Nu*. (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hlm. 156. Ada beberapa perusahaan *onderneming* karet yang areal usahanya meliputi wilayah Sumatra Timur dan Aceh Timur, yaitu: Handelsvereniging "Amsterdam", Rubber Cultuur Maatschapij Amsterdam, Soengei Lipoet Cultuur Maatschapij, Sumatra Rubber Cultuur Maatschapij Serbadjadi, dan Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan yang

kedua, jumlah tanah yang cukup tersedia dan cocok untuk tanaman karet dan kelapa sawit; ketiga, keadaan keamanan yang sudah cukup terjamin untuk penanaman modal; dan terakhir, yang juga cukup penting adalah cukup tersedianya sarana transportasi.

Perkebunan karet Swasta Barat di Aceh Timur pertama dirintis oleh seorang warga negara Belgia, A. Hallet⁸⁰. Ia memperoleh konsesi di Sungai Liput, *Onderafdeeling* Tamiang, dari pemiliknya terdahulu, De Grient Dreux. A. Hallet dengan perusahaan perkebunannya *Societe Financiere de Caoutchouc* mulai melakukan penanaman karet pada konsesi itu pada tahun 1908. Setahun kemudian seorang warga negara Belanda, bekas asisten kebun pada perusahaan perkebunan tembakau, De Arendsburg, mengikuti jejak De Grient Dreux menanam karet

namanya sama di kedua wilayah dengan hanya sedikit perbedaan pada nama wilayah tempat onderneming itu berada, yaitu: *Algemeene Cultuur Maatschapij*, *Deli Maatschapij*, *Rubber Cultuur Maatschapij*, *Soc. Anonyme, Sumatra Ltd.*, dan *Sumatra Rubber Maatschapij*. Perusahaan-perusahaan ini juga diperkirakan berada dalam kepemilikan yang sama. *Opgave Omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verscheping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh, 1914-1921*.

⁸⁰ Andrian Hallet, setelah berpengalaman dalam pertanian tropis di Kongo-Belgia tahun 1905, mencoba usahanya ke Asia Tenggara dengan harapan di daerah ini tersedia buruh yang mencukupi untuk kebutuhan perkebunan, yang tidak ia dapatkan di Afrika Tengah. G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *op. cit.*, hlm. 119.

pada konsesinya di Kuala Simpang, *Onderafdeeling* Tamiang.⁸¹ Perusahaan yang dibuka pada September 1909 dengan nama Tamiang Rubber Estates tersebut memperoleh konsesi seluas 4.752 HA. Dalam tahun yang sama, satu perusahaan perkebunan lagi didirikan di *Onderafdeeling* Langsa dengan nama Rubber Maatschappij Sungai Raja. Perusahaan yang didirikan pada Oktober 1909 ini memperoleh lima konsesi, yaitu Kuala Simpang I, Gajah Meuntah, Ie Tabeu, Paya Seungko dan Krueng Peureulak, dengan luas seluruhnya 14.184 HA. Pada tahun 1910, jumlah perkebunan di Aceh Timur bertambah dua, dan setahun kemudian bertambah tiga lagi.

Sampai dengan tahun 1912, di seluruh Aceh Timur sudah terdapat 18 konsesi perkebunan karet,⁸² dan sembilan tahun kemudian (1921), sudah terdapat 21 perusahaan yang membuka perkebunan karet di Aceh Timur dengan keseluruhan *onderneming* 31 buah, konsesi 66.803 HA, penanaman 14.086 HA, dan produksi 1.372.187 Kg getah. Pada tahun 1929, di Aceh Timur

⁸¹ R. Boersma, *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*. (Utrecht: Boekhandel Cohen, 1925). Halaman 7. Lihat juga J. Langhout, *op. cit.*, hlm. 188. Lihat juga M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 162.

⁸² H.A.G.N. Swart, *Rubber Companies in the Netherlands East Indies*. (London: The Netherlands commission for the International Rubber Exhibition, 1911). Lihat juga G.J. van Eijbergen, "Atjeh up to Date", *TBB*, 46, 1915, hlm. 309-310. Lihat juga M. Gade Ismail, *op.cit.*, hlm. 163.

terdapat 30 perkebunan karet yang tanahnya diberikan hak guna pakai kepada maskapai-maskapai Belanda, Inggris, Belgia, dan satu maskapai Jepang.⁸³

Tabel 2.2 : Luas Konsesi, Luas Penanaman dan Produksi Karet Aceh Timur 1906-1939

Thn	Luas Konsesi* (HA)	Luas Penanaman (HA)	Produksi		Rata-rata Produksi Per-hektar (Kg)
			HA	Kg	
1906	5.000	-	-	-	-
1909	6.919	910	-	-	-
1910	-	1.983	-	-	-
1911	36.488	2.845	-	-	-
1912	-	4.346	-	-	-
1913	-	5.058	-	3.075	-
1914	45.566	5.665	-	146.466	-
1915	-	7.230	2.219	397.474	179,12
1916	-	8.033	2.735	399.070	145,91
1917	54.727	8.322	4.026	812.957	201,93
1918	-	9.656	5.113	756.363	147,93
1919	-	11.958	6.520	1.140.817	174,97
1920	66.803	12.566	6.574	1.258.046	191,37
1921	-	14.086	6.852	1.372.187	200,26
1923	62.252	12.711	8.470	2.923.349	345,14
1924	-	13.489	9.955	3.373.198	338,84
1925	-	15.306	9.844	3.293.367	334,56
1926	64.321	17.265	-	-	-
1927	-	22.202	14.161	5.406.441	381,78
1928	-	24.936	14.374	5.240.709	364,60
1929	60.750	26.701	14.390	5.817.362	404,26
1930	-	28.749	13.331	6.103.445	457,84
1931	-	-	-	6.192.694	-
1932	61.715	27.147	-	-	-
1935	67.252	27.038	-	7.412.431	-
1938	59.110	29.548	-	-	-
1939	-	-	-	15.634.596	-

Keterangan: * Konsesi diberikan untuk *onderneming* karet dan sawit.

⁸³ J. J. van de Velde, *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949*, terj. Pustaka Azet. (Jakarta: Pustaka Azet, 1987), hlm. 20.

Sumber: *Opgave Omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verscheping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh, 1914-1921. Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultures (Rubber, Koffie, Klappers, Thee en Olipalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli, 1923-1930*. Lihat juga M. Gade Ismail, 1991, hlm. 256-257.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Perang Dunia I (1914-1917) dan Resesi Ekonomi Dunia awal tahun 1930-an tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur. Baik dilihat dari konsesi yang diberikan, maupun dari segi produksi getah yang dihasilkan, kedua peristiwa besar yang menghantam perkebunan di tempat lain di Hindia Belanda ini tidak berpengaruh secara signifikan bagi Aceh Timur. Malahan sebaliknya, berdasarkan angka-angka di atas menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan luas konsesi maupun produksi getah. Selain itu, Produktivitas per hektar juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Fakta di atas membuktikan bahwa perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur berjalan sangat cepat. Hanya empat tahun setelah pembukaan perkebunan pemerintah di Langsa, sudah terdapat sembilan perusahaan perkebunan karet di Aceh Timur, satu milik pemerintah dan selebihnya milik swasta. Dengan gencarnya pembukaan perkebunan swasta, juga

membuktikan bahwa Aceh Timur sangat menarik bagi investasi, khususnya dalam perkebunan karet.

Kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur tidak terlepas juga dari perkembangan harga karet dunia yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Harga karet dunia mengalami lonjakan yang luar biasa pada tahun-tahun 1909-1912.⁸⁴ Kenaikan harga karet ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat di negara-negara industri Eropa-Amerika terutama industri listrik, otomobil, dan sepeda yang membutuhkan semakin banyak karet. Meningkatnya penggunaan transportasi mobil menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap bahan baku karet, dan pada gilirannya berpengaruh pada naiknya harga karet dunia secara konstan. Jumlah kepemilikan mobil di Amerika Serikat meningkat dari 8.000 tahun 1900 menjadi 458.000 tahun 1910 dan mencapai 4 juta dalam tujuh tahun ke depan.⁸⁵ Tingginya harga karet saat itu membuat para investor berlomba-lomba mengadu keuntungan dalam sektor perkebunan karet, termasuk di Aceh Timur.

⁸⁴ Harga Karet di bursa London pada tahun-tahun 1909-1912 mencapai rata-rata f. 8 – f. 9 perlembar. William J. O'Malley, *op. cit.*, hlm. 261.

⁸⁵ Bambang Purwanto, *op. cit.*, hlm. 105. G. C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *op. cit.*, hal. 30. Lihat juga M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 162.

Sampai dengan tahun 1930, sebagian besar *onderneming* karet yang ada di Aceh beroperasi di Aceh Timur, hanya lima *onderneming* di luar Aceh Timur, yaitu: 2 di Meulaboh (Aceh Barat), 1 di Lhokseumawe dan 1 di Lhok Sukon (Aceh Utara), dan 1 di Singkel (Aceh Selatan). Semua *onderneming* yang ada di Aceh Timur beroperasi di *onderafdeeling* Langsa dan Tamiang. Malahan *onderneming* yang cukup jauh, di Simpang Kiri dan Simpang Kanan, membuka kantor posnya di Kuala Simpang (Tamiang).⁸⁶ Dari jenis usaha yang dijalankan, sebagian besar *onderneming* di Aceh berkecimpung dalam usaha penanaman karet, dan sebagian besar pula berada dibawah payung A.V.R.O.S.

Tabel 2.3 : Jenis Usaha Onderneming-onderneming di Aceh, 1929-1938

Jenis Usaha dan Organisasi	Jumlah Onderneming					
	1929	1930	1931	1932	1937	1938
Karet	29	30	27	23	24	25
Tembakau	2	1	1	1	-	-
Teh	1	1	1	-	-	-
Kopi	8	6	2	5	7	7
Kelapa Sawit	3	3	3	3	2	4
Kelapa	1	-	-	-	-	-
Serat	2	2	1	1	1	1
Tanaman Campuran	11	15	14	13	11	10
Damar dan Terpentin	-	-	-	1	1	1
Pertambangan	1	-	-	1	2	2
Penebangan Hutan	1	2	-	-	-	-
Lain-lain	5	3	4	3	2	2
Jumlah	64	63	53	52	50	52
Anggota A.V.R.O.S.	36	36	31	30	40	37

⁸⁶ *Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultures (Rubber, Koffie, Klapper, Thee & Olipalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli*, tahun 1930.

Anggota L.T.V.	-	-	-	-	-	2
----------------	---	---	---	---	---	---

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1929-1938.

Dalam perkembangannya, pergantian Maskapai merupakan hal yang lazim bagi *onderneming-onderneming* di Aceh Timur. Pengambilalihan dan *merger* sering terjadi disamping munculnya *onderneming-onderneming* baru. Dari segi luas penanaman, *onderneming-onderneming* yang beroperasi di Aceh Timur dapat dikategorikan sebagai *onderneming* kecil dan menengah dengan luas penanaman di bawah 1.000 H.A., hanya beberapa *onderneming* saja yang melebihi 1.000 H.A. Pada tahun 1930, dari 29 *onderneming* yang ada baru delapan *onderneming* yang luas penanamannya lebih dari 1.000 HA. (Lihat Lampiran 3)

BAB III

BURUH DALAM KOMUNITAS PERKEBUNAN KARET DI ACEH TIMUR

Perkembangan perkebunan karet yang cenderung terus meningkat di Aceh Timur menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan akan pekerja, baik kelompok manajerial kulit putih maupun buruh migran. Kedua kelompok ini nantinya membentuk suatu komunitas baru di Aceh Timur, yaitu komunitas perkebunan yang terpisah dengan masyarakat setempat (*enclave*).

A. Kehadiran Golongan Manajerial Kulit Putih

Di Hindia Belanda, golongan kulit putih yang membentuk diri mereka sebagai kelompok kecil manajerial dalam bisnis dan pemerintahan sangat beragam dalam kedudukan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri dan militer, dan hanya sebagian kecil saja yang menggeluti bidang bisnis dan pekerja profesional. Sebagian darinya menjadi klas pekerja administrasi, khususnya di perkebunan atau di pabrik sebagai teknisi atau asisten administrasi.¹ Meskipun dari segi kuantitas golongan kulit putih sangat kecil, namun dalam komunitas perkebunan mereka merupakan klas penguasa.

¹ Virginia Thomson, *Labor Problems in Southeast Asia*. (New Haven: Yale University Press, 1947), hlm. 117.

Dari segi kebangsaan, golongan kulit putih dalam komunitas perkebunan merupakan representasi internasional sebagaimana digambarkan oleh Szekely-Lulofs² di Deli. Meskipun didominasi oleh orang Belanda, banyak bangsa lain yang bekerja di sana seperti beberapa orang Amerika, beberapa orang Jerman, seorang Rusia, seorang Polandia, seorang Hungaria dan seorang Swiss. Keadaan yang tidak jauh beda juga terjadi di Aceh Timur. Menurut keterangan J. J. Van de Velde, seorang administratur perkebunan karet di Aceh Timur yang ditempatkan di perkebunan Simpang Kiri berkebangsaan Jerman.³ Laporan yang lain juga menyebutkan bahwa seorang asisten pada perkebunan Medang Ara juga berkebangsaan Jerman.⁴

Kelompok kulit putih ini tidak lahir di Aceh Timur. Hampir semua dari mereka datang langsung dari negara mereka dalam usia muda sekitar dua puluh tahunan. Mereka datang dengan tujuan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu cepat. Dengan beberapa kekecualian, pada umumnya golongan Eropa

² M. H. Szekely-Lulofs, *Berpacu Nasib di Kebun Karet*. (Jakarta: Grafity Press, 1985), hlm. 55. Lihat juga Lily Clerkx dan Wim F. Wertheim, *Living in Deli; Its Society as Imaged in Colonial Fiction*. (Amsterdam: VU University Press, 1991), hlm. 11.

³ J. J. van de Velde, *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949*. terj. Redaksi Pustaka Azet. (Jakarta: Pustaka Azet, 1987), hlm. 13.

⁴ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun V, No. 1, *Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1939*, Alih Bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : PDIA, 1981), hlm. 14.

memulai karirnya sebagai Asisten (*Sinkeh*), suatu jabatan yang sangat rendah bagi golongan kulit putih dalam birokrasi perkebunan. Secara bertahap karir mereka akan terus menanjak menjadi Manajer sampai Top-Manajer (*Laukeh*).⁵

Diferensiasi status sosial yang sangat tajam yang hampir seluruhnya ditentukan oleh posisi ekonomi masing-masing terjadi di kalangan golongan Eropa ini. Diferensiasi ini terjadi hampir dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkungan kerja maupun di luar. Secara sosial, asisten⁶ tidak dapat dimasukkan dalam satu klas sosial dengan golongan Eropa lainya, karena antara asisten dengan manajer terdapat jurang yang sangat jauh.⁷ Para asisten muda berada di bawah asisten senior dengan masa kerja 6 tahun lebih, sedangkan semua asisten berada di bawah pengawas (*Opzichter*) dan kepala pengawas (*Hoofd Opzichter*).

⁵ Lily Clerkx dan Wim F. Wertheim, *loc. cit.* Lihat juga Ladislao Szekely, *Tropic Fever; The Advantures of a Planter in Sumatra*, translated by Marion Saunders. (Singapore : Oxford University Press, 1985), hlm. 10 dan 50.

⁶ Asisten merupakan jabatan yang paling rendah bagi golongan kulit putih di perkebunan.

⁷ Lily Clerkx dan Wim F. Wertheim *ibid.*

Pimpinan umum ada ditangan *Administrateur*, suatu jabatan puncak dalam karir di perkebunan.⁸

Komunitas Eropa merupakan “kantong” di lingkungan pemukiman perkebunan. Homogenitas penduduknya dijaga ketat, dan dibuat demarkasi dengan golongan non-Eropa dalam komunikasi sosialnya. Pergaulannya terjadi intra-komunitas dan intra-golongan Eropa di kota. Baik dalam mencari hiburan dan bentuk-bentuk rekreasi lainnya, kaum Eropa berkumpul di *societeit* atau disingkat *soos*, antara lain untuk minum-minum, dansa-dansi, main kartu, bilyar, dan lain sebagainya⁹. Sebagai lapisan atas mereka memandang rendah golongan pribumi dan kontak terbatas pada hubungan kerja. Dari *lay-out* daerah pemukiman perkebunan terlihat menonjol kontras antara daerah kediaman bangsa Eropa dengan perkampungan kaum pribumi dan golongan non-Eropa lainnya, baik dari jenis bangunan, arsitekturnya, formatnya, kemudahannya, dan lain sebagainya, kesemuanya menampilkan bahwa penghuni berstatus tinggi di situ.¹⁰

⁸ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: Aditya Medya, 1991), hlm. 145.

⁹ L. Lulofs, *op. cit.*, hlm. 83.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo *op. cit.*, hlm. 149-150.

Dari aspek jenis kelamin, golongan kulit putih di perkebunan merupakan eksklusif pria. Hal ini berkaitan dengan adanya larangan membawa istri, khususnya bagi asisten yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan. Larangan itu dibuat agar mereka dapat bekerja penuh pada perkebunan tanpa tersita waktu untuk keluarga dan juga mengalami kesulitan keuangan. Meskipun larangan ini akhirnya dicabut, banyak asisten yang lebih memilih tidak membawa istri ke perkebunan. Administratur pun yang tidak terkena larangan tersebut banyak juga yang tidak membawa istri. Mereka biasanya mengambil seorang selir (*Nyai*) dari wanita pribumi untuk hidup bersama.¹¹ Wanita ini biasanya akan ikut dengan setia kemanapun tuannya dipindahkan, seperti *nyai* Administratur perkebunan di Simpang kiri, yang dilaporkan oleh J. J. Van de Velde, yang telah 18 tahun ikut tuannya di berbagai perkebunan. Dia tidak mau terikat perkawinan dengan tuannya, karena menurutnya akan mendatangkan berbagai masalah. Dia tidak mau ikut ke Eropa kalau suaminya pulang kelak. Baginya, pensiun yang akan diterima dari tuannya akan cukup untuk melanjutkan sisa kehidupannya.¹²

Berdasarkan sensus tahun 1920, komunitas kulit putih yang tinggal di Aceh secara keseluruhan berjumlah 2.538 jiwa,

¹¹ Lily Clerkx dan Wim F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 31.

¹² J. J. Van de Velde, *op. cit.*, hlm. 14.

sedangkan yang menetap di Aceh Timur sebanyak 624 jiwa. Secara persentase golongan Eropa di Aceh Timur lebih tinggi dibandingkan dengan di Aceh secara keseluruhan, yaitu 0,532 % dari jumlah penduduk berbanding 0,345 % dari jumlah penduduk. Tingginya persentase golongan Eropa yang tinggal di Aceh Timur tidak terlepas dari kedudukan wilayah ini sebagai daerah pusat perkebunan di Aceh saat itu. Pesatnya perkembangan perkebunan karet di daerah ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap staf manajerial kulit putih (lihat Tabel 3.6).

Di perkebunan, golongan Eropa bekerja sebagai administratur, pengawas dan asisten. Dari tahun ke tahun, jumlah mereka terus terjadi peningkatan yang cukup signifikan sesuai dengan perkembangan perkebunan.

Tabel 3.1 : Jumlah Komunitas Kulit Putih dan Komunitas lain di Aceh dan Daerah Takluknya Tahun 1920

Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
Eropa	1.594	944	2.538	0,345
Pribumi	368.035	350.409	718.444	97,566
Timur Jauh	11.360	4.023	15.383	2,089
Jumlah	380.989	355.376	736.365	100

Sumber: *Statistisch Jaaroverzicht voor Nederlandsch-Indie*: Statistisch Kantoor van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Jaargang 1922-1923, hlm. 8.

Tabel 3.2 : Jumlah Komunitas Kulit Putih dan Komunitas lain di Aceh Timur Tahun 1920

Onderaf-deeling	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
Idi	Eropa	13	16	29	0,080
	Pribumi	19.970	15.454	35.424	96,988
	Cina	629	308	937	2,565
	Asia Lain	113	21	134	0,367
	Jumlah	20.725	15.799	36.524	100
Langsa	Eropa	238	154	392	1,247
	Pribumi	16.690	11.576	28.266	89,896
	Cina	2.027	511	2.538	8,072
	Asia Lain	164	83	147	0,785
	Jumlah	19.119	12.324	31.443	100
Tamiang	Eropa	123	44	167	0,575
	Pribumi	16.320	10.621	26.941	92,721
	Cina	1.584	281	1.865	6,419
	Asia Lain	71	12	83	0,286
	Jumlah	18.098	10.958	29.056	100
Serbojadi	Eropa	11	7	18	0,534
	Pribumi	1.715	1.604	3.319	98,428
	Cina	27	8	35	1,038
	Asia Lain	-	-	-	-
	Jumlah	1.753	1.619	3.372	100
Gayo Lues	Eropa	14	4	18	0,107
	Pribumi	8.255	8.597	16.822	99,680
	Cina	35	-	35	0,207
	Asia Lain	1	-	1	0,006
	Jumlah	8.275	8.601	16.876	100
Jumlah Seluruh Aceh Timur	Eropa	399	225	624	0,532
	Pribumi	62.920	47.852	110.772	94,458
	Cina	4.302	1.108	5.410	4,613
	Asia Lain	349	116	465	0,396
	Jumlah	67.970	49.301	117.271	100

Sumber: *Nederladsch-Indie Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling, Deel II; Tabellen*, Batavia: Drukkerijen Ruygrok & Co., 1922, hlm. 200-201.

Sebagian besar komunitas Eropa yang ada di Aceh Timur menetap di *Onderafdeeling* Langsa dan Tamiang, masing-masing 238 jiwa (1,247 %) dan 123 jiwa (0,575 %). Kedua wilayah ini

merupakan daerah konsentrasi perkebunan di Aceh Timur.¹³ Perkembangan ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur.

B. Buruh dan Sistem Perekrutannya

Berdasarkan *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* istilah kuli (buruh) diartikan: “Kuli (dalam bahasa Inggris *Cooli*), kata yang mungkin berasal dari Tamil yang mempunyai arti “sewa”, adalah pekerja yang didatangkan dari daerah yang jumlah penduduknya padat dan miskin, dan setelah tiba ditempat-tempat pekerjaannya dikenakan seperangkat aturan tertentu, yang tujuannya untuk mengikat mereka terhadap pekerjaannya. Kuli terutama menunjukkan pekerja yang bekerja di perkebunan, pertambangan dan industri.¹⁴ Golongan pekerja (buruh/kuli) di Hindia Belanda selalu dibagi dalam tiga kategori, yaitu: pertama, kelompok terbanyak adalah pekerja tani, baik pada lahannya sendiri maupun buruh tani; kedua, pekerja pada perusahaan perkebunan dan di bidang transportasi; dan terakhir, pekerja pada

¹³ Komunitas kulit putih, khususnya Belanda di Aceh Timur tergabung dalam organisasi *Vaderladsche Club* (V. C.) Cabang Langsa. Seri Informasi Aceh VI, van Aken, *Laporan Politik Polisionil Aceh Tahun 1933*, Alih Bahasa : Aboe Bakar (Banda Aceh : PDIA, 1977), hlm. 7.

¹⁴ J. Paulus, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede Druk, Tweede Deel. (Leiden : E. J. Brill, 1917), hlm. 360-366.

sektor industri. Berdasarkan sensus tahun 1930 dapat dilihat bahwa 34,4 % dari 60.731.025 jiwa penduduk Hindia Belanda sebagai golongan pekerja; sekitar 60 % darinya bekerja dalam sektor pertanian; 10 % dalam sektor industri; 5 % dalam sektor perdagangan; dan selebihnya adalah pekerja rampai-rampai (campuran).¹⁵

Pekerja dalam sektor perkebunan pada awal abad ke-20, khususnya di Luar Jawa, sebagian besar terserap dalam perkebunan karet yang berkembang pesat. Persediaan tenaga kerja sangat mutlak diperlukan untuk suksesnya pengembangan perkebunan karet, karena karet merupakan budidaya yang lebih padat karya di antara aneka jenis tanaman keras. Kebutuhan buruh di perkebunan pada tahun-tahun permulaannya membengkak karena penggunaannya yang tidak efisien, sebagai akibat dari teknologi primitif yang diterapkan, dan sebagian lagi karena perlu disediakan tenaga buruh cadangan untuk mengganti pengurangan tenaga kerja akibat menjangkitnya penyakit malaria. Jika di pulau Jawa perkebunan dapat saja mengerahkan buruh dari kalangan penduduk setempat yang melarat, tetapi di

¹⁵ Virginia Thomson, *op. cit.*, hlm. 117.

Sumatera perlu didatangkan buruh dari luar, karena penduduk pribumi enggan bekerja di perkebunan.¹⁶

Sejak tahun 1905, saat perencanaan pembukaan perkebunan karet pemerintah di Langsa dirumuskan, persoalan tenaga kerja sudah diperkirakan. Gubernur Sipil dan Militer untuk Aceh saat itu, van Daalen, berkeinginan agar penduduk setempat dijadikan tenaga kerja pada perkebunan-perkebunan tersebut. Harapannya, penduduk memperoleh kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan perkebunan Barat. Dengan demikian, sikap anti terhadap Pemerintah Kolonial di kalangan penduduk akan hilang dan akan terbentuk sikap kooperatif.

Berbeda dengan tujuan menarik investor ke Aceh Timur yang sukses, keinginan Pemerintah untuk menjadikan perkebunan sebagai lapangan pekerjaan penduduk Aceh Timur tidak terealisasi.¹⁷ Menurut M. Gade Ismail¹⁸, kegagalan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, penduduk Aceh Timur

¹⁶ Colin Barlow dan John Drabble, "Pemerintah dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia, 1900-1940", dalam Anne Booth et al., *op. cit.*, hlm. 274.

¹⁷ C. Lulofs, "Een Kijkje te Langsar en op de Gouvernement Rubber-Onderneming Aldaar", dalam *TBB* no. 47, 1914, hlm.232-238.

¹⁸ M. Gade Ismail, "Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840 - 1942". (*Disertasi Doktor*, Universitas Leiden, 1991), hlm. 206.

relatif jarang, dan mereka mempunyai sumber pendapatan dari penanaman lada. Pendapatan dari menanam lada jauh lebih besar dibandingkan dengan upah menjadi buruh pada perkebunan. Saat harga lada turunpun penduduk Aceh Timur masih mempunyai penghasilan dari menanam tanaman padi, pinang, kelapa dan karet. Alasan kedua, mereka memandang rendah bekerja sebagai buruh kontrak.

Selain itu, perlu ditambahkan bahwa penduduk lokal tidak mau bekerja sebagai buruh di perkebunan, karena menurut penilaian mereka, pekerjaan pada perkebunan sangat berat. Mereka lebih memilih bekerja sebagai petani dan nelayan, karena pekerjaan ini dianggap lebih ringan dan memiliki kebebasan.¹⁹ Secara politik juga rakyat Aceh menolak bekerja pada perkebunan Barat, karena saat itu mereka masih sangat terpengaruh dengan semangat perang sabil melawan Belanda (kafir).²⁰ Akibatnya, semua yang berbau Barat dianggap haram, dan berkerja pada perkebunan Barat pun dianggap pekerjaan tidak terpuji yang harus ditolak dan dihindari.

¹⁹ John Anderson, *"Mission to the East Coast of Sumatera 1823"*. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1971), hlm. 15.

²⁰ Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 129.

Kurangnya buruh lokal bukanlah hanya satu-satunya alasan bagi pengusaha-pengusaha perkebunan Barat untuk bergantung pada kuli yang didatangkan dari Cina dan Jawa. Untuk Aceh, setelah perang khususnya, penduduk lokal memang tidak dipersiapkan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan Barat. Sangat sedikit usaha yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan Barat untuk merekrut buruh lokal. Mereka lebih memilih buruh migran dengan harapan lebih mudah dikontrol dari pengaruh lingkungan asalnya. Strategi ini juga tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan kuli Jawa dibanding kuli Cina. Meskipun kuli Jawa dianggap kurang tekun, tetapi mereka tidak cenderung untuk melawan¹⁵.

Pembukaan perkebunan karet di Aceh Timur bertepatan dengan beralihnya kecenderungan penggunaan buruh perusahaan-perusahaan perkebunan di luar Jawa dari buruh Cina ke Buruh Jawa. Menurut Jan Breman terdapat beberapa alasan terjadinya kecenderungan ini, yaitu: pertama, adanya larangan dari pemerintah Cina untuk merekrut warganya menjadi buruh akibat tekanan media massa nasionalnya yang melaporkan bahwa telah

¹⁵J. Thomas Lindblad, "The Outer Island in the 19 th Century: Contest for Periphery", dalam Howard Dick et al., *The Emergence of A National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800 – 2000*. (New South Wales and Honolulu: ALLEN & UNWIN and University of Hawa'I Press, 2002), hlm. 103 – 104.

terjadi kondisi yang sangat buruk terhadap buruh Cina, baik dalam proses perekrutan maupun kondisi kerja di perkebunan, khususnya di Sumatra Timur.

Kedua, keengganan terhadap buruh Jawa di kalangan pekebun mulai hilang seiring dengan mulai diusahakan jenis tanaman baru (karet) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teknik pengelolaan tanaman karet dianggap cocok untuk buruh dari Jawa, karena tidak serumit tanaman tembakau. Ketiga, perubahan metode penggajian buruh dengan pengenalan tanaman baru juga berpengaruh terhadap kecenderungan terhadap buruh Jawa. Berbeda dengan kuli Cina pada perkebunan tembakau yang dibayar secara harian, buruh Jawa tidak pernah merespons terhadap insentif gaji yang lebih tinggi bila lebih giat bekerja. Keempat, berbeda dengan buruh Cina, buruh Jawa kurang suka mengeluh dan membangkang terhadap instruksi manajerial; dan terakhir, biaya kontrak buruh Jawa jauh lebih rendah dibandingkan dengan buruh Cina, terutama biaya transportasi.²¹

²¹ Jan Breman, *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in South East Asia*. (London: Oxford University Press, 1989), hlm. 59-63. Lihat juga Vincent J. H. Houbben, "Before Departure; Coolie Labour Recruitment in Java, 1900-1942", dalam Vincent J. H. Houbben, et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999), hlm. 25.

Jawa menjadi sumber buruh yang sangat potensial di Hindia Belanda karena pulau ini mengalami kelebihan penduduk sejak 1880-an. Penduduk Jawa tumbuh dari 9,3 juta pada tahun 1850 menjadi 28 juta pada tahun 1900, dan melonjak drastis menjadi 60, 7 juta pada tahun 1930. ²² Pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi setelah 1880 disebabkan oleh tingkat kematian yang lebih rendah dan tingkat kelahiran yang agak lebih rendah. Tingkat kematian yang lebih rendah disebabkan oleh sejumlah perkembangan struktural jangka panjang (vaksinasi, komunikasi yang lebih baik, “deurbanisasi”).²³

Banyaknya buruh asal Jawa yang bekerja ke luar Jawa sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi di Jawa itu sendiri sebagai dampak negatif dari Sistem Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa (1830 – 1870) yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah menyebabkan semakin menyempitnya tanah pertanian di Jawa, dan telah menyebabkan terjadinya kemiskinan sebagian besar masyarakatnya. Untuk mengatasi himpitan hidup ini, banyak penduduk melakukan migrasi ke

²² Peter Boomgaard dan Goosen dalam Vincent J. H. Houbben, *ibid.*

²³ Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Hindia Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Terj. Koesalah Soebagyo dkk. (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Djambatan, 2004), hlm. 341 .

Sumatera dengan menandatangani kontrak menjadi buruh di perkebunan-perkebunan²⁰.

Daerah tempat asal buruh di Jawa adalah daerah-daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, mereka didata pada pos-pos registrasi yang tersebar diseluruh Jawa. Setelah didata mereka diberangkatkan ke Luar Jawa melalui tiga pelabuhan embarkasi, yaitu Batavia, Semarang dan Surabaya.

Tabel 3.3 : Jumlah Buruh yang Terdaftar pada Pos-pos Registrasi (1 Juni 1909 – 1 Oktober 1910)

Pos Registrasi	Jumlah Kuli yang Terdaftar
Batavia	1.800 (1909) 5.508 (1910)
Surabaya	3.569
Kutoarjo	2.935
Semarang	2.654
Purworejo	2.462
Bandung	2.382
Surakarta	2.222
Malang	1.852
Pare	1.144
Karanganyar	1.072
Yogyakarta	1.036 (1910)
Madiun	982
Blitar	720
Jombang	653
Magelang	561

Sumber : Vincent J. H. Houbben, (1999), hlm. 42.

²⁰ Clifford Geertz, *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1963), hlm. 35.

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah buruh yang terdaftar pada tahun 1909 dan 1910 paling banyak pada pos registrasi Batavia dan Surabaya, dan yang paling sedikit pada pos registrasi di kota-kota lain di Jawa Timur. Meskipun jumlah buruh yang terdaftar pada pos-pos registrasi di kota-kota di Jawa Tengah tidak sebanyak di Batavia dan Surabaya, tetapi dari segi jumlah keseluruhan, jumlah buruh dari Jawa Tengah jauh lebih besar dari daerah lain di Pulau Jawa.

Tabel 3.4 : Jumlah Buruh yang Diberangkatkan melalui Tiga Embarkasi di Pulau Jawa (April 1916-April 1917)

Jenis Kelamin dan Keluarga	Pelabuhan-pelabuhan Embarkasi dan Jumlah Buruh yang Diberangkatkan			
	Batavia	Semarang	Surabaya	Jumlah
Pria	7.415	3.828	5.786	17.029
Wanita	4.021	2.702	6.032	12.755
Keluarga	347	655	158	1.160

Sumber : Vincent J. H. Houbben, (1999), hlm. 42.

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah buruh yang berangkat secara individu lebih banyak dibandingkan dengan keluarga. Bila dilihat dari sudut jenis kelamin secara keseluruhan, buruh laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan buruh perempuan (17.029 orang berbanding 12.755 orang). Menariknya, pada pelabuhan embarkasi Surabaya, jumlah buruh perempuan malah lebih banyak dibandingkan dengan buruh laki-laki (6.032 orang berbanding 5.786 orang).

Oleh karena perkebunan di Aceh Timur merupakan perluasan perkebunan dari Sumatera Timur, maka sistem perekrutan dan peraturan buruh pada kedua wilayah ini tidak terpisahkan. Dalam proses perekrutan buruh, Pemerintah Hindia Belanda ikut berperan aktif. Mereka secara resmi mengirim utusan ke wilayah yang sangat miskin di Cina Selatan dan mendirikan pos-pos perekrutan kuli di pelabuhan-pelabuhan strategis di Jawa Tengah. Dukungan Pemerintah ini telah menjadi suatu kontroversi pada awal abad ke-20.¹⁷

Pencarian dan pengapalan buruh kontrak untuk luar Jawa dan koloni asing merupakan suatu persoalan yang secara resmi diatur dengan Peraturan Kuli yang termuat dalam Lembaran Negara no. 123 tahun 1909 dan tambahannya. Peraturan ini merupakan perbaruan Peraturan Kuli tahun 1880. Penerapan peraturan ini merupakan usaha Pemerintah yang mengarah pada langkah *Etis*, untuk melindungi buruh pribumi dari perlakuan yang tidak manusiawi pada perkebunan-perkebunan khususnya di luar Jawa. Meskipun demikian, keadaan tetap masih tidak berubah sama sekali. Buruh pribumi sama sekali tidak memahami hal tersebut. Mereka datang dan pergi seperti ternak, tanpa menyadari untuk apa mereka pergi. Bagi mereka ada imbalan

¹⁷ Thomas Lindblad, *loc.cit.*

kontrak yang sementara ini telah ditunjukkan dengan menerima pakaian dan beberapa gulden sebagai uang muka, karenanya dan sering juga karena alasan khusus sehubungan dengan masa lalunya yang tidak baik mereka meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan demikian penerapan secara jelas aturan-aturan kontrak oleh Pemerintah tetap menjadi keinginan semu.²⁴

Pencarian buruh merupakan jenis kebrutalan, sebagian besar berlangsung kasar, dan caranya juga tidak sopan dengan tujuan utamanya adalah mencari uang. Para pencari buruh memandang orang Jawa sebagai barang dagangan seperti kopra. Para pemilik modal memberi uang muka pada pencari buruh ratusan sampai ribuan gulden untuk berkeliling selama setahun. Apabila berhasil mendapatkan buruh seperti yang diinginkan, mereka kembali menerima kembali uang muka yang lebih besar. Oleh karena buruh yang baik tidak banyak, para pencari menuntut harga yang semakin lama semakin tinggi. Jika sebelum abad ke-20, harga seorang buruh antara f 20 – f 25, awal abad ini harganya bisa naik menjadi f. 65. Bagi seorang pencari buruh yang gesit bisa memperoleh pendapatan f. 1.000 – f. 1.500 per bulan. Sebaliknya, buruh Jawa hanya menerima f. 5 dan ditambah satu baju dan celana. Mereka tidak menerima uang

²⁴ R. A. Ezerman, "Een en Ander Omtrent de Koeliwerving", *IG* no. II, 1912, hlm. 1261-1262.

muka atas upah yang diberikan untuk diserahkan kepada orang tua atau keluarganya.

Di Batavia, yang penduduknya relatif jarang, banyak pencari buruh yang harus berkeliaran untuk mendapatkan buruh. Di Jawa Tengah, Yogyakarta, Purworejo, dan Kutoarjo, daerah-daerah yang penduduknya sangat padat, pencarian sangat mudah dilakukan. Oleh karena pencarian berkembang, barak-barak buruh semakin penuh terisi. Pada barak-barak di kota-kota besar, calon buruh dihibur dengan wayang, perjudian, adu ayam, dan lain-lain hiburan, supaya mereka bersedia tinggal dan tidak melarikan diri.²⁵

Untuk mendapatkan tenaga buruh dalam jumlah banyak, berbagai metode perekrutan dilakukan. Selain diperoleh dengan cara penyaringan atau pengwerekkan, banyak calon buruh didapat dengan cara penipuan. Mereka ada yang diajak untuk pergi menonton hiburan, tetapi ternyata dimasukkan ke kapal, dan ada juga yang dijanjikan kerja di Johor, ternyata dibawa ke Sumatera.¹⁹

Para pencari buruh biasanya mendatangi desa-desa pedalaman yang miskin dengan penduduknya yang lugu dan

²⁵ "De Koeli Werving," dalam *IG* no. II, 1913, hlm. 1237.

¹⁹ Lukitaningsih, "Buruh Perempuan di Perkebunan Karet Sumatera Timur 1900 – 1940". (*Tesis S-2*, UGM, 2003), hlm. 16.

polos, sebagaimana digambarkan oleh Szekely-Lulofs²⁶. Mereka mempengaruhi pemuda-pemuda desa dengan janji-janji yang sangat muluk yang tidak mungkin didapati apabila mereka tetap bertahan di desanya. Daerah baru yang akan dituju digambarkan sebagai suatu surga dengan kehidupan yang serba bebas dan mudah. Di sana, uang sangat mudah didapat dan harga emas sangat murah, banyak perempuan muda yang cantik, dan di daerah baru tersebut orang dapat bermain judi dengan bebas tanpa harus takut ditangkap polisi. Pemuda-pemuda desa yang lugu tersebut dibawa kepada agen-agen pencari kerja untuk menandatangani kontrak, dan kemudian diangkut dengan kapal-kapal KPM ke Sumatera.

Metode ini terbukti sangat ampuh untuk mendapatkan buruh yang muda dan kuat untuk perkebunan. Selain itu, tidak jarang juga pengusaha perkebunan melibatkan para kepala desa di Jawa dalam mencari tenaga kerja. Melalui perantaraan pemerintahan desa ini tidak jarang seluruh penduduk desa terikat kontrak ke perkebunan di pantai timur Sumatra, seperti yang pernah terjadi di Mojokerto, Besuki, dan Pasuruan.²⁷

²⁶ M.H. Szekely-Lulofs, *Kuli*. (Jakarta: Grafity Press, 1985), hlm. 9 - 12.

²⁷ *Jaarenslag A.V.R.O.S.*, 1915, hlm. 11.

Proses pencarian buruh Jawa untuk perkebunan-perkebunan Luar Jawa yang dilakukan oleh agen-agen profesional berlangsung sampai tahun 1909. Dengan dikeluarkannya regulasi baru pada tahun tersebut, pengusaha perkebunan didorong untuk menunjuk langsung agen pencariannya sendiri. *Deli Planters' Vereeniging* menjadi perintis sistem ini dengan menempatkan agensinya di Semarang, dan kemudian dengan cepat diikuti oleh perkebunan-perkebunan lainnya. Meskipun demikian, persaingan serius dengan agen-agen profesional masih terus berlangsung sampai dengan tahun 1929, saat disetujuinya dua prinsip organisasi perkebunan yaitu: mengambil alih kantor-kantor agen profesional yang masih ada, dan bersedia untuk menyalurkan buruh ke perkebunan-perkebunan lain walaupun bukan anggota organisasinya.²⁸

Tahun 1910, tahap pertama didatangkan buruh dari Jawa ke Aceh Timur berjumlah 858 orang. Kemudian, pada permulaan Perang Dunia I, jumlah mereka telah mencapai 7.869 orang.²⁹ Data ini menunjukkan bahwa jumlah buruh yang didatangkan ke Aceh Timur dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hampir mendekati kelipatan sepuluh. Meningkatnya kebutuhan buruh imigran ini disebabkan oleh

²⁸ Virginia Thomson, *op. cit.*, hlm. 134-135.

²⁹ M. Gade Ismail, *op.cit.*, hlm. 207.

cepatnya berkembang perkebunan di wilayah ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tiga tahun kemudian (1917), jumlah buruh imigran yang bekerja di Aceh meningkat tajam menjadi lebih dari 14.000 orang, dan satu dekade kemudian, jumlah buruh yang didatangkan ke Aceh hanya terjadi peningkatan sedikit, yaitu menjadi 20.000 orang pada tahun 1927. Jumlah buruh di Aceh mencapai puncaknya pada tahun 1927, yang hampir mendekati 30.000 orang, dan setelah itu mengalami penurunan seiring dengan terjadinya depresi ekonomi awal tahun 1930-an. (Lihat Lampiran 5).

Sebagian besar buruh di Aceh bekerja pada perusahaan-perusahaan perkebunan karet³⁰ dan perusahaan-perusahaan pengoboran minyak³¹ yang sebagian besar berada di Aceh Timur. Berbeda dengan pada perusahaan pertambangan yang lebih cenderung pada buruh bebas, perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh lebih cenderung mempekerjakan buruh kontrak walaupun telah keluar kebijakan penghapusan *Poenale Sanctie*. Pada tahun 1920-an, satu dari lima atau enam buruh

³⁰ Hampir tidak ada Orang Aceh yang bekerja pada perkebunan Barat, walaupun ada hanya terbatas pada tahap pembersihan lahan dengan sistem kerja borongan. M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm 206.

³¹ Pada sumur minyak BPM Rantau Panjang tahun 1916, semua buruhnya yang berjumlah 76 orang adalah orang Jawa, sedangkan pada sumur *Zuid Perlak*, dari 63 orang buruhnya, 12 di antaranya Orang Aceh sebagai buruh lepas. *Ibid.* hlm. 158.

adalah buruh bebas, tetapi pada tahun 1930-an masih satu dari empat atau lima buruh di Aceh adalah buruh kontrak. Rasio jenis kelamin di antara buruh di Aceh juga sangat jauh, tetapi semakin berimbang seiring semakin banyak buruh yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan pada akhir 1920-an dan 1930-an. Saat ini sudah terdapat tiga pria untuk satu wanita dalam komunitas buruh di daerah ini.³² Menurut Soekarno, meningkatnya jumlah perempuan yang masuk ke pasaran kerja sebagai buah dari gerakan emansipasi merupakan proyeksi kaum kapitalis. Gerakan ini telah menciptakan pasokan buruh yang lebih besar dan akhirnya membantu menekan upah tetap rendah.³³

Berdasarkan data dalam Lampiran 5, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah buruh yang bekerja pada perkebunan karet di Aceh Timur secara keseluruhan terjadi suatu dinamika yang sangat berarti. Dari tahun 1910-1919 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, mendekati kelipatan sepuluh. Peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan perkebunan karet yang sangat pesat di wilayah ini dalam periode tersebut. Dari tahun 1920-1923 terjadi tren sebaliknya; jumlah buruh terjadi penurunan yang juga

³² J. Thomas Linblad, "New Destinations; Conditions of Coolie Labour Outside East Sumatra, 1910-1938", dalam Vincent J. H. Houben et al., *op. cit.* hlm 89.

³³ Colin Brown, *Soekarno; Perempuan dan Pergerakan Nasional*, Terjemahan: Tubagus Arie Rukmantara. (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 26.

sangat signifikan, lebih dua kali lipat. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari depresi ekonomi di negara-negara industri dunia Barat, yang berdampak pada jatuhnya harga karet menjadi 7 *penny* per lb.³⁴ Dari tahun 1924-1929 jumlah buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur terjadi peningkatan lagi yang sangat signifikan; tahun 1929 merupakan angka tertinggi dalam sejarah perkebunan karet di Aceh Timur masa kolonial yang mencapai 29.940 orang buruh. Peningkatan ini tidak terlepas dari melonjaknya harga karet di pasaran dunia sebagai dampak dari peraturan pembatasan ekspor karet yang dikenal dengan Rencana Stevenson (*Stevenson Scheme*).³⁵ Dari tahun 1930-1935 sekali lagi terjadi penurunan jumlah buruh yang cukup signifikan sebagai eksese dari resesi ekonomi dunia yang menghantam hampir semua sektor ekonomi, terutama sektor perkebunan. Mulai tahun 1936, seiring dengan mulai pulihnya ekonomi dunia, jumlah buruh yang bekerja pada perkebunan karet di Aceh Timur mulai mengalami peningkatan kembali. Dari fakta ini terlihat jelas bahwa kondisi buruh perkebunan karet di Aceh timur sangat tergantung pada

³⁴ Collin Barlow dan John Drabble, *op. cit.*, hlm. 266.

³⁵ Rencana Stevensen dalam upaya meningkatkan harga karet, dengan pembatasan ekspor, tidak memperoleh persetujuan dari pihak Belanda, berlaku bagi Malaya dan daerah-daerah Kerajaan Inggris lain berlaku selama enam tahun, sampai Oktober 1928. Pelaksanaan rencana ini telah mendorong terdongkraknya harga karet rata-rata 3 shilling per lb. *Ibid.*

fluktuasi harga karet di pasaran Eropa-Amerika Utara. Ini membuktikan bahwa ekonomi daerah Aceh Timur sangat tergantung pada kondisi ekonomi negara-negara asal pemilik modal perkebunan karet.

Dari aspek komposisi antara buruh kontrak dan buruh bebas dalam perkebunan di Aceh Timur, Lampiran 5 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan buruh kontrak lebih dominan dibandingkan dengan buruh bebas; rata-rata 64,08 % berbanding 35,92 %. Bila dilihat dari sudut perkembangannya, dominasi buruh kontrak dalam perkebunan karet di Aceh Timur terjadi sampai tahun 1931, rata-rata 78,84 % dari buruh bebas (rata-rata 22,16 %). Setelah itu terjadi kebalikannya, buruh bebas lebih dominan, rata-rata 76,00 % dibanding buruh kontrak, rata-rata 24,00%. Perubahan komposisi dari buruh kontrak ke buruh bebas terjadi sebagai dampak dari implimentasi *koelieordonnantie* 1931 yang lebih memprioritaskan buruh bebas untuk bekerja dalam sektor perkebunan.

Dari aspek *gender*, Lampiran 5 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, baik kategori kontrak maupun bebas, buruh laki-laki lebih dominan dari buruh perempuan, yaitu 74,91% berbanding 25,9% untuk buruh kontrak, dan 84,87 % berbanding

15,13 % untuk buruh bebas.³⁶ Bila dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, persentase buruh perempuan terjadi suatu dinamika yang sangat bervariasi, dan tren antara buruh kontrak perempuan dan buruh bebas perempuan terjadi perbedaan yang sangat kontras. Periode sampai tahun 1920, rata-rata buruh kontrak perempuan adalah 32,4 % dari buruh laki-laki, sedangkan buruh bebas perempuan hanya 4,5 %; periode 1921-1929, rata-rata buruh kontrak perempuan menurun menjadi 22,17 % dari buruh laki-laki, sementara buruh bebas perempuan meningkat menjadi 17 %; periode 1930-1932, terjadi peningkatan yang cukup signifikan buruh kontrak perempuan menjadi angka tertinggi rata-rata 49,33 %, malah tahun 1932 melampaui jumlah buruh laki-laki (63 %), sebaliknya buruh bebas perempuan terjadi penurunan yang sangat tajam mencapai angka terendah rata-rata 12 %; dan terakhir periode 1933-1938, rata-rata buruh kontrak perempuan kembali menurun menjadi 12 %, sementara buruh bebas perempuan sebaliknya mengalami peningkatan yang tajam mencapai angka tertinggi rata-rata 19 % dari buruh laki-laki.

³⁶ Kecenderungan pengusaha *onderneming* karet pada buruh laki-laki tidak terlepas dari perspektif pengusaha perkebunan Eropa terhadap perempuan. Menurut mereka, perempuan adalah jenis kelamin yang lemah "*weaker vessel*", dan tempat mereka di rumah untuk mengurus keluarga. Elsbeth Locher-Scholten, *Women and the Colonial State*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000), hlm. 50.

Dari fakta tersebut dapat ditafsirkan bahwa buruh kontrak perempuan pada *onderneming* karet di Aceh Timur dalam masa-masa awal terjadinya depresi ekonomi dunia tahun 1930-an, saat banyak buruh laki-laki diberhentikan dari *onderneming* untuk penghematan, buruh perempuan dengan tetap mendapat upah dari *onderneming* telah menjadi penyelamat keluarga mereka. Dari perspektif kapitalis, mempertahankan banyak buruh kontrak wanita pada periode awal krisis ekonomi ini dapat dipahami karena upah buruh wanita jauh lebih rendah dari buruh laki-laki, sebagaimana dicurigai oleh Soekarno sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu.

Dari aspek suku dan kebangsaan, sebagian besar buruh yang bekerja pada perkebunan karet di Aceh Timur, baik buruh kontrak maupun buruh bebas, adalah suku Jawa³⁷. Jumlah rata-rata buruh kontrak Jawa antara tahun 1912-1938 adalah 98,3 % dari jumlah buruh; Cina³⁸ 1,73 %; Keling 0,21 %; dan suku-suku pribumi lainnya 1,33 5 dari jumlah buruh. Buruh bebas juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu buruh Jawa 86,8

³⁷ J.J. van de Velde, op. cit. hlm. 13 dan 21.

³⁸ Buruh Cina sebagian besar bekerja pada perkebunan tembakau, perusahaan penebangan hutan, dan pekerjaan-pekerjaan pemerintah seperti pembuatan jalan. *Ibid.* hlm. 33. Lihat juga *Verslag van Arbeidsinspectie* jilid V Tahun 1917 dan 1918, hlm. 43.

%; Cina 4,82 %; Keling 0,63 %; dan suku-suku pribumi lainnya³⁹ 9,03 % dari jumlah buruh (Lihat lampiran 6). Di Aceh Timur, buruh perkebunan karet terutama dari Jawa tersebar di tiga *onderafdeeling*, yaitu: Idi, Langsa dan Tamiang.

Tabel 3.5 : Persebaran Orang Jawa dalam tiga *Onderafdeeling* di Aceh Timur Berdaraskan Sensus Tahun 1930

Onderafdeeling	Jml Penduduk	Orang Jawa	Persentase
Idi	61.504	13.679	22,2
Langsa	56.333	18.218	32,3
Tamiang	63.866	21.574	33,2
Jumlah	181.703	53.471	29,4

Sumber : *Volkstelling 1930*, Jilid IV : *Inheemsche Bevolking van Sumatra*, Batavia: Landsdrukkerij, 1935, hlm. 39 dan 120. Lihat juga M. Gade Ismail, (1991), hlm. 209.

Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah orang Jawa yang menetap di Aceh Timur pada tahun 1930 sekitar sepertiga jumlah penduduk. Jumlah terbanyak komunitas Jawa menetap di *Onderafdeling* Tamiang (33,2 %), disusul Langsa (32,3 %), dan yang paling sedikit di *Onderafdeling* Idi (hanya 22,2 %) dari jumlah penduduk. Persebaran ini tidak terlepas dari persebaran *onderneming* di ketiga *onderafdeeling* itu sendiri. Jumlah *onderneming* yang paling banyak terdapat di *Onderafdeeling* Tamiang, dan yang paling sedikit di *Onderafdeeling* Idi.

³⁹ Suku-suku tersebut adalah Nias, Padang, Batak dan Dayak. Suku Nias dan Padang sebagian besar pada *onderneming-onderneming* di Sabang dan Simeuleu. *Verslag van Arbeidsinspectie*, *ibid*.

C. Sistem Kerja dan Kontrol Buruh

Isolasi geografi unit perkebunan menyebabkan terbatasnya interaksi komunitasnya dengan masyarakat dari luar batas perkebunan. Akibatnya, komunitas yang hidup dan berkerja di lingkungan perkebunan membentuk suatu komunitas tersendiri yang eksklusif, yang sepenuhnya didasari pada sistem perkebunan itu sendiri. Selain sebagai suatu sistem produksi, perkebunan juga merupakan suatu komunitas. Oleh karena komunitas ini didasari pada unit produksi, struktur sosial dan pola hubungan interpersonal juga mengikuti dan mencerminkan tipe organisasi ekonomi dari sistem produksi. Dengan demikian, komunitas perkebunan merupakan sistem stratifikasi sosial yang sangat keras, yang pada masa kolonial golongan pemilik modal Eropa dan Manajer berada pada puncak, golongan skill campuran berada di tengah, dan golongan buruh non-skill berada paling bawah. Di sini juga tidak terjadinya mobilitas dalam sistem stratifikasi dan semua aspek hidup perkebunan mencerminkan struktur sosial.⁴⁰

Struktur organisasi perkebunan tidak memungkinkan kelompok buruh dapat meningkatkan status sosialnya dalam komunitas perkebunan. Kedudukan resmi yang dijabat masing-

⁴⁰ George L. Beckford, *Persistent Poverty; Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*. (New York: Oxford University Press, 1972), hlm. 53-54.

masing pihak dalam struktur organisasi perkebunan telah memisahkan mereka dengan tegas. Bagi buruh yang penting adalah apakah ia secara fisik mampu melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.⁴¹

Sama dengan di Amerika Selatan pada abad ke-19 dan di Afrika Timur masa post-perbudakan, sistem perkebunan di Asia Tenggara dalam bentuk yang sama atau berbeda, semua berkenaan dengan fakta bahwa industri perkebunan telah mereproduksi kondisi untuk eksistensinya, tidak jarang dengan mentransformasikan suatu kelompok masyarakat tertentu ke dalam suatu proletariat penuh tetapi yang lebih umum dengan membiarkan atau memaksa beberapa tingkat *subsistence* dari buruh miskin.

Kunci keberhasilan perkebunan di Pantai Timur Sumatra adalah buruh yang murah, secara sosial dapat diatur, dan secara politik tidak mempunyai kekuatan. Berbagai bentuk ukuran tekanan dan kewajiban digunakan untuk menjamin suksesnya ekspansi industri perkebunan di Pantai Timur Sumatra. Koersi dan persuasi tidak berkembang secara linier tetapi tetap ada tahap demi tahap (kuat atau lemah) dalam momentum yang berbeda dari krisis ekonomi dan represi politik. Deli agraria agitasi dan sejarah

⁴¹ Sjafrin Sairin, "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatera Utara" dalam *Prisma* No. XX, April 1991, hlm. 28-29.

buruh dengan jelas memperlihatkan bahwa ekspansi kapitalis tidak hanya tergantung pada akses industri dan kontrol terhadap tanah dan buruh tetapi, sebagai suatu akibat wajar yang mendasar, dengan jaminan bahwa para buruhnya hanya memiliki akses pada lahan perkebunan dan hanya sedikit akses pada hal lain. Hal ini hampir spesifik dengan ekspansi kapitalis pada variasi Sumatra Utara.⁴²

Dalam nada yang sama Jan Breman⁴³ juga menandakan bahwa pengawasan tenaga kerja yang ketat merupakan bagian dan paket sistem ekonomi sebagaimana diperkenalkan dan dipertahankan oleh perkebunan-perkebunan Barat di Deli. Tulisan-tulisan mutakhir mengenai Kalimantan, Sumatra bagian tenggara, Ambon dan Aceh juga memberi bukti terhadap pola yang hampir mendekati monopoli yang pernah dimiliki oleh Deli dalam historiografi luar Jawa.⁴⁴

Struktur hukum usaha di Luar Jawa muncul pada tahun 1880, dengan penerapan Peraturan Kuli (*Koelieordonnantie*), suatu

⁴² Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870 – 1979*. (London: Yale University Press, 1985), hlm. 1-8.

⁴³ Jan Breman, *loc. cit.*

⁴⁴ J. Thomas Linblad, "Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa, 1910-1940", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 336.

peraturan hubungan kerja dari sudut pandang kelangkaan pekerja yang sangat terasa di Luar Jawa yang dipandang perlu. Perlindungan berlebihan dari kepentingan pengusaha menandai kondisi usaha yang membuka Luar Jawa bagi lalu-lintas ekonomi dunia.⁴⁵ *Koelieordonnantie* yang diumumkan berturut-turut pada tahun 1880, 1884 dan 1893 ini menjadi dasar hukum perburuhan di Indonesia, yang memberi jaminan kepada pengusaha perkebunan suatu kekuasaan legal yang sangat besar dalam hubungannya dengan buruh imigran.⁴⁶ Dalam *Koelieordonnantie* ini di antaranya disebutkan bahwa tidak boleh ada hubungan buruh dan majikan tanpa sebuah perjanjian tertulis. Kontrak pertama bagi seorang buruh berlaku selama 3 tahun dan masa perpanjangannya setiap delapan belas bulan. Di dalam kontrak tertera nama, hakekat pekerjaan, dan pekerjaan didasarkan pada 10 jam kerja sehari. Peraturan ini juga termasuk apa yang disebut *Poenale Santie*, yang memberi kebebasan kepada pengusaha perkebunan mengajukan tuduhan kriminal dan menghukum buruh yang gagal memenuhi kewajiban kontraknya. Para buruh diwajibkan mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan

⁴⁵ J. Thomas Linblad, *loc. cit.*, hlm. 1.

⁴⁶ Khusus untuk Aceh, *Koelieordonnantie* pertama kali dikeluarkan pada tahun 1916 yang dimuat dalam Peraturan Negara no. 334 tahun 1916.

kepadanya dan tidak boleh meninggalkannya tanpa izin tertulis dari mandor.⁴⁷

Untuk mengimplementasikan peraturan perburuhan ini dalam sistem kerja di perkebunan dibuat suatu sistem organisasi kerja. Dalam organisasi kerja di perkebunan yang amat pokok ialah peranan inti organisasi yang disebut sebagai regu (*ploeg*) dibawah pimpinan kepala regu (*ploeg baas*). Para buruh dikelompokkan dalam regu-regu yang masing-masing di bawah kendali seorang mandor. Mandor berperan tidak hanya sebagai pimpinan unit tetapi juga sebagai “perantara” ke pihak atas. Ia merupakan perpanjangan tangan dari staf manajerial kulit putih (Asisten dan Administratur).⁴⁸ Mandor harus mengawasi pekerjaan buruh kelompoknya dan meneruskan perintah Asisten dalam bahasa melayu kepada kuli yang tidak berbicara dalam bahasa itu.⁴⁹ Kedudukan Mandor ini merupakan kunci dan amat strategis. Mereka bertanggung jawab atas prestasi kerja para buruh. Seorang Mandor harus bertindak cepat dan keras terhadap buruh yang melanggar disiplin. Sebaliknya, bila dia lemah dan lambat bertindak, apalagi membuat kesalahan, dia akan mendapat

⁴⁷ Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 52.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op. cit.* hlm. 145-147.

⁴⁹ Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 84.

ganjaran dan dikembalikan ke status awalnya sebagai buruh. Posisi Mandur sebenarnya dilematis, saat jam kerja dia harus bertindak sebagai orang yang superior, namun di luar jam kerja dia harus hidup, berbaur dengan para buruhnya seperti satu keluarga dalam pondok yang sama.⁵⁰

Beberapa Mandor ada di bawah Mandor Kepala, sedang mereka kesemuanya diawasi oleh para Asisten dan Pengawas (*Opzichter*). Regu-regu merupakan unit kerja yang terdiri atas unsur-unsur etnis tertentu.⁵¹ Jadi dalam pekerjaannya buruh diawasi oleh Mandor dan Asisten perkebunan. Sedangkan Adiministratur hanya bertugas mengontrol keluar masuknya barang dan jasa. Para Asisten perkebunan yang mampu melampaui target produksi diberikan semacam bonus (*tantieme*).⁵² Hal ini sebagai insentif bagi Asisten untuk lebih giat bekerja. Sebaliknya bagi buruh hal ini berakibat tekanan terhadap mereka semakin keras.

Untuk lebih intensif mengawasi buruh-buruh kontrak, pengusaha perkebunan juga membentuk satuan polisi perkebunan yang disebut Centeng (*Veld Politie*). Tugas mereka

⁵⁰ J. Kleian, dalam Lily E. Clerkx dan Wim F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 71.

⁵¹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *loc cit.*

⁵² M. H. Szekey Lulofs, *op. cit.*, hlm. 99.

adalah menangani buruh yang melarikan diri. Apabila berhasil menangkap buruh kontrak yang melarikan diri mereka akan mendapat bonus f. 8.⁵³ Dengan sistem yang sangat rapi dan dengan pelaksanaannya yang sangat ketat ini, menyebabkan buruh tidak bisa mangkir dari kewajiban kerjanya. Setiap sudah menandatangani kontrak, buruh diharuskan mencurahkan seluruh tenaganya untuk perkebunan.

Tabel 3.6 : Perbandingan Jumlah Buruh dengan Staf Perkebunan di Aceh Tahun 1937-1939

No	Personel	Jumlah		
		1937	1938	1939
1	Administratur	40	41	42
2	Asisten dan Pengawas	78	100	116
3	Kepala Mandor dan Mandor	726	799	909
4	Buruh (Kontrak dan Bebas)	21.396	22.199	-

Sumber : Verslag van Arbeid Inspectie 1937-1939

Data di atas digunakan untuk menganalisis perbandingan personel perkebunan dan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah personel perkebunan karet di Aceh Timur mengalami peningkatan yang sangat berarti seiring dengan perkembangan perkebunan itu sendiri. Tabel ini juga menunjukkan perbandingan buruh dan personel perkebunan, yaitu: seorang Administratur untuk rata-

⁵³ Razif, "Pengasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan di Sumatra Timur; Tinjauan Historis, dalam *Prisma* No. 4 Tahun XX, April 1991, hlm. 43-44.

rata 2 orang Asisten, 19 Kepala Mandor dan Mandor, dan 537 kuli; seorang Asisten untuk rata-rata 8 Kepala Mandor dan Mandor, dan 247 kuli; dan seorang Mandor untuk rata-rata 28 kuli.

D. Beban Kerja Buruh

Secara umum, sesuai dengan peraturan dalam *koelieordonnantie*, jam kerja buruh setiap hari antara 10-12 jam, mulai dinihari sampai petang, disela oleh waktu istirahat selama 1-2 jam antara pukul 11.00-13.00. Ada dua jenis pekerjaan yang perlu dibedakan, yaitu: pertama, kerja lapangan, mulai dari penggarapan tanah untuk disiapkan bagi penanaman, pemeliharaan tanaman, dan penuaian. Kedua, kerja pabrik, gudang atau los. Untuk jenis pekerjaan terakhir biasanya dilakukan oleh buruh wanita.⁵⁴ Beban kerja dari kedua jenis pekerjaan ini tidak sama. Pekerjaan lapangan lebih berat dari kerja pabrik, biasanya dikerjakan oleh buruh laki-laki, dan membutuhkan banyak sekali buruh. Pada pekerjaan lapangan, tahap penggarapan lahan untuk disiapkan bagi penanaman adalah tahap kerja yang paling berat karena sebagian besar konsesi tanah yang diberikan untuk *onderneming* khususnya karet di Luar Jawa adalah lahan kosong yang belum pernah diusahakan

⁵⁴ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *loc cit.*

oleh penduduk. Keadaan ini juga terjadi dalam perkembangan *onderneming* karet di Aceh Timur.

Bila dibandingkan dengan Sumatra Timur, perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur terbilang terlambat. Secara umum, perkebunan-perkebunan karet di Aceh Timur baru memulai usahanya setelah tahun 1910. Sampai tahun 1915, masih banyak perkebunan yang baru membuka usahanya, malahan masih ada perkebunan yang baru mulai usahanya pada 1929. Selain berkembang perkebunan baru, perkebunan yang sudah ada juga terus melakukan ekstensifikasi usahanya sebagaimana tergambar dalam Lampiran 3. Ini berarti bahwa beban kerja kuli membersihkan lahan dari semak belukar untuk proses penanaman bibit karet masih terus berlangsung sampai dengan saat itu.

Beban kerja berat pembukaan lahan pada perkebunan yang sebagian besar letaknya jauh dari jalur transportasi utama ditambah lagi dengan kerja pengangkutan dari dan ke perkebunan yang jaraknya beberapa kilometer. Beban ini ditambah lagi dengan beban psikologi karena teralienasi dari peradaban, jauh dari kehidupan penduduk. Keadaan ini sesuai dengan yang digambarkan oleh J.J. van de Velde saat dia berkunjung ke Simpang Kiri pada tanggal 28 Maret 1929, berikut ini, "...Turun dari perahu kami naik lorrie, yang didorong oleh kuli-kuli dari

Jawa; perjalanan lewat rimba ini, 8 km jauhnya dengan tujuan rumah administratur, seorang Jerman yang ramah.

... Orang-rang di Holland mungkin merasa tercengang kalau melihat bahwa hanya dengan beberapa ratus kuli yang ditempatkan di sini dapat mengubah hutan rimba menjadi perkebunan kelapa sawit, kopi atau karet. Di sini sekarang baru tampak permulaannya; pohon-pohon ditebang dan dibakar. ... Daerah ini, yang dihuni beribu-ribu ekor kera, dan jarang didatangi manusia, ...".⁵⁵

Selain variabel yang telah disebutkan, beban kerja buruh perkebunan karet di Aceh Timur dapat juga dilihat dari perbandingan jumlah buruh dengan luas areal usaha perkebunan. Dari variabel ini akan terlihat beban yang tidak sama antara satu waktu ke waktu lainnya. Beban dapat ditafsirkan sangat berat saat terjadi pengurangan jumlah buruh akibat resesi ekonomi namun perkebunan tetap mempertahankan jumlah produksinya. Ini berarti beban kerja yang dikerjakan oleh kuli yang diberhentikan dibebankan kepada kuli yang masih dipertahankan.

Data jumlah buruh Aceh digunakan untuk menafsirkan keadaan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa rata-rata beban kerja buruh perkebunan karet di Aceh Timur per-hektar adalah 1,09 buruh. Beban kerja yang paling berat terjadi pada periode 1932-1935, dengan beban rata-rata per-hektar 0,545 buruh; diikuti periode 1923-1925, dengan

⁵⁵ J. J. van de Velde, *op. cit.* hlm. 13-14.

beban kerja rata-rata per-hektar 0,68 buruh; sedangkan beban kerja paling ringan terjadi pada periode 1911-1919, dengan rata-rata beban kerja per-hektar 1,53 buruh.

Tabel 3.7 : Perbandingan jumlah buruh dengan luas usaha perkebunan karet di Aceh Timur 1910-1938

Tahun	Jumlah Buruh*	Luas Penanaman (H.A.)	Beban Kerja Buruh Per-hektar
1911	4.660	2.845	1,64
1913	7.852	5.059	1,55
1915	7.409	7.230	1,02
1917	14.581	8.320	1,75
1919	20.407	11.958	1,71
1921	16.267	14.086	1,15
1923	9.146	12.711	0,72
1925	10.243	15.306	0,67
1927	20.818	22.202	0,94
1929	29.940	26.701	1,12
1931	19.778	-	-
1932	14.820	27.147	0,55
1935	14.640	27.038	0,54
1938	22.199	29.548	0,75

Keterangan * : adalah jumlah buruh Aceh secara keseluruhan

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie 1911-1939.

Perbedaan beban kerja ini dapat dijelaskan dengan menghubungkan fakta ini dengan perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur. Periode 1931 sampai 1935, saat resesi ekonomi dunia mencapai puncaknya di Asia Tenggara, dalam usaha penghematan untuk tetap bertahan perkebunan-perkebunan karet di Aceh Timur memberhentikan buruhnya secara besar-besaran namun tidak mengurangi kegiatan usahanya, malah sebaliknya terus meningkat. Fakta ini berarti

bahwa dari sudut beban kerja, buruh perkebunan karet di Aceh Timur periode ini merupakan masa yang paling berat. Periode kerja berat yang lain adalah periode awal tahun 1920-an sebagai dampak dari depresi ekonomi di negara-negara industri di dunia Barat pasca perang. Walaupun produktivitas meningkat, namun luas penanaman juga dilakukan pengurangan seiring dengan pengurangan tenaga buruh. Ini berarti bahwa beban kerja kuli sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode awal tahun 1930-an.

Beban kerja berat juga dirasakan oleh buruh yang bekerja pada perkebunan karet yang sudah berproduksi. Meskipun dalam *koelieordonnantie*, sebagaimana telah disebutkan di belakang, jam kerja kuli adalah 12 jam, namun pada kenyataannya lebih. Buruh bekerja di perkebunan minimal 13 jam sehari, dengan rincian: menyadap getah 5 jam, mengurus pohon karet muda 3 jam, dan mengolah lateks menjadi karet mentah 5 jam.⁵⁶

E. Pengaruh Perkebunan terhadap Perubahan Ruang Ekonomi di Aceh Timur

Pesatnya perkembangan perkebunan karet, yang mendatangkan buruh migran dalam jumlah besar ke Aceh Timur,

⁵⁶ M. Blankenstein, *De Poenale Sanctie in Practijk*. (Amsterdam: Nunijs & Van Ditmar Uitg Mij., 1929), hlm. 10. Lihat juga Razif, *loc. cit.*

telah menyebabkan terjadinya perubahan ruang ekonomi di daerah ini. Pembukaan perkebunan karet yang diikuti dengan pembuatan jalan-jalan untuk transportasi perkebunan telah berdampak pada pembukaan isolasi banyak daerah di Aceh Timur. Dengan pembukaan jalan, akses ke luar masyarakat yang berdomisili dekat dengan perkebunan menjadi lebih lancar, dan barang-barang baru seperti sepeda dan mesin jahit mulai masuk. Pembukaan perkebunan juga telah menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat sekeliling bertambah maju. Mereka datang menjual hasil pertanian mereka, sebagaimana kesan J.J. van de Velde di perkebunan Simpang Kiri, yaitu: "...penduduk kampung sepanjang sungai datang untuk menjual pisang dan barang-barang lain, ...jalan-jalan dibuat, barang-barang baru seperti sepeda dan mesin jahit berdatangan..."⁵⁷

Banyaknya kedatangan buruh migran telah berakibat semakin majunya pasar-pasar tradisional⁵⁸ dan mulai bermunculan pasar-pasar baru di sekeliling perkebunan. Berdasarkan laporan resmi pemerintah, pada tahun 1930 dan 1931 telah dilakukan eksploitasi pasar secara besar-besaran di dua *onderafdeeling* konsentrasi perkebunan karet, yaitu Langsa dan Tamiang. Di *Onderafdeeling* Langsa, pada tahun 1930 telah

⁵⁷ J. J. van de Velde, *op. cit.* hlm. 14.

⁵⁸ *Pewarta Deli*, 11 Juli 1917.

dibangun satu los ikan di Telaga Tujuh, dan tempat penjualan ikan dan daging di pasar Langsa dipeluas dan diperbaiki. Di *Onderafdeeling* Tamiang, pada tahun 1931 telah dibangun sebuah pasar baru di Sungai Liput, dibangun sebuah los untuk penjualan ikan untuk pasar Seruway, memperluas pasar Kuala Simpang dengan membangun los baru, dan diperluasnya pasar Upah.⁵⁹

Banyaknya kedatangan buruh migran juga telah berdampak pada munculnya kampung-kampung baru di sekitar perkebunan yang didiami oleh mantan buruh perkebunan. Sebenarnya, sejak kedatangannya ke Aceh Timur, beberapa buruh terutama buruh laki-laki secara individu setelah habis masa kontraknya tidak kembali lagi ke Jawa. Mereka memasuki kampung-kampung penduduk dan segera terserap ke dalam kehidupan penduduk setempat. Mereka mendapat bantuan dari kepala-kepala kampung untuk membangun rumah dan mendapatkan tanah garapan. Selain itu, selama dua tahun pertama mereka dibebaskan dari kerja rodi dan pungutan pajak.⁶⁰ Sebaliknya, buruh perempuan ditolak memasuki perkampungan penduduk

⁵⁹ ANRI, Film no. 11, W. Steinbuch, *Algemene Memorie van de Afdeeling Oostkust van Atjeh*, 30 Maret 1931.

⁶⁰ M. Gade Ismail *op. cit.*, hlm. 209-210.

karena dikhawatirkan berdampak negatif terhadap moral penduduk kampung.⁶¹

Depresi ekonomi tahun 1930-an ini juga berakibat semakin banyak bermunculan kampung-kampung baru di dekat perkebunan. Kampung-kampung baru yang dibangun oleh bekas buruh perkebunan ini sebenarnya sudah bermunculan sejak terjadinya penghapusan *poenale sanctie* tahun 1929. Penghapusan peraturan ini telah menyulitkan perusahaan perkebunan untuk merekrut tenaga kerja dari Jawa, seperti sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan merekrut buruh dari Jawa yang telah berada di Aceh Timur.

Beberapa perusahaan perkebunan memberi bantuan untuk membangun perkampungan kepada buruh-buruh yang telah habis masa kontraknya pada tanah-tanah yang berdekatan dengan perkebunan. Perusahaan perkebunan karet Pemerintah di Langsa, misalnya, telah membangun 100 unit rumah untuk bekas buruh mereka di Langsa Lama dan Sungai Lueng pada tahun 1930. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh pemilik perkebunan Bukit Panjang yang menyediakan sejumlah bantuan untuk membangun rumah-rumah untuk bekas buruh kontraknya.

⁶¹ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun VI No. 1, *Laporan politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Pertengahan Pertama Tahun 1928*, Alih Bahasa : Aboe Bakar, Banda Aceh : PDIA, 1982, hlm. 2 dan 34.

Pemukiman ini sering disebut “pemukiman pinggiran” (*randkolonisatie*).⁶² Di Langsa, kolonisasi ini didukung oleh Asisten Residen yang berinisiatif menyediakan satu lokasi tanah yang jauhnya sekitar 1 Km dari Langsa sebagai perkampungan buruh (*arbeiderskolonisatie*).⁶³

Selain itu, ditambah lagi dengan depresi ekonomi pada waktu yang hampir sama maka semakin banyak bermunculan kampung-kampung Jawa di dekat perusahaan-perusahaan swasta. Buruh-buruh yang diberhentikan dari pekerjaannya menggabungkan diri dengan bekas-bekas buruh yang telah berdiam pada kampung-kampung baru yang mereka bangun. Selain buruh dari Aceh Timur sendiri, banyak buruh yang diberhentikan dari perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur juga memasuki Aceh Timur.⁶⁴

Tabel 3.8 : Kampung-kampung yang Muncul di Sekitar Perkebunan-perkebunan Besar di Aceh Timur

No	Onderneming	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1	Paya Rambong	Paya Rambong	45 Keluarga
2	Arur Gading I	Merbo	100 „

⁶² M. Gade Ismail. *op. cit.*, hlm. 211.

⁶³ “Kolonisatie bij Langsa” dalam *IG*, II, Tahun 1929, hlm. 1245-1246.

⁶⁴ M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 213.

3	Alur Gading II	Kelirik	75	„
4	Timbang Langsa	Bakaran Batu	80	„
5	„	Alue Dua	50	„
6	Langsa Estate	Peutoe	100	„
7	Sungai Lueng	Alue Pineung	60	„
8	„	Simpang Wie	100	„
9	Bukit Panjang	Bukit Panjang	60	„
10	„	Alue Jamok	40	„
11	„	Matang Ara	200	„
12	Tanjong Semantok	Tualang Baru	80	„
13	Alur Itam	Sampoi Maih	150	„
14	Tualang Cut Estate	Medang Ara	60	„
15	„	Bukit Paya	75	„
Jumlah			1275	„

Sumber : M. Gade Ismail, 1991, Lampiran 14, hlm. 264.

Perkembangan perkebunan karet *onderneming* Swasta Barat di Aceh Timur, dan tingginya harga karet pada awal dan pertengahan-akhir tahun 1920-an telah menarik minat penduduk wilayah ini membudidayakan tanaman karet. Rakyat mulai menanam karet fikus dan *havea* pada lahan-lahan milik mereka.⁶⁵ Pembudidayaan karet rakyat ini tidak mendapat perhatian Pemerintah. Baru pada pertengahan tahun 1920-an, saat karet rakyat mulai banyak membanjiri pasar, pemerintah Hindia Belanda dan para pengusaha *onderneming* benar-benar mulai menaruh perhatian kepada karet rakyat. Perhatian resmi kepada karet rakyat selama tahun 1930-an mempunyai pengaruh

⁶⁵ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun III, no. 6, Alih Bahasa: Aboe Bakar. *Memori Umum Daerah Aceh oleh Gubernur H.N.A. Swart dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur A.H. Philips*, (Banda Aceh: PDIA, 1979), hlm. 37-38.

merugikan bagi para pengusaha perkebunan rakyat, karena setelah berdirinya Badan Rencana Pembatasan Karet Internasional (*International Rubber Restriction Scheme*), para petani karet rakyat menerima pelayanan yang kurang menguntungkan ketimbang apa yang diterima industri onderneming.⁶⁶

Pembatasan ini dan jatuhnya harga karet akibat dari depresi ekonomi awal tahun 1930-an telah menyebabkan tanaman karet rakyat yang baru beberapa tahun berproduksi, mulai ditelantarkan oleh pemiliknya. Harga jual karet yang tidak dapat menutupi biaya produksi berakibat pada berkurangnya penyadapan terhadap pohon-pohon karet, dan pemeliharaan kebun-kebun juga mulai diabaikan. Malahan banyak penduduk yang menebang pohon-pohon karet yang dianggap tidak berharga untuk dipergunakan menanam padi atau tanaman palawija. Saat itu, tanah-tanah yang ditanami fikus sudah dianggap sebagai hutan belantara.⁶⁷

Tabel 3.9 : Produksi Karet Rakyat Aceh Timur, 1925-1937 (dalam KG.)

Tahun	Idi	Langsa	Jumlah
1925	42.913	18.3550	226.463
1926	46.867	359.769	406.636
1927	57.469	432.581	490.050

⁶⁶ Karl J. Pelzer, *op. cit.* hlm. 75-76.

⁶⁷ PDIA, *loc. cit.*

1928	79.047	330.282	409.329
1929	60.671	423.162	483.833
1930	33.117	351.016	384.133
1931	27.985	272.125	300.110
1932	7.407	81.568	88.975
1933	12.550	334.721	347.271
1934	113.049	519.019	632.068
1935	47.976	36.306	84.242
1936	28.916	129.253	158.169
1937	91.704	243.798	335.502

Sumber : M. Gade Ismail (1991), Lampiran 11, hal. 261.

BAB IV

KESEJAHTERAAN BURUH PERKEBUNAN KARET DI ACEH TIMUR 1907 - 1939

Sebenarnya dalam *Koelieordonnantie* selain kewajiban, dalam kontrak juga tercantum hak-hak buruh, seperti bebas biaya transportasi, hak untuk memperoleh gaji secara reguler, mendapatkan fasilitas perumahan dan jaminan kesehatan. Oleh karena maksud utama peraturan itu untuk melindungi perkebunan untuk tetap mendapatkan tenaga kerja murah, maka hak-hak buruh dalam prakteknya selalu diabaikan. Gaji yang mereka terima sangat kecil, jauh di bawah standar upah, dan sering tidak mencukupi kebutuhan hidup. Keadaan perumahan juga sangat buruk, tidak memenuhi standar kesehatan. Jaminan kesehatan juga tidak jauh beda. Rumah sakit yang disediakan sangat tidak memadai, sehingga banyak sekali buruh yang meninggal akibat penyakit yang tidak terobati.¹

Dalam kondisi hidup yang serba berat, secara fisik para pekerja dieksploitasi secara maksimal, tingkat upah minimal berimplikasi pada taraf hidup yang amat rendah. Dalam keadaan itu orang cenderung menghibur diri dengan berjudi, menghisap candu, melacur, yang kesemuanya menjerumuskannya ke dalam

¹ M.H. Szekely-Lulofs, *Kuli*. (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 35.

ikatan-pinjaman, kemerosotan kesehatan dan kesejahteraan. Banyak mandor dan tandil memanfaatkan keadaan kuli itu dengan memberi pinjaman yang “mencekik”, menjual barang dengan harga yang lebih tinggi, atau dengan membayar secara angsuran. Banyak kuli yang terjebak ke dalam jerat pinjaman, hal mana dipandang menguntungkan perusahaan perkebunan, karena kuli-kuli itu akan lebih terikat pada pekerjaan di perkebunan.²

Bab ini mencoba mengeksplorasi ketiga variabel ini pada kasus *onderneming* karet di Aceh Timur, dan ditambah dengan variabel pendidikan anak. Selain itu, bagian ini juga mencoba melihat bagaimana pengaruh dari peristiwa di luar Aceh Timur terhadap kesejahteraan kuli, yaitu Perang Eropa dan Resesi Ekonomi Dunia.

A. Pendapatan (Upah)

Menurut Langveld, upah dan biaya hidup buruh sangat erat kaitannya dan kebijakan kolonial mempunyai implikasi yang sangat kuat terhadap tingkat upah buruh. Kebijakan upah perusahaan-perusahaan Barat di Luar Jawa periode 1920-an dan

² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian sosial Ekonomi*. (Yogyakarta: Aditya Medya, 1991), hlm. 151.

1930-an tergantung pada biaya hidup, kemakmuran umum dan intervensi dari Inspektorat tenaga Kerja.³

Upah para buruh perkebunan dibayar setiap 14 hari sekali, yang disebut “hari besar” pada tanggal satu dan lima belas atau tujuh belas tiap bulan, dan setelah itu libur satu hari untuk istirahat. Pada saat pembayaran upah buruh duduk berbaris di depan rumah Asisten Bagian Satu. Mereka dipanggil satu persatu untuk mengambil upahnya, dan tidak boleh protes mengenai jumlah yang mereka terima. Pada pembayaran akhir bulan selalu diadakan acara hiburan, seperti pertunjukan wayang kulit dan bahkan pesta judi. Selain itu pada malam itu banyak buruh yang menghabiskan uang mereka untuk main perempuan.⁴ Jadi tidak mengherankan pada umumnya buruh tidak bisa menyimpan uang mereka.

Penentuan besarnya jumlah upah buruh perkebunan di Sumatera Timur pada mulanya adalah atas dasar kesepakatan antara perusahaan perkebunan dan individu buruh. Ini tercermin dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dengan para buruh. Sebelum berdirinya

³ Ellen Leenarts, “Coolie Wage in Western Enterprises in the Outer Island, 1919-1938”, dalam Vincent J. H. Houben et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Island, c. 1900-1940*. Weisbaden: Harrassowitz Verlag, 1999), hlm. 131.

⁴ M.H. Szekely-Lulofs, *op. cit.*, hlm. 46-48.

persekutuan perusahaan perkebunan Sumatera Timur, *Algemeene Vereeniging van Rubbersplanter ter Oostkust van Sumatra* (AVROS), perjanjian kerja ditandatangani langsung oleh masing-masing perusahaan perkebunan dengan para buruh. Setelah organisasi tersebut berdiri, pihak perusahaan perkebunan anggota AVROS diwakili oleh AVROS. Buruh secara individu menandatangani perjanjian kerja dengan AVROS, yang diwakili oleh agen-agen mereka, di daerah asal para buruh. Kerap terjadi, buruh tidak mengerti dan memahami isi perjanjian itu karena tingkat pendidikan mereka yang rendah.⁵ Dalam hal kebijakan upah, semua perusahaan perkebunan di Aceh (walaupun tidak termasuk dalam anggota AVROS) tetap mengikuti aturan dan kebijakan yang diambil oleh AVROS.⁶

Dari data yang diperoleh dari laporan Inspektorat Tenaga Kerja, sampai dengan tahun 1919, masih terdapat perbedaan upah buruh kontrak yang bekerja di Aceh berdasarkan suku dan kebangsaan. Akan tetapi, setelah tahun 1919 tidak didapati lagi perbedaan tersebut, namun telah terjadinya keseragaman sistem upah dengan mengikuti ketentuan AVROS.

⁵ Sjafrin Sairin, "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatera Utara" dalam *Prisma* No. XX, April 1991, hlm. 31.

⁶ Ellen Leenarts, *op. cit.*, hlm. 149.

Tabel 4.1 : Upah Harian Buruh *Onderneming* di Aceh menurut Suku dan Kebangsaan, 1912-1919 (dalam sen)

Thn	Jawa Kontrak I		Jawa Perpanjangan		Cina	Keling	Nias	Padang	Dayak
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.					
1912	33	28	40	30	50	-	35	40	50
1916	33	28	40	30	50	-	35	-	-
1917	33	28	35	30	50	38	35	-	-
1918	33	28	40	35	50	40	40	-	-
1919	35	30	40	35	50	38	40	-	-

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1912-1919.

Dari Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa upah buruh kontrak tertinggi adalah buruh Cina⁷ dan buruh Dayak dengan rata-rata 50 sen perhari; diikuti buruh Padang 40 sen, buruh Keling 38,67 sen, dan buruh Nias 37 sen perhari; sedangkan upah yang paling rendah adalah buruh Jawa dengan rata-rata buruh laki-laki kontrak pertama 33,4 sen dan perpanjangan kontrak 39 sen perhari, dan buruh perempuan kontrak pertama rata-rata 28,4 sen dan perpanjangan kontrak 32 sen perhari. Upah perpanjangan kontrak buruh Cina, padang, Dayak, Keling dan Nias lebih tinggi 5 sen dari buruh kontrak pertama. Data upah buruh buruh Dayak dan buruh Padang hanya ada untuk tahun 1912 saja.

⁷ Tingginya upah buruh Cina karena mereka dianggap sebagai buruh yang ulet, pekerja keras dan tidak suka mengeluh. J. J. van de Velde, *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949*, terj. Pustaka Azet. (Jakarta: Pustaka Azet, 1987), hlm. 33. Lihat juga Paul van't Veer, *Perang Belanda di Aceh* (Banda Aceh: Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh, 1977), hlm. 200.

Tabel 4.2 : Upah Minimum Harian Buruh Perkebunan Karet Kelompok AVROS, 1919-1938 (dalam sen)

Tahun	Kontrak Pertama		Perpanjangan	
	Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
Jan. 1919-Jan. 1920	35	30	40	35
Feb. 1920-Okt. 1920	41	36	46	41
Nov. 1920-Apr. 1921	55	50	60	55
Mei 1921-Okt. 1922	47	42	52	47
Sept. 1922-Jan. 1926	42	37	47	42
Feb. 1926-Agust. 1931	45	40	50	45
Sept. 1931-Des. 1932	37	32	37	32
Jan. 1933-Agust. 1933	32	27	37	32
Sept. 1933-Feb. 1935	37	32	37	32
Mar. 1935-Des. 1938	32	27	35	30

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie 1911-1938. Lihat juga Ellen Lennarts : (1999), hlm. 153.

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa rata-rata upah minimum harian buruh laki-laki kontrak pertama adalah 40,3 sen, sedangkan buruh perempuan 35,3 sen; upah minimum harian buruh laki-laki perpanjangan kontrak rata-rata 44,1 sen, sedangkan buruh perempuan 39,1 sen. Data ini menunjukkan bahwa antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, baik buruh kontrak maupun buruh bebas, terdapat perbedaan margin upah minimum harian sekitar 4 sen. Upah minimum tertinggi buruh *onderneming* karet di Aceh Timur terjadi pada periode Nopember 1920-April 1921. Tingginya upah ini tidak terlepas dari kondisi harga karet yang mengalami kenaikan cukup berarti pada periode ini. Sedangkan upah minimum mengalami penurunan yang cukup signifikan (hampir setengah upah tertinggi) mulai awal tahun 1930-an akibat resesi ekonomi. Dari Tabel 4.2 juga dapat dilihat

bahwa upah minimum antara kontrak pertama dengan buruh perpanjangan kontrak pada *onderneming* karet di Aceh Timur terjadi perbedaan sebesar 5 sen.

Tingkat upah ini tidak bisa dijadikan ukuran kesejahteraan buruh tanpa dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok saat itu, terutama beras. Sebagai daerah yang kurang cocok untuk pertanian padi, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, kebutuhan beras Aceh Timur harus dipasok dari luar daerah. Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan *onderneming* membuat daerah ini menjadi pengimpor beras terbesar di Aceh. Rata-rata impor beras Aceh Timur tiap tahun antara tahun 1913-1919 adalah 4.533,86 ton, atau 43,15 % dari impor beras Aceh secara keseluruhan.

Tingginya kebutuhan beras Aceh Timur sangat berkaitan dengan jumlah buruh perkebunan karet di daerah ini yang cukup besar. Sampai dengan tahun 1917, kebutuhan besar Aceh Timur terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun setelah itu kebutuhan terjadi penurunan yang cukup berarti. Kecendrungan ini juga terjadi pada wilayah Aceh secara keseluruhan. Penurunan kebutuhan beras Aceh Timur ini terjadi sebagai dampak dari keberhasilan program ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman padi dari Pemerintah di daerah ini dalam upaya mengantisipasi

terulangnya kelaparan buruh perkebunan karet dan juga penduduk pribumi pada masa Perang Dunia I.⁸

Tabel 4.3 : Impor Beras ke Aceh dan Aceh Timur, 1913-1919.
(dalam ton)

Tahun	Aceh	Aceh Timur	Persentase Aceh Timur
1913	12.370	4.948	40,00
1914	10.679	4.277	40.05
1915	7.390	3.503	47,40
1916	13.510	5.919	43,81
1917	15.391	6.710	43,59
1918	10.100	4.404	43,60
1919	4.532	1.976	43,60

Sumber : M. Gade Ismail, 1991, Lampiran 8, hlm. 258. Lihat Juga J. Kreemer, "De Rijscultuur in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden", *TAG* 35 (1918) II, hlm. 396.

Tingkat kesejahteraan buruh perkebunan karet di Aceh Timur tidak bisa dipisahkan dari harga beras di daerah ini yang dipasok dari daerah lain di Aceh. Perkembangan harga beras di perkebunan karet tidak otomatis mengikuti perkembangan harga beras di pasaran. Berbeda dengan harga beras di pasaran yang terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sesuai dengan hukum pasar, harga beras di perkebunan karet justru cenderung konstan, walaupun terjadi fluktuasi terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama.

⁸ M. Gade Ismail, "Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni; Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942". (*Disertasi Doktor Universitas Leiden*), 1991, hlm. 181.

Tabel 4.4 : Harga Beras di Kota-Kota Besar di Pulau Jawa dan Sumatra 1919-1938.

Tahun	Harga (Sen/kg)	Tahun	Harga (Sen/kg)
1919	15,6	1929	16,4
1920	25,3	1930	16,1
1921	21,3	1931	10,3
1922	15,6	1932	8,4
1923	14,6	1933	6,6
1924	16,3	1934	6,4
1925	16,1	1935	6,4
1926	17,0	1936	5,9
1927	15,5	1937	6,9
1928	15,4	1938	7,0

Sumber : Ellen Lennarts, (1999), hlm. 152.

Tabel 4.5 : Harga Beras Pada *Onderneming* Karet di Sumatra Timur dan Aceh, 1919-1938.

No	Periode	Harga (sen/kg)
1.	Tahun 1912 - Oktober 1920	10,00
2.	November 1920 - April 1921	20,00
3.	Mei 1921 - Agustus 1931	12,50
4.	September 1931 - Desember 1938	7,50

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie 1912 -1938. Lihat juga Ellen Lennarts, (1999), hlm. 152.

Dari kedua Tabel di atas dapat dilihat bahwa harga beras tertinggi, baik di pasar bebas maupun di perkebunan karet, terjadi pada periode akhir 1920 dan awal 1921. Harga terendah terjadi pada periode tahun 1930-an. Bila dihubungkan dengan tingkat upah minimum kuli dalam Tabel 4.2 di belakang, menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara harga beras dengan tingkat upah kuli. Meskipun demikian, pada kenyataannya naiknya harga beras dan kebutuhan hidup lainnya tidak secara otomatis membuat pengusaha perkebunan menaikkan upah

buruh. Sering terjadi, naiknya upah buruh terjadi setelah adanya usulan dari Inspektorat Tenaga Kerja, berdasarkan hasil inspeksi di lapangan.

Meskipun banyak yang meragukan keberadaannya, Inspektorat Tenaga Kerja ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengusaha perkebunan. Walaupun tidak semua usulan mereka diikuti oleh pengusaha perkebunan, namun usulan-usulan mereka telah cukup efektif dalam menekan pengusaha perkebunan untuk memperbaiki upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup. Berdasarkan bukti yang didapatkan, usulan-usulan yang disertai dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Inspektorat Tenaga Kerja terhadap pemilik perkebunan, ternyata telah berpengaruh besar pada perusahaan perkebunan dalam menentukan tingkat upah buruh. Usulan menaikkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup buruh di lapangan banyak yang dituruti oleh pengusaha perkebunan baik melalui menaikkan gaji atau pemberian tunjangan, walaupun tidak sebesar yang diusulkan Inspektorat. Begitu juga saat terjadinya penurunan harga karet akibat krisis ekonomi, pengusaha perkebunan harus meminta persetujuan dari Inspektorat Tenaga Kerja terlebih dahulu untuk menurunkan upah buruhnya.

Tabel 4.6 : Inspeksi Budget Kuli untuk Pantai Timur Sumatra dan Aceh, 1923-1934

Tahun	Upah Minimum Perhari yang Cukup Menurut Inspektorat Tanaga Kerja (berdasarkan hasil inspeksi di lapangan)	Tanggapan dari Organisasi Perusahaan Perkebunan
1923	-42 Sen tidak cukup. -Di wilayah terpencil biaya hidup sangat tinggi	Desember 1923; DPV dan AVROS tidak setuju upah tidak cukup, tetapi berjanji akan menaikkan upah di daerah terpencil sebagai tunjangan
Agust. 1925	-42 Sen tidak cukup, -47 Sen baru cukup	Desember 1925: Upah minimum dinaikkan sebagai tunjangan 3-4 sen perhari pada perkebunan Karet.
Okt. 1926	-38-39 sen cukup untuk laki-laki. -32-33 sen cukup untuk perempuan. -Di wilayah terpencil tidak cukup.	42 sen gaji harian cukup. DPV dan AVROS menyarankan anggotanya meminilisir biaya hidup dengan mengurangi biaya traspor dan sewa bagi kedai milik perkebunan.
Sept. 1931	-	Menurunkan upah dengan persetujuan Inspektorat Tenaga Kerja
Akhir 1932	-28 sen untuk laki-laki -32 sen untuk wanita	AVROS menurunkan gaji menjadi 32 sen untuk laki-laki dan 27 sen untuk perempuan
Akhir 1934	-24,5 sen untuk laki-laki dan 20 sen untuk wanita (termasuk 15% kebutuhan khusus)	Maret 1935 ; AVROS menurunkan upah sebesar 2 sen
Perte. 1937	-28,5 sen untuk laki-laki dan 23,7 untuk wanita.	-

Sumber : Ellen Lennarts, (1999), hlm. 154-155. Lihat juga Verslag van Arbeidsinspectie 1923-1937.

Dari Tabel 4.6 juga dapat dilihat bahwa kehidupan buruh di perkebunan-perkebunan di daerah terpencil ternyata lebih sulit dari perkebunan-perkebunan yang dekat dengan kota-kota besar. Hal ini dikarenakan oleh biaya hidup di daerah terpencil yang

lebih tinggi akibat mahal biaya transportasi barang-barang kebutuhan pokok. Bila dihubungkan dengan perkebunan-perkebunan karet di Aceh Timur yang banyak terletak di daerah terpencil (sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu) maka dapat ditafsirkan bahwa kehidupan buruhnya juga sangat sulit.

Untuk melihat gambaran hidup seorang buruh di perkebunan pada awal tahun 1937, sebagai ilustrasi, dapat dilihat dalam tulisan yang sangat menarik dari surat kabar terbitan Medan, "*Sinar Deli*"⁹, tanggal 2 Maret 1937. Digambarkan bahwa upah buruh perkebunan hanya 35 sen sehari. Apabila seorang buruh mampu bekerja 28 hari sebulan, dia akan menerima upah sekitar f 9,80 sebulan. Setelah membayar uang panjar (*voorschot*) dan biaya hidupnya selama sebulan, maka upahnya yang masih tinggal dalam genggamannya hanya sekitar f 2,40. Namun para buruh umumnya jarang sekali dapat menyimpan sisa upahnya itu karena uang itu digunakan kemudian untuk iuran pertunjukan, wayang kulit, berjudi dan bersenang-senang pada hari gajian besar yang diadakan sebulan sekali. *Sinar Deli* juga mencoba melakukan kalkulasi upah yang diterima buruh itu dan biaya hidup mereka dalam sebulan, yaitu:

⁹ Dikutip dari Sjafrin Sairin, *op. cit.*, hlm. 29-30.

Tabel 4.7 : Jumlah Rata-rata Upah dan Pengeluaran Buruh Perbulan

Upah dan Pengeluaran	Jumlah	
Upah Bulanan: 28 hari kerja x 35 sen		f. 9,80
Pajak		f. 0,40
Panjar (voorschoot)		f. 1,90
Biaya Hidup Sebulan:		
1. Korek api	f. 0,10	
2. Garam	f. 0,11	
3. Beras 45 kati	f. 2,25	
4. Ikan asin 5 kati	f. 0,90	
5. Minyak makan 2 botol	f. 0,40	
6. Sayur	f. 0,60	
7. Tembakau	f. 0,50	
8. Minyak tanah 5 botol	f. 0,50	
Pengeluaran Sebulan		f. 5,36
Sisa		f. 2,14

Sumber : *Sinar Deli*, 28 Maret 1937, dikutip dalam Sjafrin Sairin (1991), hlm. 29-30.

Berita ini tidak menyebutkan apakah buruh perkebunan mendapat tunjangan (catu) beras atau tidak. Berdasarkan laporan dari van Suchtelen menyebutkan bahwa pada tahun 1933 setiap buruh laki-laki yang bekerja di perkebunan menerima tunjangan beras sebanyak 11 liter dan buruh wanita sebanyak 9 liter setiap 14 hari.¹⁰ Bila dijumlahkan sebulan buruh laki-laki mendapat 22 liter dan buruh wanita mendapat 18 liter. Jika tunjangan beras belum masuk dalam kalkulasi *Sinar Deli*, maka penghasilan buruh akan bertambah sekitar 2,25 gulden sebulan. Namun hal itu

¹⁰ *MvO van den Aftredenden Gouverneur der Oostkust van Sumatra*, JHR. B.C.C. M.M. van Suchtelen, 29 Juli 1933- 31 Januari 1936, dikutip dalam Sjafrin Sairin, *op. cit.*, hlm. 30.

menurut Sjafrî tidak banyak membantu buruh untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya.

Kalau pun ada di antara mereka yang kemudian berhasil menyimpan sisa gajinya dan termasuk dalam golongan buruh yang “kaya” menurut *Sinar Deli* 23 Februari 1937, dia hanya akan memiliki kekayaan sebagai berikut.

1. Lemari kecil dari peti minyak untuk menyimpan beberapa lembar pakaian yang dibeli dari pajak (*pasar*) dan pakaian jahitan sendiri dari bahan kualitas rendah,
2. Jam tangan murahan yang dibeli dari pegadaian,
3. Kasur tipis dengan tiga bantal dan selembat selimut yang harganya sekitar 40 sen,
4. Sebuah sepeda buatan Jepang seharga 4 gulden, dan
5. Seorang isteri dengan gigi emas di mulutnya.¹¹

Gambaran *Sinar Deli* untuk kuli di Sumatra Timur juga berlaku untuk kuli *onderneming* karet di Aceh Timur karena *onderneming* karet di daerah ini juga tergabung dalam organisasi yang sama, yaitu AVROS dengan tingkat upah yang sama pula sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Bila dihubungkan dengan perkembangan upah minimum kuli dan perkembangan harga beras, maka dapat ditafsirkan bahwa sepanjang masa kolonial kehidupan buruh di Aceh Timur juga

¹¹ *Ibid.*

tidak lebih baik dari buruh di Sumatra Timur. Bahkan berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, dapat ditafsirkan juga bahwa kesejahteraan hidup buruh perkebunan karet di daerah ini lebih rendah dari buruh di Sumatra Timur karena banyak perkebunan di Aceh Timur yang masuk dalam kategori daerah terpencil dengan biaya hidup yang lebih tinggi.

B. Perumahan

Kebutuhan dasar hidup manusia setelah makan adalah perumahan. Buruh perkebunan ditempatkan dalam barak-barak sebagai tempat tinggal komunal yang disebut pondok. Pondok-pondok tempat tinggal buruh berbentuk kotak-kotak kecil persegi empat yang dibuat memanjang. Dindingnya terbuat dari tepas dengan atap daun rumbia dan berlantaikan tanah berdebu. Pada umumnya dinding pondok kotor oleh jelaga lampu minyak yang diletakkan pada tiang tengah yang tidak pernah dibersihkan. Tiap pondok untuk buruh lajang terdapat sekitar enam balai-balai sempit dari kayu yang masing-masing untuk satu orang buruh. Balai-balai ini berfungsi sebagai tempat tidur dan tempat menyimpan properti pemiliknya. Buruh harus menyediakan sendiri tikar dan bantal untuk tempat tidur, karena perkebunan

tidak menyediakannya; biasanya mereka beli dari kedai-kedai di perkebunan.¹²

Tempat tinggal buruh perkebunan di Aceh Timur juga tidak jauh beda dengan gambaran tempat tinggal buruh di atas. Sama dengan di Sumatra Timur, buruh-buruh perkebunan di Aceh Timur juga tinggal dalam pondok-pondok yang berbentuk memanjang sebagaimana yang digambarkan oleh J. J. Van de Velde dalam suratnya saat dia berkunjung ke perkebunan di Simpang Kiri pada tahun 1929, yaitu "...Kuli-kuli tinggal dalam bangsal-bangsal panjang, ...".¹³ Di samping bentuk luarnya yang sama, bentuk dan kondisi di dalam pondok juga sama. Pondok buruh perkebunan di Aceh Timur juga berdinding tepas, atap rumbia, dan beralaskan tanah yang berdebu. Di dalamnya juga terdapat balai-balai kecil yang terbuat dari papan dan tiang kayu tempat menggantungkan lampu minyak (lihat lampiran 18 dan 19).

Selain pemondokan untuk buruh lajang, perusahaan perkebunan juga menyiapkan pemondokan untuk buruh yang sudah berkeluarga. Pondokan ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

¹² M. H. Szekey-Lulofs, *op. cit.*, hal. 35. Lihat juga Jan Breman, *Taming the Coolie Beast; Plantation Society and The Colonial order in Southeast Asia*. (Delhi: Oxford University Press, 1989), hlm. 113-114.

¹³ J. J. van de Velde, *op. cit.*, hlm. 14.

untuk satu keluarga, untuk dua keluarga, dan untuk tiga keluarga, sebagaimana data dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 : Jumlah Pondok untuk Kuli yang Sudah Berkeluarga pada *Ondernemeng* di Aceh, 1929-1939

Tahun	Untuk 1 Klrgr	Untuk 2 Klrgr	Untuk 3-4 klrgr	Jumlah
1929	183	214	30	427
1930	276	275	36	587
1931	279	521	37	837
1932	412	737	26	1.175
1933	506	722	26	1.254
1934	575	725	34	1.334
1935	481	726	34	1.241
1936	405	740	32	1.177
1937	380	879	40	1.299
1938	403	979	43	1.425
1939	473	1.024	59	1.556

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1929-1939.

Data ini digunakan untuk menafsirkan keadaan perumahan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pembangunan pondok untuk buruh yang sudah berkeluarga dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hanya dalam waktu tiga tahun dari tahun 1929 telah terjadi kelipatan dua, dan tujuh tahun kemudian hampir terjadi kelipatan empat. Banyaknya kebutuhan ini disebabkan semakin banyaknya didatangkan buruh perempuan ke perkebunan di Aceh Timur sejak awal tahun 1930-an sebagaimana telah disebutkan di belakang. Data ini memperlihatkan bahwa resesi ekonomi dunia tidak berpengaruh terhadap pembangunan

pemondokan ini. Apabila data ini dihubungkan dengan perkembangan jumlah kuli periode awal tahun 1930-an yang mengalami pengurangan hampir setengah, berarti dari segi perumahan buruh perkebunan di Aceh Timur justru membaik pada periode ini. Membaiknya fasilitas perumahan terhadap buruh perkebunan karet di Aceh Timur ini bertepatan dengan mulai diimplementasikannya *koelieordonnantie* baru.

C. Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pribumi yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 terkait dengan politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stamina penduduk, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita mereka.¹⁴ Meskipun demikian, menurut laporan pemerintah kolonial, sampai dengan menjelang pertengahan abad ke-20, tingkat kematian akibat

¹⁴ W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. 76. Lihat juga Baha' Uddin, "Pelayanan Rumah Sakit di Jawa pada Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20", dalam *Lembaran Sejarah*, Volume 7, No. 1, 2004, Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB dan Prodi Sejarah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 103.

penyakit-penyakit berbahaya terutama di Jawa masih cukup tinggi.¹⁵

Tetap rendahnya tingkat kesehatan penduduk pribumi disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) adanya diskriminasi pelayanan kesehatan yang dipraktekkan oleh Pemerintah Hindia Belanda antara golongan Eropa dengan golongan pribumi, (2) kondisi alam tropis Indonesia, dan (3) akibat rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan.¹⁶ Bila dilihat dari laporan-laporan yang ada, kondisi yang tidak jauh beda juga terjadi dalam komunitas buruh perkebunan karet di Aceh Timur.

Bagi buruh perkebunan yang mengandalkan kekuatan fisik, kesehatan merupakan unsur yang sangat vital. Kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap produktivitas kerja mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan dalam peraturan kerja ditetapkan bahwa setiap buruh yang sakit diwajibkan melapor untuk mendapatkan perawatan. Untuk itu pengusaha perkebunan telah menyediakan rumah sakit-rumah sakit di *onderneming*, dan dua rumah sakit rujukan terhadap

¹⁵ Baha' Uddin, *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁶ *Ibid.*

penyakit yang parah, yaitu satu di Langsa dan satu di Kuala Simpang¹⁷.

Ironisnya, meskipun disediakan fasilitas berobat namun waktu buruh yang hilang akibat berobat ke rumah sakit tidak mendapat bayaran dari perkebunan. Akibatnya, dengan ditambah lagi oleh kurangnya pengetahuan para buruh tentang kesehatan yang rendah membuat mereka lebih memilih menanggung akibat dari penyakitnya daripada melapor untuk berobat ke rumah sakit.¹⁸

Berdasarkan beberapa laporan resmi pemerintah, ada beberapa jenis penyakit yang melanda Aceh sejak tahun 1914, di antaranya adalah: disentri, cacar, tipus dan demam. Pada tahun 1914, penyakit yang dilaporkan menggejala di Aceh adalah dipteri, disentri, tipus, demam, beri-beri dan cacar. Penyakit cacar yang

¹⁷ Rumah Sakit Pusat Langsa menjadi rujukan semua *onderneming* yang kantor pusat administrasinya di Langsa, dan Rumah Sakit Pusat Kuala Simpang bagi *onderneming* yang kantor pusat administrasinya di Kuala Simpang. Rumah Sakit Pusat Langsa dibangun pada tahun 1912 dengan awalnya hanya mempunyai satu ruang perawatan, satu kamar operasi, dan dua ruangan besar yang dapat muat 70 pasien. Sementara itu, Rumah Sakit Pusat Kuala Simpang didirikan lebih dulu, 1911, yang awalnya hanya ada satu ruang operasi, ruang perawatan, apotik dan laboratorium. *Verslag van Arbeidsinspectie*, Jilid II, Tahun 1913.

¹⁸ Lily E. Clerkx dan Wim F. Wertheim, *Living in Deli; Its Society as Imaged in Colonial Fiction*. (Amsterdam: VU University Press, 1991), hlm. 39. Lihat juga M. H. Szekely-Lulofs, *op. cit.*, hal. 66-67.

tahun ini baru hanya ditemukan beberapa kasus, setahun kemudian sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Aceh. Dalam tahun 1916, selain penyakit demam dan disentri yang sudah merupakan gejala umum, penyakit beri-beri yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah sangat menurun mulai meningkat kembali. Berdasarkan laporan, pada akhir 1918 penyakit yang banyak memakan korban penduduk pribumi selain penyakit yang umum, disentri dan malaria adalah “demam Spanyol”.

Laporan tahun 1919 menyebutkan bahwa wabah kolera mewabah di daerah Tamiang sejak bulan April. Meskipun dapat diatasi berkat vaksinasi, namun wabah ini sempat memakan korban 29 orang. Penyakit yang sangat ditakuti adalah meningitis.¹⁹ Penyakit ini menyerang 22 orang penduduk kuli di daerah Tamiang dan 8 di antaranya meninggal. Penyakit ini diduga dibawa oleh kuli kontrakan yang baru didatangkan dari Jawa. Selain itu, pada tahun ini penyakit influenza juga melanda wilayah Tamiang yang memakan korban cukup banyak, yaitu 170 orang di rumah sakit pusat perkebunan di Kuala Simpang.²⁰ Selain itu, berdasarkan laporan Inspektorat Tenaga Kerja, ada

¹⁹ Meningitis adalah penyakit radang selaput otak atau sumsum tulang belakang.

²⁰ *Koloniaal Verslag*, tahun 1915 dan 1916, 1917, 1919. dan 1920.

beberapa jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian utama buruh di Aceh, yaitu: TBC, malaria, influenza, tipus, dan disentri, sebagaimana data dalam Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 : Penyebab Kematian buruh di Aceh Tahun 1925 dan 1927

No	Penyebab Kematian Kuli	Kuli Meninggal		Jumlah
		1925	1927	
1	Amoeb. Dysenterie	-	4	4
2	Bacill. „	4	3	7
3	Typhus	4	3	7
4	Malaria	8	11	19
5	Pneumonie (Influenza)	9	7	16
6	Meningitis	3	3	6
7	Tuberculose (TBC)	7	18	25
8	Anchylostomiasis	-	2	2
9	Beri-beri	2	1	3
10	Syphilis	1	1	2
11	Leverkanker	-	3	3
12	Enteritis	-	1	1
13	Paru-paru	-	1	1
14	Tenggelam	-	1	1
15	Bunuh Diri	-	2	2
16	Kekerasan Seksual	1	1	2
17	Melahirkan	1	3	4
18	Penyakit Lainnya ²¹	6	64	70

Sumber : Verslag van Arbiedsinspectie 1925 dan 1927.

Data ini digunakan untuk menafsirkan kondisi kesehatan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa TBC merupakan penyakit yang paling banyak merenggut jiwa buruh perkebunan karet di Aceh Timur. Setelah TBC, secara berturut-turut diikuti oleh malaria dan influenza.

²¹ Sayangnya tidak disebutkan jenis penyakit apa sehingga tidak dapat dianalisis.

Tingginya jumlah penderita TBC dan influenza erat hubungannya dengan kondisi pemondokan buruh yang buruk, kotor dan berdebu, sedangkan malaria berkaitan dengan kondisi tempat tinggal dan kerja buruh di daerah baru dan berawa-rawa yang banyak jentik nyamuk malaria.

Tabel 4.10 : Jumlah Buruh yang Meninggal di Aceh, 1919-1937

Thn	Jumlah Kuli			Kuli Meninggal					%
	Lk	Pr	Jml	Lk	%	Pr	%	Jml	
1919	14.398	5.469	20.407	70	0,5	23	0,4	93	0,5
1925	8.132	2.111	10.243	47	0,6	11	0,5	58	0,6
1926	12.119	4.217	16.336	75	0,6	13	0,3	88	0,5
1927	14.169	6.649	20.818	114	0,8	37	0,6	151	0,7
1929	22.298	7.732	29.940	152	0,7	52	0,7	204	0,7
1930	17.210	8.632	25.842	254	1,5	72	0,8	326	1,3
1931	12.939	6.839	19.778	97	0,8	30	0,4	127	0,6
1932	10.331	4.489	14.820	81	0,8	16	0,4	97	0,7
1933	11.366	2.036	13.402	89	0,8	6	0,3	95	0,7
1934	11.136	3.937	15.073	75	0,7	4	0,1	79	0,5
1935	12.551	2.089	14.640	74	0,6	12	0,6	86	0,6
1936	12.983	2.839	15.822	78	0,6	17	0,6	95	0,6
1937	17.303	4.093	21.396	106	0,6	22	0,5	128	0,6

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1920-1937.

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan kondisi kesehatan buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kematian buruh *onderneming* karet di Aceh Timur secara keseluruhan tiap tahun adalah 0,66 % dari jumlah buruh. Tingkat kematian paling tinggi terjadi pada tahun 1930 mencapai rata-rata 1,26 %, dan angka

kematian terendah terjadi pada tahun 1919 dengan rata-rata 0,46 % dari jumlah buruh.

Bila dilihat dari sudut jenis kelamin, data di atas menunjukkan bahwa angka kematian buruh laki-laki lebih tinggi dari buruh perempuan, yaitu 0,72 % berbanding 0,48. Angka kematian tertinggi buruh laki-laki dan perempuan terjadi pada periode yang sama, yaitu tahun 1930 (1,46 % dan 0,83 %), sedangkan kematian tingkat terendah terjadi perbedaan waktu, buruh laki-laki pada tahun 1919 (0,49 %), sedangkan tingkat kematian terendah buruh perempuan terjadi pada tahun 1934 (0,10 %). Data ini dapat ditafsirkan bahwa tingkat ketahanan fisik buruh wanita pada perkebunan karet di Aceh Timur terhadap terhadap lingkungan kerja jauh lebih baik dari buruh laki-laki.

Apabila data dalam Tabel 4.10 dihubungkan dengan perkembangan kondisi perkebunan karet di Aceh Timur, maka dapat ditafsirkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang sangat kuat. Saat perkebunan karet membaik, kondisi kesehatan buruhnya juga ikut membaik, seperti pada periode awal tahun 1920-an. Begitu juga sebaliknya, saat kondisi perkebunan memburuk akibat diterpa depresi ekonomi pada awal sampai pertengahan 1930-an, kondisi kesehatan buruhnya juga ikut memburuk. Kecenderungan kematian yang sama juga terjadi

pada anak-anak buruh sebagaimana data dalam Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 : Jumlah Anak Buruh di Aceh yang Meninggal, 1927-1939.

Thn	Jumlah Anak			Meninggal					
	0 - 1 thn	1 - 12 thn	Jml	0 - 1 thn	%	1- 12 thn	%	Jml	%
1927	745	3.854	4.599	78	10,5	163	3,5	241	5,3
1929	1.048	5.008	6.056	134	12,8	263	4,4	397	6,6
1930	1.168	4.380	5.548	161	13,8	282	5,1	443	8,0
1931	1.245	5.123	6.368	122	9,8	229	3,6	351	5,5
1932	937	4.351	5.288	121	12,9	110	2,1	231	4,4
1933	1.152	4.430	5.582	182	15,8	57	1,0	239	4,3
1934	971	4.815	5.786	223	23,0	54	0,9	277	4,8
1935	1.185	5.226	6.411	229	19,3	87	1,4	316	4,9
1936	1.035	5.806	6.841	239	23,1	78	1,1	317	4,6
1937	1.140	6.530	7.670	276	24,2	107	1,4	383	5,0
1938	1.236	7.352	8.588	324	26,2	95	1,1	419	4,9
1939	1.482	24.461	25943	384	25,9	269	1,0	653	2,5

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1927-1939.

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan kondisi kesehatan anak-anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur dengan alasan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kematian anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur secara keseluruhan adalah 5,1 % dari jumlah anak semua umur. Angka kematian tertinggi terjadi tahun 1929-1930, dengan rata-rata kematian 7,3 % dari jumlah anak; sedangkan angka kematian terendah terjadi pada tahun 1939, yang hanya 2,5 % dari jumlah anak. Bila dilihat dari perbedaan kelompok usia, angka kematian anak-anak umur 0-1 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak 1-12

tahun, yaitu 18,1 % berbanding dengan hanya 2,2 % dari jumlah anak masing-masing kelompok umur. Dari Tabel ini juga dapat dilihat bahwa terjadinya kecenderungan terbalik antara kematian anak umur di bawah 1 tahun dengan anak di atas 1 tahun. Kematian anak di bawah 1 tahun dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan cepat; kecendrungan sebaliknya terjadi pada anak di atas 1 tahun.

Bila dibandingkan dengan jumlah kematian orang tua mereka, persentase kematian anak buruh jauh lebih tinggi. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian anak-anak di Indonesia secara keseluruhan masa kolonial adalah penyakit cacar. Oleh karenanya penyakit ini sering disebut dengan “penyakit anak-anak” (*kinderpokken*)²². Selain itu, tingginya angka kematian anak, terutama bayi, disebabkan oleh kekurangan nutrisi, penggunaan air yang kotor, sanitasi yang buruk, dan ketiadaan fasilitas kesehatan secara umum.²³ Dari fakta-fakta dalam Tabel 4.9, 4.10 dan Tabel 4.11 dapat ditafsirkan bahwa

²² Peter Boomgaard, “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neelandica Indonesia, 1550-1930”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* no. 159.4 Tahun 2003, Leiden : KITLV.

²³ Susan Abeyasekere, “Health as a Nationalist Issue in Colonial Indonesia” dalam David P. Chandler and M.C. Ricklefs (ed.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia*. (Victoria: Southeast Asia Studies, Monash University, 1986), hlm. 2. Lihat juga Baha’ Uddin *op. cit.* hlm. 103.

kondisi finansial perusahaan perkebunan karet di Aceh Timur mempunyai korelasi yang kuat dengan tingkat upah dan tingkat kesehatan buruhnya.²⁴

D. Pendidikan Anak

Sejak awal abad ke-20, pendidikan telah menjadi unsur modernisasi dan penegak perubahan-perubahan pada masyarakat Indonesia, terutama sejak pemerintah kolonial melancarkan kebijakan Politik Kolonial Etis. Menurut van Deventer, seorang pencetusnya, Negeri Belanda yang telah berhutang pada tanah jajahan Indonesia harus membayar dengan kebijakan politik kolonial baru untuk kepentingan rakyat dengan jalan memajukan pendidikan Barat.²⁵ Pendidikan menurut van Deventer dan pengikutnya, merupakan kunci semua perubahan yang diinginkan. Tidak akan ada perubahan tanpa tenaga-tenaga pribumi yang berpendidikan cukup yang akan memikul beban itu.

²⁴ Sebagai ilustrasi, akibat terjadi wabah disentri di Mukim Bugeng, *Onderafdeeling* Idi, dalam tahun 1930 dan 1931, dibangun sebuah poliklinik di Matang Seuleumak pada tahun 1931, dan setahun kemudian dihapuskan karena alasan penghematan. ANRI, *MvO* Asisten Residen van Exel, *Beschrijving van het zelfbesturend landschapen Bago' en Boegeng, Afdeeling Oostkust van Atjeh* 1935.

²⁵ Djoko Suryo, "Pendidikan, Diferensiasi Kerja, dan Pluralisme Sosial; Dinamika Sosial Ekonomi 1900-1990", *Makalah*, Kongres Nasional Sejarah 1996, Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III, (Jakarta : Departemen P&K RI, 1997), hlm. 238.

Sejalan dengan itu, sejak awal abad ke-20, perkembangan pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial.²⁶ Kebijakan pendidikan yang dijalankan sesungguhnya tidak terlepas dari gagasan pembaharuan politik dan motivasi kepentingan ekonomi kaum kapitalis yang ada dibelakangnya. Sejalan dengan itu pendidikan di tanah jajahan perlu juga dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sektor administrasi dan industri yang berkembang pesat sejak awal abad ke-20.²⁷

Meskipun ada pergeseran dari politik kolonial liberal ke politik kolonial etis, namun hal ini sama sekali tidak merubah tujuan utama politik kolonial Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari sistem kolonial yang berlaku, yaitu berorientasi pada prinsip-prinsip garis warna (*color line*), diskriminasi, segregasi, dan non-akulturatif. Dari satu segi, penyelenggaraan pendidikan dibedakan menurut pembagian golongan masyarakat kolonial, yaitu pendidikan untuk golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Dari segi yang lain, penyelenggaraan pendidikan juga dibedakan menurut status sosial

²⁶ Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* terj. Zahara Deliar Noer. (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hlm. 54.

²⁷ Djoko Suryo, *loc. cit.*

yang berlaku, yaitu pendidikan untuk golongan elite dan pendidikan untuk golongan bawah.²⁸

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak buruh, pemerintah mendirikan beberapa sekolah di perkebunan karet di Aceh Timur. Oleh karena buruh termasuk dalam kategori golongan pribumi bawah, anak-anak buruh perkebunan di Aceh Timur juga hanya mendapatkan fasilitas pendidikan dalam kategori tersebut (*volkschool*). Sekolah-sekolah yang didirikan di perkebunan di Aceh Timur sangat terbatas jumlahnya. Oleh karenanya, tidak semua anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur dapat mengecap pendidikan sekolah.

Tabel 4.12 : Jumlah Sekolah di Perkebunan dan Jumlah Anak Buruh Umur Sekolah di Aceh, 1930-1939.

Tahun	Jml perkebunan	Jml Sekolah di Perkebunan	%	Jml Anak Umur Sekolah	Jml Anak yang Bersekolah	%
1930	63	6	9	868	274	32
1931	53	6	9	1133	521	46
1932	52	5	9	1231	423	34
1933	49	4	8	1383	501	36
1934	50	4	8	1734	530	31
1935	44	4	9	1744	496	28
1936	44	4	9	1924	583	30
1937	50	5	10	2346	583	25
1938	52	7	13	2873	709	25
1939	52	10	19	3462	899	26

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1930-1939.

Data dalam Tabel 4.12 juga digunakan untuk menafsirkan keadaan pendidikan anak-anak buruh perkebunan karet di Aceh

²⁸ *Ibid.*, hlm. 239.

Timur dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam bagian terdahulu. Data Tabel 4.12 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur rata-rata hanya 31,3 %. Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat ditafsirkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sedikitnya jumlah sekolah, terisolasi dari masyarakat asli, dan rendahnya kesejahteraan buruh. Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata jumlah sekolah di perkebunan karet di Aceh Timur hanya 10,3 % dari jumlah perkebunan. Ini berarti bahwa yang ikut berpartisipasi pada sekolah-sekolah tersebut hanya anak-anak buruh pada perkebunan tempat sekolah tersebut berada, ditambah dengan beberapa orang anak buruh dari perkebunan lain yang relatif berdekatan. Bagi anak-anak buruh yang jauh dari sekolah-sekolah tersebut terpaksa tidak bersekolah.

Untuk berpartisipasi pada sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat asli juga sangat kecil kemungkinannya, karena letak komunitas perkebunan yang terisolasi dan jauh dari masyarakat asli. Faktor tersebut diperparah lagi oleh kenyataan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tingkat pendapatan buruh yang sangat rendah menyebabkan mereka sangat berat untuk dapat memenuhi biaya untuk keperluan sekolah anak-anak mereka. Oleh karena itu, para buruh tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi dari sistem pendidikan ini. Dalam bayangan

mereka toh pada akhirnya anak-anak mereka juga akan menjadi buruh perkebunan menggantikan posisi mereka, sebagaimana yang terjadi pada Paidi yang diilustrasikan oleh Lulofs.²⁹

Dari Tabel 4.12 juga dapat dilihat bahwa resesi ekonomi juga berpengaruh besar terhadap jumlah sekolah pada perkebunan karet di Aceh Timur. Dari 6 sekolah pada tahun 1930 menjadi hanya 4 sekolah saja pada tahun 1933-1936. Sebanyak 2 sekolah terpaksa ditutup dalam rangka penghematan akibat krisis ekonomi.³⁰ Partisipasi murid, sebaliknya, terus meningkat dari tahun ke tahun, yang hanya terjadi pengurangan sedikit pada tahun 1932 dan tahun 1935. Ini berarti bahwa, kalau pada tahun 1930 satu sekolah hanya menampung sekitar 46 murid, pada tahun 1933 harus melayani 125 murid, dan tahun 1936 menjadi 145 murid. Data ini menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi awal tahun 1930-an, kualitas pendidikan anak-anak buruh perkebunan karet di Aceh Timur mengalami degradasi yang cukup parah.

²⁹ M.H. Szekely-Lulofs, *op. cit.*, hlm. 103.

³⁰ Akibat krisis ekonomi Pemerintah terpaksa mengadakan penghematan-penghematan misalnya dengan mengurangi subsidi kepada sekolah-sekolah swasta dan penutupan sejumlah sekolah terutama yang disebut *de Schakelschool*. Akibatnya, beberapa sekolah di perkebunan-perkebunan asing di Aceh Timur tidak diberi subsidi lagi dan di antaranya ada yang terpaksa ditutup. *De Deli Courant*, tanggal 18 Januari 1932, dikutip dari Rusdi Sufi, *Beberapa Catatan tentang Daerah Aceh Tahun 1928-1942*. (Banda Aceh : Toko Buku Mita Rezeki, 1980), hlm. 8.

E. Pengaruh Perang Dunia I terhadap Kesejahteraan Buruh

Perang Eropa atau lebih lazim disebut dengan Perang Dunia I (1914-1919) juga berdampak cukup besar terhadap industri perkebunan di Indonesia. Perang telah menyebabkan produksi komoditas perkebunan menurun tajam karena susahnyanya pengapalan komoditas ini ke pasaran internasional. Harganyapun mengalami penurunan karena kebutuhan menurun sesuai dengan kebutuhan perang. Sebaliknya, barang-barang impor dari Eropa mengalami kenaikan harga. Keadaan ini ditambah lagi dengan kemerosotan nilai tukar gulden yang cukup besar, yaitu nilainya pada tahun 1920 hanya 1/3 dari nilainya tahun 1913.³¹

Keadaan yang tidak menguntungkan yang dialami perkebunan berdampak langsung pada buruh. Selain banyak terjadi pemberhentian, kesejahteraan kuli yang masih dipertahankan juga mengalami penurunan yang sangat berarti. Berdasarkan beberapa laporan resmi pemerintah, keadaan ini juga terjadi pada buruh perkebunan di Aceh. Menurut laporan, pengaruh Perang Dunia I mulai terasa di Aceh pada bulan Agustus 1914. Sejak tahun ini perusahaan-perusahaan perkebunan mulai

³¹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 101-102.

mengurangi usahanya, dan berdampak pada ribuan buruh menganggur tidak ada pekerjaan. Keadaan yang paling parah terjadi pada tahun 1918 karena arus perdagangan mengalami kemacetan sama sekali. Aturan pembatasan atas ekspor dan impor, dan penghentian aktivitas perkapalan di Selat Malaka selama beberapa waktu telah mempersulit penjualan produk-produk niaga dan sangat menekan harga komoditas ekspor dan impor.³² Akibatnya, bahaya kelaparan melanda Aceh Timur, baik penduduk setempat maupun buruh-buruh *onderneming*.³³

Salah satu usaha Pemerintah untuk mengatasi kelaparan buruh adalah dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Timur memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Untuk itu setiap buruh yang bekerja pada berbagai *onderneming* diharuskan menanam bahan makanan berupa padi ladang atau bahan makanan lain seperti jagung dan ketela. Setiap buruh harus mengusahakan tanaman ini pada tanah paling sedikit 1/10 H.A., baik pada tanah milik *onderneming* itu sendiri ataupun pada tanah lain di luar *onderneming*. Selain itu, tindakan berbagai *onderneming* mengurangi jatah bahan makanan kepada

³² *Koloniaal Verslag*, tahun 1915 dan 1919.

³³ M. Gade Ismail, *loc. cit.*

buruhnya sampai dengan 20 % dari jumlah yang biasa diterima juga terpaksa diizinkan oleh Pemerintah.³⁴

Selain kekurangan makanan, Perang Dunia I juga berpengaruh terhadap pendapatan buruh perkebunan di Aceh Timur, sekaligus berdampak pada masyarakat pedagang di kota-kota di Aceh Timur. Untuk itu menarik membaca sebuah berita yang dimuat dalam surat kabar terbitan Medan (Sumatra Timur), "*Pewartar Deli*", tanggal 11 Juli 1917 dengan judul "*Sinarinya Onderafdeeling Kwala Simpang*". Di situ digambarkan bahwa kota Kuala Simpang sebagai ibukota *onderaadeeling* Tamiang, dan sekaligus sebagai pusat administrasi dari semua *onderneming* yang ada dalam wilayah Tamiang, sebelum pecahnya Perang Dunia I selalu ramai dipadati oleh buruh perkebunan untuk berbelanja kebutuhan mereka pada hari-hari gajian. Namun, peristiwa ini tidak terlihat lagi setelah pecahnya Perang Dunia I, karena para buruh perkebunan tidak cukup lagi uang untuk pergi ke kota tersebut. *Pewartar Deli* menulis, "suatu negeri yang ramai, dalam lebih kurang dua tahun yang lalu, banyak surut pemandangan mata orang-orang dari *onderneming-onderneming*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

yang datang melancong pada hari gajian ke sana, karena pengaruh perang”.³⁵

Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Menurut laporan resmi Pemerintah, sejak tahun 1919 keadaan mulai sedikit membaik. Meskipun masih tertekan, arus perdagangan mulai mengalami kenaikan karena pengapalan produk tradisional mulai diberikan kesempatan dalam jumlah yang besar. Keadaan ini dan ditambah lagi dengan arus perkapalan di Sabang meningkat dengan cepat yang membawa keadaan berangsur-angsur mulai membaik.³⁶

Dampak dari kelaparan selama Perang Dunia I telah terjadinya pergeseran sikap penduduk Aceh Timur dari pertanian lada ke pertanian padi. Usaha ini cukup berhasil, di samping cukup untuk kebutuhan sendiri juga dapat memenuhi lebih setengah kebutuhan buruh *onderneming* di Aceh Timur pada tahun 1930-an. Meskipun tidak tersedia data khusus mengenai jumlah produksi beras rakyat Aceh Timur setelah terjadinya pergeseran usaha, namun berdasarkan kenyataan dapat ditafsirkan bahwa usaha itu cukup berhasil. Dari laporan *Deli*

³⁵ *Pewarta Deli*, 11 Juli 1917.

³⁶ *Koloniaal Verslag*, tahun 1920.

Courant,³⁷ kebutuhan beras buruh seluruh *onderneming* di Aceh Timur tiap tahun adalah 8.000 ton, namun tahun 1930 hanya diimpor 1.264 dari luar negeri dan 1.200 ton dari daerah lain di Aceh. Berarti kekurangan 5.500 ton beras untuk kebutuhan buruh dipenuhi oleh hasil beras dari Aceh Timur sendiri. Dengan demikian depresi ekonomi tahun 1930-an tidak menyebabkan penduduk Aceh Timur, termasuk buruh *onderneming*, mengalami bahaya kelaparan sebagaimana yang mereka alami saat Perang Eropa.

F. Pengaruh Depresi Ekonomi terhadap Buruh

Depresi Ekonomi tahun 1930-an merupakan peristiwa yang kompleks dan rumit karena menyangkut berbagai faktor. Depresi menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi di seluruh dunia dan Hindia Belanda, terutama pada industri perdagangan ekspor. Harga komoditi perdagangan di pasaran dunia merosot tajam karena permintaan yang menurun. Akibatnya, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari Tanah Jajahan menurun, sementara bunga hutang luar negeri yang harus dibayar masih tetap tinggi. Hal ini berdampak pada terjadinya kesulitan ekonomi di seluruh Tanah Jajahan, dan juga mengakibatkan bangkrutnya banyak

³⁷ *Deli Courant*, 4 Oktober 1940, dikutip dari M. Gade Ismail, *op. cit.*, hlm. 187.

perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera Timur.³⁸

Selain itu, depresi khususnya di Hindia Belanda, juga disebabkan oleh terjadinya kelebihan produksi komoditas ekspor utama, terutama karet jauh hari sebelumnya. Tingginya harga karet dalam tahun 1910-an menyebabkan ekspansi penanaman komoditas ini terjadi secara besar-besaran. Akibat produksi besar-besaran dalam waktu yang singkat telah mengancam harga karet di pasaran dunia pada tahun 1920-an.³⁹

Situasi ini berdampak buruk terhadap buruh perkebunan, khususnya di Sumatera Timur. Dalam masa ini, perusahaan-perusahaan perkebunan karet menurunkan produksinya secara drastis. Akibatnya perkebunan memberhentikan ribuan buruhnya. Selama periode 1930 – 1935, perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Timur memberhentikan lebih setengah buruhnya.²⁷

³⁸ Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 205.

³⁹ Peter Boomgaard dan Ian Brown, "The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression; An Introduction", dalam Peter Boomgaard dan Ian Brown (ed.), *Weathering the Storm; The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000), hlm. 2.

²⁷Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870 – 1979*. (London: Yale University Press, 1985), hlm. 89.

Keadaan yang tidak jauh beda juga terjadi di Aceh. Dari “Memori Serah Terima Jabatan Gubernur A. H. Philips” dilaporkan bahwa akibat krisis dunia, keadaan ekonomi memperlihatkan kemunduran yang besar sekali. Hasil-hasil pertanian rakyat mengalami kemerosotan harga yang tajam, bahkan di beberapa daerah ada jenis komoditi yang tidak lagi mencapai harga yang menguntungkan untuk diperdagangkan. Kurangnya beredar uang di berbagai-bagai daerah telah menyebabkan rumah tangga keuangan (*geldhuishouding*) penduduk berubah menjadi rumah tangga hasil bumi (*productenhuishouding*).

Di samping itu, dilaporkan juga bahwa depresi juga berpengaruh besar terhadap perusahaan perkebunan di Aceh. Masa-masa yang buruk telah memaksa segala jenis perusahaan dan perkebunan untuk melakukan penghematan, dan akibatnya banyak buruh yang harus diberhentikan. Selama depresi, hampir setengah buruh yang diberhentikan. Dari 29.940 orang buruh yang terdaftar pada tahun 1929, hanya tinggal 13.402 orang buruh saja yang masih dipertahankan bekerja pada tahun 1933. Ini berarti bahwa dalam kurun empat tahun terjadinya depresi ekonomi telah terjadi pemberhentian buruh di Aceh sebanyak 16.538 orang. Tidak hanya buruh, karyawan bangsa kulit putihpun banyak yang diberhentikan, dan kebanyakan dari

mereka kembali ke Eropa. Namun tidak diperoleh data mengenai jumlah karyawan bangsa Eropa yang diberhentikan itu.

Satu hal yang menguntungkan ialah adanya persediaan bahan-bahan makanan yang cukup, bahkan dalam beberapa daerah dilaporkan terjadi surplus beras yang sangat berarti. Penduduk kini telah mengerjakan usaha-usaha pertaniannya secara yang lebih intensif lagi. Luas areal persawahan dalam wilayah Langsa dan Lhok Sukon antara tahun 1929 sampai 1931 telah bertambah sebanyak 40%. Harga beras yang dalam tahun-tahun baik masih berjumlah f. 15 / 100 kg, lambat laun telah merosot menjadi f.10, dan dalam tahun 1932 menjadi f. 6 – f. 8 / 100 kg. Dengan banyaknya produksi beras dan rendahnya harga, depresi tahun 1930-an tidak sampai terjadi kelaparan terhadap penduduk Aceh Timur termasuk buruh perkebunan sebagaimana terjadi pada saat Perang Dunia I.⁴⁰ Dalam konteks ini juga dapat ditafsirkan bahwa kondisi pangan buruh perkebunan di Aceh Timur masa depresi ekonomi tahun 1930-an jauh lebih baik dibandingkan dengan krisis akibat Perang Dunia I.

⁴⁰ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun III, No. 6, *Memori Umum Daerah Aceh oleh Gubernur H. N. A. Swart dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur A. H. Philips*, Alih Bahasa : Aboe Bakar. (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1979), hlm. 50-52.

BAB V

HUKUMAN DAN KEKERASAN DI PERKEBUNAN

Sebenarnya dalam *Koelieordonnantie* selain kewajiban, dalam kontrak juga tercantum hak-hak buruh, seperti bebas biaya transportasi, hak untuk memperoleh gaji secara reguler, mendapatkan fasilitas perumahan dan jaminan kesehatan. Tiga pihak yang diwajibkan mematuhi peraturan ini yaitu pengusaha perkebunan, kuli dan pejabat pengawasnya tidak terbiasa dengan adanya kewajiban yang mengatur hak dan kewajiban itu. Suatu pandangan tetap mengenai penerapan pasal-pasal ini sebelumnya tidak dimiliki oleh para pejabat itu sehingga timbul perbedaan pendapat, dan para kulipun tidak banyak menangkap arti dan isi peraturan tersebut. Dengan demikian peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹ Akibatnya, terjadilah pelanggaran-pelanggaran maupun kekerasan-kekerasan, baik yang dilakukan oleh buruh maupun oleh karyawan kulit putih.

Bab ini mengungkapkan pelaksanaan artikel-artikel *koelieordonnantie* terutama konsekuensi yang diterima buruh bila terjadi pelanggaran (*poenale sanctie*). Selain itu, dalam bagian ini juga menguraikan kekerasan-kekerasan yang terjadi di perkebunan, baik dilakukan oleh staf manajerial kulit putih

¹ R. Boersma, *Oostkust van Sumatra*, (Batavia: De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij, 1919), hlm. 250.

sebagai refleksi kekuasaan yang mereka miliki maupun kekerasan yang dilakukan oleh buruh sebagai ungkapan kekecewaannya terhadap berbagai macam tekanan dari perusahaan onderneming tempat mereka bekerja.

A. Hukuman-hukuman Terhadap Buruh

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa dasar hukum pengaturan buruh pada perkebunan-perkebunan, terutama di luar Jawa, adalah *koelieordonantie* 1880 yang beberapa dilakukan revisi. Salah satu ketentuan dalamnya adalah adanya ancaman hukuman apabila dilakukan pelanggaran, dalam usaha menjamin kelangsungan usaha perkebunan. Oleh karena adanya ketentuan (sanksi) hukuman badan bagi kaum buruh yang melanggar ketentuan tersebut maka *koelieordonnantie* diberi julukan dengan *Poenale Sanctie*, yang artinya “syarat yang bisa berakibat hukuman bila dilanggar”. Ancaman hukuman terhadap buruh perkebunan sebenarnya telah ada sebelum dikeluarkan *koelieordonnantie*, yaitu pasal 2 No. 27 dari *Algemeen Politie Strafreglement voor Inlanders* (APSI) 1872, prakarsa Mr. T. H. Kinderen, yang isinya adalah ancaman hukuman terhadap kaum buruh perkebunan yang mengikat tenaganya sebagai penerima gaji, tanpa sesuatu sebab atau izin majikan telah enggan

bekerja atau meninggalkan kerja. Perbaruan terhadap ketentuan APSI inilah yang melahirkan *koelieordonnantie*.²

Ketentuan hukuman untuk kepentingan majikan dalam *koelieordonnantie* 1880 adalah apabila kuli sakit atau tidak masuk kerja karena lari atau menjalani hukuman lebih dari satu bulan, pihak majikan dapat mengurangi gajinya. Tanpa izin tertulis dari administratur buruh tidak boleh meninggalkan perkebunan tempat mereka bekerja. *Koelieordonnantie* menentukan ancaman bagi yang melanggar. Pasal 9 dan 10 berbunyi bahwa setiap kuli kontrak yang lari, berkali-kali menolak bekerja, malas, dan sebagainya, dapat dihukum denda atau badan. Bagi buruh yang lari dan terus-menerus ingkar bekerja, baru dapat dipenjarakan apabila diajukan tuntutan oleh pihak majikan.

Dalam revisi tahun 1897 ditambah satu alinea, yaitu bahwa setiap kuli yang berada di luar perkebunan tempat dia bekerja dapat ditangkap oleh alat negara atau oleh siapapun dan diminta ditahan lebih dulu, yang kemudian dia bisa diadili dan dihukum. Untuk lebih menjamin kelancarannya, pihak majikan dengan kemauan sendiri memberikan upah tangkap (*opvatloon*) sebesar f. 2,50 per-kepala kepada barang siapa yang dapat menangkap kuli lari. Hal ini dipertegas lagi dalam revisi tahun 1915, pasal 11,

² Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*. (Medan: Waspada, 1977), hlm. 57-68.

yaitu bagi setiap orang yang memberi pemondokan kepada kuli yang lari dapat dihukum badan.³ Dengan demikian tidak mengherankan bahwa hampir semua buruh yang lari dari perkebunan dapat tertangkap kembali.

Koelieordonnantie 1915, yang dampaknya sampai tahun 1920-an, dengan jelas memperlihatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap tujuan perdamaian dari peraturan tersebut. Buruh dengan mudah dapat dihukum dan dipenjara tidak hanya karena menolak bekerja, desersi, dan pelanggaran kontrak lainnya yang disengaja, tetapi juga dalam kenyataannya untuk semua tindakan pelanggaran yang mengancam keamanan orang, perdamaian dan peraturan perkebunan. Menghina majikan dihukum denda f. 25 atau penjara maksimum 12 hari. Ancaman dengan kata-kata atau anggota tubuh dihukum dipenjara 1-3 tahun. Terakhir, perlawanan (*resistance*) tanpa berakibat luka serius dihukum maksimum 3 bulan penjara.

Dari semua pelanggaran tersebut perlawananlah yang didefinisikan dan diinterpretasi dengan sangat longgar, termasuk semua isyarat yang dianggap dapat membahayakan peraturan yang berlaku di perkebunan. Dengan demikian, ketentuan yang diarahkan kepada tujuan legal dan sosial ini tidak mengherankan bahwa pelanggaran terhadap *koelieordonnantie* mencapai ribuan

³ *Ibid.*, hlm. 97-98.

kasus. Antara tahun 1917 dan 1926 terdapat 8.000 sampai 13.000 pelanggaran tiap tahun; dengan kata lain rata-rata 5-10 % dari kuli kontrak melanggar peraturan tersebut tiap tahun.⁴

Pelanggaran terhadap *koelieordonnantie* ini dalam jumlah yang cukup besar juga terjadi di Aceh. Berdasarkan laporan Inspektorat Tenaga Kerja, hukuman yang dikenakan kepada buruh perkebunan di Aceh karena melanggar pasal-pasal tertentu adalah pasal 19 ayat 3a, 3b dan 3c, pasal 20, pasal 23, dan pasal 9 ayat 3 dari *koelieordonnantie* 1915, dan pasal 34 ayat 1a, 1b dan 1c, pasal 35.a, 35.b, dan pasal 36 ayat 1 dari *koelieordonnantie* 1931. Secara umum, pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam *koelieordonnantie* oleh buruh di Aceh lebih banyak dilakukan oleh buruh kontrak pertama dibandingkan dengan yang dilakukan oleh buruh perpanjangan kontrak.

Data dalam Tabel 5.1 digunakan untuk menafsirkan kondisi buruh perkebunan karet di Aceh Timur, dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa persentase buruh perkebunan karet di Aceh Timur yang dihukum karena melanggar pasal-pasal *koelieordonnantie* tahun 1915 antara buruh kontrak pertama

⁴ Ann Laura Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*, (New Heaven: Yale University Press, 1985), hlm. 52.

dengan buruh perpanjangan kontrak tidak terdapat kecenderungan yang sama.

Tabel 5.1 : Jumlah Buruh Kontrak di Aceh yang Dihukum dengan Artikel-artikel dalam *Koelieordonnantie* Tahun 1915

Jml. Kuli & Artikel Hukuman	Hukuman pada Kuli Kontrak I						
	T a h u n						
	1919	1925	1926	1927	1929	1930	1931*
Jml. Kuli Kont. I	2.922	2.762	3.795	9.474	16087	13564	9.818
19.3a	-	-	-	69	119	2	10
19.3b	-	-	-	281	451	515	105
19.3c	-	-	-	58	18	56	4
20	-	-	-	40	537	451	139
23	-	-	-	-	61	63	1
9.3	-	-	-	125	-	-	-
Jml dihkm	385	431	420	573	1.186	1.087	259
Persentase	13,18	15,60	11,07	6,05	7,37	8,01	2,64
Hukuman pada Kuli Perpanjangan Kontrak							
Jml. Kuli Perp. Kont.	4.166	6.639	9.323	6.020	7.898	11026	8.035
19.3a	-	-	-	20	37	2	2
19.3b	-	-	-	82	95	111	55
19.3c	-	-	-	14	8	-	42
20	-	-	-	8	174	149	92
23	-	-	-	-	43	1	1
9.3	-	-	-	42	-	-	-
Jml dihkm	275	391	242	166	357	268	152
Persentase	6,60	5,89	2,60	2,76	4,52	2,43	1,89

Keterangan : (*) Pertengahan awal tahun 1931

(-) Tidak ada data.

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1919-1931

Data Tabel 5.1 juga menunjukkan bahwa jumlah buruh kontrak pertama yang dihukum akibat pelanggaran ketentuan tersebut paling tinggi pada tahun 1925, mencapai 15,60 % dan paling rendah pada tahun 1927 yang hanya 6.05 % dari jumlah buruh kontrak pertama; sedangkan buruh perpanjangan kontrak,

pelanggaran paling tinggi terjadi pada tahun 1919 yang mencapai 6,60 %, dan paling rendah tahun 1930 yang hanya 2,43 % dari jumlah buruh kelompok ini.

Tabel 5.2 : Jumlah Buruh Kontrak di Aceh yang Dihukum dengan Artikel-artikel dalam *Koelieordonnantie* Tahun 1931

Jml. Kuli & Artikel Hukuman	Hukuman pada Kuli Kontrak I						
	T a h u n						
	1931*	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Jml. Kuli Kont. I	7.391	1.984	1.147	1.440	2.033	1.646	3.775
34.1a	80	17	7	82	38	12	22
34.1b	10	48	1	15	7	-	-
34.1c	-	-	-	-	-	-	-
35.a	1	1	-	-	-	-	1
35.b	35	4	9	4	18	28	12
36.1	4	2	3	1	-	2	-
Jml dihkm	130	72	20	102	63	42	35
Persentase	1,76	3,63	1,74	7,08	3,09	2,55	0,93
Jml. Kuli & Artikel Hukuman	Hukuman pada Kuli Perpanjangan Kontrak						
	T a h u n						
	1931*	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Jml. Kuli Perp. Kont.	8.344	7.241	3.432	2.035	1.003	1.105	283
34.1a	49	34	18	12	6	9	2
34.1b	29	30	29	8	2	3	-
34.1c	-	-	-	-	-	-	-
35.a	-	-	-	-	-	-	-
35.b	-	-	-	-	-	-	-
36.1	5	2	2	-	1	-	3
Jml dihkm	83	66	49	20	9	12	5
Persentase	0,99	0,91	1,43	0,98	0,90	1,08	1,77

Keterangan : (*) Bagian kedua tahun 1931
(-) Tidak ada data.

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1919-1931

Data Tabel 5.2 juga digunakan untuk menafsirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap *koeliordonantie* oleh buruh *onderneming* karet di Aceh Timur dengan alasan sebagaimana

telah disebutkan pada bagian terdahulu. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap *koeliordonantie* tahun 1931 oleh buruh perkebunan karet di Aceh Timur terjadi kecenderungan yang berbeda antara buruh kontrak pertama dengan buruh perpanjangan kontrak. Persentase hukuman tertinggi buruh kontrak pertama terjadi tahun 1934 dan yang terendah terjadi tahun 1937. Sebaliknya persentase hukuman tertinggi buruh perpanjangan kontrak terjadi tahun 1937 dan terendah tahun 1935.

Tingginya pelanggaran *koeliordonantie* oleh buruh kontrak pertama dari pada buruh perpanjangan kontrak diakibatkan oleh buruh kontrak pertama belum terbiasa dengan kerja kontrakan ala perkebunan Sumatera. Sebaliknya, buruh perpanjangan kontrak sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut sehingga kesalahan menjadi lebih kecil. Malahan buruh yang sudah memperpanjang kontrak beberapa kali sudah bekerja secara mekanis yang hampir tidak ada kesalahan sama sekali.⁵

Dari Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 juga dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap artikel-artikel *koelieordonnantie* dari tahun ke tahun secara umum cenderung mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari semakin kondusifnya kondisi kerja di pekebunan

⁵ M. H. Szekely Lulofs, *Kuli*, Terj. A. Ikram, Jakarta: Grafity Press, 1985), hlm. 100-101.

akibat banyaknya kritikan baik di Hindia Belanda sendiri maupun di Negeri Belanda. Terhadap *koelieordonnantie* 1915 pelanggaran paling banyak terhadap artikel 20 dan artikel 19.3b, sedangkan terhadap *koelieordonnantie* 1931 pelanggaran paling banyak terhadap artikel 34.1a dan artikel 35.b.

Satu hal yang cukup menarik adalah sebetulnya berlakunya *koelieordonnantie* 1931 merupakan reaksi terhadap banyaknya kritikan terhadap ordonansi sebelumnya.⁶ Bahkan Amerika Serikat sempat memboikot komoditas ekspor Hindia Belanda, terutama gula yang dihasilkan oleh buruh paksa.⁷ Dengan berlakunya ordonansi 1931 sebetulnya mulai bergesernya sistem produksi perusahaan *onderneming* dari buruh kontrak ke buruh bebas. Akan tetapi, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan perkebunan karet di Aceh Timur masih cukup banyak mempekerjakan buruh kontrak sampai menjelang berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian tidak

⁶ Kritikan yang cukup keras terhadap *koelieordonnantie* pernah dilontarkan oleh anggota Volksraad asal Aceh, Teuku Tjhi' Muhammad Thayeb (*Uleebalang* Peureulak, Aceh Timur) tanggal 26 Nopember 1918, yang juga mendapat dukungan dari anggota lain yaitu Teeuwen, Tjokroaminoto, Abdul Moeis, Woworoentoe, dan van Hinloopen Labberton. Muhammad Said, *op. cit.*, hlm 138.

⁷ Peter Boomgaard dan Ian Brown, "The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression; An Introduction" dalam Peter Boomgaard dan Ian Brown (ed.), *Weathering the Storm; The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000), hlm. 3.

mengherankan bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan kontrak juga masih cukup banyak terjadi di daerah ini. Selain dihukum dengan artikel-artikel *koelieordonnantie*, buruh perkebunan karet di Aceh Timur banyak juga yang dihukum dengan ketentuan hukum lain di luar artikel-artikel *koelieordonnantie* atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Tabel 5.3 : Jumlah Buruh Kontrak di Aceh yang Dihukum dengan Artikel-artikel *Koelieordonnantie* dan Hukum Lain

Tahun	Dihkm Dgn Hkm lain		Dihukum dengan Artikel-artikel dalam Koeliordonantie						
	Kntk.I	Perp.	1 kl	2 kl	3 kl	4 kl	5 kl	6 kl	lbh
1919	144	74	-	-	-	-	-	-	-
1925	45	147	-	-	-	-	-	-	-
1926	51	101	-	-	-	-	-	-	-
1927	124	73	625	80	30	14	1	-	-
1929	212	54	1.404	64	7	1	-	-	-
1930	150	58	1.097	173	66	21	12	2	-
1931	93	79	555	52	14	3	1	-	-
1932	17	18	93	2	-	-	-	-	-
1933	2	21	61	4	-	-	-	-	-
1934	12	10	92	6	3	1	1	-	-
1935	11	3	62	5	-	-	-	-	-
1936	4	11	52	1	-	-	-	-	-
1937	5	1	38	1	-	-	-	-	-
1938	8	-	68	1	2	-	-	-	-
1939	7	-	16	-	-	-	-	-	-

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1919-1939.

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan buruh perkebunan karet di Aceh Timur yang dihukum dengan hukum ketentuan di luar *koelieordonnantie* dengan alasan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa buruh kontrak *onderneming* karet di Aceh Timur yang

dihukum dengan ketentuan di luar *koelieordonnantie* antara buruh kontrak pertama hampir sebanding dengan buruh perpanjangan kontrak. Pelanggaran terbanyak, baik terhadap artikel-artikel *koelieordonnantie* maupun hukum lain, terjadi pada tahun 1929 dan 1930. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi perusahaan perkebunan masa ini saat awal ditimpa depresi yang sangat parah yang mempengaruhi semua aspek dalam komunitasnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Tabel 5.3 juga memperlihatkan bahwa sebagian besar buruh kontrak di Aceh Timur yang dihukum dengan artikel-artikel dalam *koelieordonnantie* adalah satu kali hukuman, dan tidak ada yang melebihi enam kali. Ini berarti bahwa pengalaman hukuman telah mengajarkan para buruh tersebut untuk seterusnya menghindarinya. Dari hukuman tersebut semakin menyadarkan mereka bahwa melawan superioritas aturan perkebunan merupakan pekerjaan sia-sia.⁸ Selain itu, dengan semakin lamanya buruh bekerja semakin hafal mereka dengan seluk-beluk pekerjaannya, dan semakin kecil pula kesalahan yang terjadi.

Pelanggaran terhadap hukum di luar *koelieordonnantie* juga sering terjadi, seperti penyadapan karet, pertengkaran, dan lain kesalahan. Kasus penyadapan karet merupakan persoalan yang

⁸ M. H. Szekely Lulofs, *op. cit.* hlm. 34-35.

sangat sulit yang dihadapi pengusaha perkebunan sama dengan yang dihadapi pengusaha perkebunan tembakau. Hal ini dikarenakan penduduk kampung yang tinggal di ujung atau bahkan di dalam konsesi-konsesi juga menanam karet. Sampai sekarang, tak seorangpun yang telah mengembangkan suatu alat untuk membedakan karet rakyat dan karet hasil curian.⁹ Penyesuaian karet dan pencurian lain yang dilakukan oleh buruh perkebunan karet di Aceh Timur yang berakibat pada hukuman-hukuman dapat dilihat dari laporan J. J. Van de Velde saat berada di Langsa tanggal 9 mei 1929, yaitu:

“...Selain pekerjaan rutin kantor, aku pun menjalankan pekerjaan peradilan sebagai magistrat atas penyesuaian-penyesuaian karet atau buruh-buruh pabrik dari suku Jawa yang dibawa kemari atas tuduhan pencurian-pencurian kecil, karena pertengkaran-pertengkaran atau lain-lain kesalahan...”¹⁰

Akibat pelanggaran, baik terhadap artikel-artikel dalam *koelieordonnantie* maupun hukum lain banyak buruh perkebunan di Aceh Timur yang dipecat. Setelah dipecat, sebagian buruh dikirim ke perkebunan di luar wilayah Aceh Timur dan selebihnya dikirim ke perkebunan lain, namun masih dalam wilayah Aceh Timur. Berdasarkan data Inspektorat tenaga kerja, jumlah buruh

⁹ Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant; Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1978), hlm. 79.

¹⁰ J. J. van de Velde, *Surat-surat dari Sumatra, 1928-1949*, terj. Redaksi PA, (Jakarta: Pustaka Azet, 1987) hlm. 21.

perkebunan karet di Aceh Timur yang dipecat, baik buruh kontrak maupun buruh bebas, menunjukkan angka yang sangat banyak.

Tabel 5.4 : Jumlah Buruh Kontrak dan Buruh Bebas *Ondernemings* di Aceh yang Dipecat, 1919-1938

Thn	Buruh Kontrak								
	Jml Buruh Kontrak			Jumlah Dipecat					
	Lk	Pr	Jml	Lk	%	Pr	%	Jml	%
1919	12503	5469	17972	586	4,7	426	7,7	1012	5,6
1925	6291	1670	7961	1424	22,6	401	24,0	1825	22,9
1926	10158	3778	13936	878	8,6	216	5,7	1094	7,9
1927	12553	5146	17696	1714	13,7	780	15,2	2494	14,1
1929	18307	7019	25326	549	3,0	642	9,1	1191	4,7
1930	13189	7856	21045	1097	8,3	1145	14,6	2242	10,7
1931	6749	6294	13040	1096	16,2	1569	24,9	2665	20,4
1932	2010	3401	5411	919	45,7	1431	42,1	2350	43,4
1937	3970	921	4891	1419	35,7	739	80,2	2158	44,1
1938	3556	1211	4767	1551	43,6	604	49,9	2155	45,2
Thn	Buruh Bebas								
	Jml Buruh Bebas			Jumlah Dipecat					
	Lk	Pr	Jml	Lk	%	Pr	%	Jml	%
1919	-	-	2435	303	-	45	-	348	14,3
1925	1841	441	2282	314	17,1	140	31,8	454	19,9
1926	1961	439	2400	-	-	-	-	2016	84,0
1927	2616	506	3122	-	-	-	-	2004	64,2
1929	3901	713	4614	-	-	-	-	1957	42,4
1930	4021	776	4797	-	-	-	-	1959	40,8
1931	6193	545	6738	-	-	-	-	3338	49,5
1932	8321	1026	9407	-	-	-	-	4053	43,1
1937	13333	3172	16505	4097	30,7	1.900	59,9	5997	36,3
1938	12769	4663	17432	3617	28,3	2.063	44,2	5680	32,6

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1919-1938.

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan jumlah buruh perkebunan karet di Aceh Timur yang dipecat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Secara keseluruhan, pemecatan terhadap buruh bebas lebih banyak dibandingkan dengan buruh kontrak, yaitu rata-rata 39,08 %

berbanding 21,90 % dari jumlah buruh masing-masing kelompok, sebagaimana data dalam Tabel 5.4. Fakta ini dapat ditafsirkan bahwa keterikatan buruh kontrak terhadap pekerjaannya pada *onderneming* karet di Aceh Timur lebih tinggi dibandingkan dengan buruh bebas.

Bila dilihat dari aspek jenis kelamin, Tabel 5.4 menunjukkan pemecatan terhadap buruh perempuan lebih banyak dari buruh laki-laki, baik buruh kontrak maupun buruh bebas. Pemecatan buruh kontrak perempuan rata-rata 27,35 %, sementara buruh laki-laki hanya 20,23 %; pemecatan buruh bebas perempuan rata-rata 45,30 %, sedangkan buruh laki-laki hanya 25,37 %. Fakta ini dapat ditafsirkan bahwa tingginya angka pemecatan terhadap buruh perempuan pada perkebunan karet di Aceh Timur karena beban buruh perempuan lebih kecil dibandingkan dengan buruh laki-laki. Bagi buruh perempuan, tanpa bekerja sebagai buruh pada perkebunanpun masih dapat memperoleh penghasilan dengan menjadi juru masak bagi buruh laki-laki lajang, menjadi nyai staf perkebunan kulit putih, ataupun menjadi pelacur.¹¹

B. Kekerasan Fisik Terhadap Buruh

¹¹ M. H. Szekely Lulofs, *op. cit.* hlm. 37, 43 dan 105.

Selain denda dan hukuman penjara, buruh perkebunan juga kerap kali mendapat tindakan kekerasan sewenang-wenang dari aparat perkebunan, baik oleh administratur, asisten, maupun mandor. Pemukulan terhadap buruh merupakan kejadian yang sudah umum terjadi di perkebunan. Pemukulan dilakukan baik terhadap pelanggaran aturan kerja di lapangan seperti memperlambat pekerjaan maupun penolakan perintah di luar pekerjaan seperti menolak teman wanita sekapalnya diberikan kepada buruh lain, ataupun membuat keributan.¹² Di luar *poenale sanctie*, masih sering terjadi pukulan oleh para majikan kulit putih, yang menurut mereka untuk menanamkan disiplin kepada tenaga kerja kulit berwarna. Mencambuk kuli yang kadang-kadang sampai mati dan mengikat kuli perempuan di bungalow tuan kebun dan menggosok kemaluannya dengan lada yang ditumbuk bukanlah hal yang asing di perkebunan.¹³

Meskipun kasus pemukulan terhadap buruh sering terjadi di perkebunan-perkebunan, namun sayangnya tidak semua kasus dilaporkan secara eksplisit oleh pihak perkebunan maupun oleh buruh sendiri. Bagi pihak perkebunan, kasus pemukulan terhadap buruh sedapat mungkin disembunyikan dari luar karena

¹² *Ibid.* hlm. 34, 41-42, dan 61.

¹³ Jan Breman, *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in South East Asia*. (London: Oxford University Press, 1989), hlm.xii-xiii.

ini menyangkut citra mereka di mata publik yang banyak dikecam sejak awal tahun 1920-an. Sebaliknya bagi buruh, kasus pemukulan tidak mereka laporkan karena takut terhadap ancaman pemukulan yang lebih berat lagi dari aparat perkebunan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa laporan kasus pemukulan terhadap buruh perkebunan yang dilaporkan kepada Inspektorat Tenaga Kerja hanya beberapa kasus saja.

Berdasarkan beberapa laporan resmi Pemerintah, diperoleh data bahwa kasus pemukulan terhadap buruh perkebunan juga sering terjadi di Aceh. Dilaporkan bahwa keputusan Pengadilan Magistrat di Kuala Simpang tanggal 16 Januari 1933 no. 28 dan tanggal 23 Januari 1933 no. 41 telah menjatuhkan hukuman kepada Mandar dan Martorejo, masing-masing mandor di perkebunan Rantau dan mandor kepala di perkebunan Medang Ara, dengan hukuman sebanyak f. 5, --, subsider 10 dan 5 hari hukuman kurungan disebabkan mereka telah melakukan penganiayaan ringan terhadap buruh. Dengan keputusan pengadilan yang sama tanggal 26 Januari 1933 no. 44 dan tanggal 16 Januari 1933 no. 29 telah dijatuhi hukuman kepada Umin dan Ugamita, masing-masing hukuman denda sebanyak f. 2,50, subsider 2 dan 5 hari hukuman kurungan disebabkan mereka telah melakukan kesalahan yang sama.

Akhir bulan Januari diterima berita bahwa di perkebunan Karang Inoe, Langsa, seorang Kuli bernama Emah telah dianiaya oleh mandor Hamagami yang kemudian dikurung dan seterusnya dikembalikan ke Jawa.¹⁴ Dalam laporan yang lain disebutkan juga bahwa Pengadilan Magistral di Kuala Simpang tanggal 5 Oktober 1939 no. 675, 681 dan 682 telah menjatuhkan hukuman denda masing-masing kepada asisten Jerman dari perkebunan Medang Ara, mandor Sarip dan mandor Kabul, keduanya dari perkebunan Semadam sebanyak f. 2, --, f. 1,50 atau subsider 4,5 dan 3 hari hukuman kurungan karena dituduh melakukan penganiayaan ringan terhadap seorang pekerja. Juga disebabkan delik yang serupa dan oleh pengadilan yang sama tanggal 12 Oktober 1939 no. 687 dan 691 telah dijatuhi hukuman denda kepada mandor Karmid dari perkebunan Simpang Kanan dan mandor kepala Mi'in dari perkebunan Tenggulan sebanyak f. 7,50 atau subsider 10 dan 3 hari hukuman kurungan.¹⁵

Selain laporan-laporan tersebut, dari data kuantitatif Inspektorat Tenaga Kerja terdapat banyak kasus pemukulan

¹⁴ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun V, no. 4, *Laporan Politik Polisionil Mengenai Daerah Aceh dan Daerah Takluknya Selama Semester Pertama Tahun 1933*, Alih Bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : PDIA, 1981), hlm. 41-42.

¹⁵ PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun V, No. 1, *Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1939*, Alih Bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : PDIA, 1981), hlm. 14.

terhadap buruh perkebunan di Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pemukulan paling banyak dilakukan oleh mandor. Hal ini wajar karena jumlah mandor jauh lebih banyak di bandingkan dengan aparat kulit putih, dan juga mandor bertanggung jawab langsung terhadap tingkah laku semua buruh dalam kelompoknya baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

Tabel 5.5 : Kasus Pemukulan (*Klapzaken*) terhadap Buruh Perkebunan di Aceh 1925-1939

Tahun	Perkara yang diajukan			Perkara yang Diputuskan			Hukuman yang Dijalankan		
	Adm.	Ast.	Mdr.	Adm.	Ast.	Mdr.	Adm.	Ast.	Mdr.
1925	4		35	4		35	3		30
1926	5	15	24	3	9	24	3	6	22
1927	3	10	78	2	9	78	2	5	57
1929	1	2	80	1	2	80	1	2	71
1930	1	4	70	1	4	70	1	4	60
1931	1	2	50	1	2	50	1	2	45
1932	-	-	22	-	-	22	-	-	21
1933	-	1	17	-	-	-	-	1	14
1934	1	2	25	-	-	-	-	2	22
1935	-	1	26	-	-	-	-	1	21
1936	-	-	32	-	-	-	-	-	23
1937	1	-	55	-	-	-	1	-	39
1938	-	2	45	-	-	-	-	2	40
1939	-	2	43	-	-	-	-	2	41

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, 1925-1939.

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan kasus pemukulan terhadap buruh *onderneming* karet di Aceh Timur dengan alasan seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa kasus pemukulan yang

dilakukan oleh aparat kulit putih (administratur dan asisten) terhadap buruh *onderneming* karet di Aceh Timur terjadi penurunan yang tajam dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kasus pemukulan yang dilakukan oleh mandor terjadi secara stabil dan tidak adanya penurunan. Fakta ini dapat ditafsirkan bahwa menurunnya pemukulan terhadap buruh oleh aparat kulit putih karena memang laporan tentang hal ini sengaja dikurangi dalam rangka menyahuti kritikan publik yang semakin nyaring dan juga pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh mandor merupakan perpanjangan tangan dari aparat kulit putih.

Sama halnya dengan hukuman dengan artikel-artikel dalam *koelieordonnantie* dan hukuman lain, kasus pemukulan terhadap buruh perkebunan karet di Aceh Timur juga paling banyak terjadi pada periode depresi ekonomi akhir 1920 dan awal 1930. Berdasarkan fakta ini juga dapat ditafsirkan bahwa tekanan depresi ekonomi terhadap perusahaan perkebunan di Aceh Timur mempunyai dampak terhadap tingginya angka perlakuan buruk terhadap buruh.

Dari Tabel 5.5 juga dapat dilihat bahwa tidak semua kasus pemukulan terhadap buruh yang diajukan diambil keputusan, apalagi dikenakan hukuman. Dari semua perkara yang diajukan terhadap aparat kulit putih hanya sekitar 60-70 % yang diambil suatu keputusan. Sebaliknya, semua kasus terhadap mandor

diambil keputusan. Seterusnya, tidak semua kasus yang diputuskan terhadap kedua kelompok itu dijalankan hukuman. Bagi administratur, hukuman yang sudah diputuskanpun dapat diubah menjadi hanya membayar denda.¹⁶

C. Desersi dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Kuli

Akibat dari pekerjaan yang sangat berat di perkebunan ditambah lagi dengan gampangya mendapat hukuman, seringnya mendapat perlakuan kekerasan, dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat perkebunan banyak buruh yang tidak tahan dan melakukan desersi dari perkebunan. Berdasarkan laporan Inspektorat Tenaga Kerja, jumlah buruh perkebunan yang melakukan desersi dari perkebunan di Aceh tahun 1919-1938 cukup signifikan.

Tabel 5.6 : Jumlah Buruh Kontrak yang Desersi dari Perkebunan di Aceh, 1919-1938

Thn	Jumlah Kuli			Kuli Desersi					
	Lk	Pr	Jml	Lk	%	Pr	%	Jml	%
1919	12503	5469	17972	90	0,7	32	0,6	122	0,7
1925	6291	1670	7961	458	7,3	44	2,6	502	6,3
1926	10158	3778	13936	179	1,8	41	1,1	220	1,6
1927	12553	5146	17696	347	2,8	87	1,7	434	2,5
1929	18307	7019	25326	1127	6,2	174	2,5	1301	5,1
1930	13189	7856	21045	661	5,0	192	2,4	853	4,1
1931	6746	6294	13040	185	2,7	133	2,1	318	2,4
1932	2010	3401	5411	182	9,1	154	4,5	336	6,2
1937	3970	921	4891	90	2,3	17	1,9	107	2,2
1938	3556	1211	4767	188	5,3	25	2,1	213	4,5

Sumber: *Verslag van Arbeidsinspectie, 1920-1938.*

¹⁶ Muhammad Said, *op. cit.*, hlm. 109.

Data Tabel 5.6 juga digunakan untuk menafsirkan keadaan buruh kontrak perkebunan karet di Aceh Timur yang melakukan desersi. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata jumlah buruh kontrak perkebunan karet di Aceh Timur yang desersi adalah 3,55 % dari jumlah buruh. Periode tahun 1929-1932 merupakan masa yang paling banyak buruh desersi, yaitu rata-rata 4,46 % dari jumlah buruh. Bila dihubungkan dengan perkembangan perkebunan karet yang mengalami masa-masa sulit akibat resesi ekonomi, maka kedua fakta tersebut terdapat suatu korelasi yang sangat kuat. Apabila data ini dikaitkan dengan beban kerja, jumlah hukuman dan tindakan kekerasan yang menimpa buruh perkebunan karet di Aceh Timur pada Tabel-tabel sebelumnya yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama, maka dapat ditafsirkan bahwa tingginya angka buruh desersi sangat tergantung pada tekanan dan tindakan kekerasan dari perusahaan perkebunan tempat mereka bekerja.

Bila dilihat dari sudut . jenis kelamin, Tabel 5.6 menunjukkan bahwa buruh kontrak laki-laki jauh lebih banyak yang melakukan desersi (kelipatan dua) dari buruh kontrak perempuan, yaitu 4,30 % berbanding 2,15 % dari jumlah buruh masing-masing kelompok. Fakta ini dapat ditafsirkan dari dua sudut, yaitu: pertama, kemampuan adaptasi buruh kontrak wanita pada perkebunan karet di Aceh Timur terhadap tekanan-

tekanan dari perusahaan perkebunan lebih baik dari buruh laki-laki; kedua, keberanian menanggung resiko hukuman yang lebih berat apabila tertangkap oleh buruh laki-laki lebih baik dari buruh perempuan.

Selain melakukan desersi, tidak jarang juga muncul aksi balas dendam oleh buruh terhadap aparat perkebunan karena kekerasan-kekerasan yang tidak sanggup lagi mereka hadapi dengan cara mengancam atau menyerang. Berdasarkan data dari Inspektorat Tenaga Kerja, penyerangan yang dilakukan oleh buruh terhadap aparat perkebunan juga terjadi pada perkebunan di Aceh.

Tabel 5.7 : Penyerangan yang dilakukan Buruh terhadap Staf Perkebunan dan Mandor di Aceh 1930-1939

Thn	Ancaman			Jml	Penyerangan Fisik						Jml
	Adm	Ast.	Mdr.		Adm. & Ast.			Mdr.			
					Mt	Lk	Tlk	Mt	Lk	Tdk	
1930	1	9	22	32	-	1	9	1	9	12	32
1931	-	3	8	11	-	3	-	1	5	2	11
1932	-	-	6	6	-	-	-	-	4	2	6
1933	-	1	8	9	-	-	1	-	3	5	9
1934	-	2	11	13	-	2	-	1	6	4	13
1935	-	-	7	7	-	-	-	-	3	4	7
1936	-	-	4	4	-	-	-	-	4	-	4
1937	-	-	6	6	-	-	-	1	4	1	6
1938	-	1	4	5	-	-	1	1	3	0	5
1939	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2

Keterangan : Mt : Mati
 Lk : Luka
 Tlk : Tidak Luka

Sumber : *Verslag van Arbeidsinspectie, 1930-1939*

Data ini juga digunakan untuk menafsirkan penyerangan-penyerangan yang dilakukan buruh *onderneming* karet di Aceh Timur dengan alasan sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dari Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa jumlah penyerangan yang dilakukan oleh buruh *onderneming* karet di Aceh Timur terhadap aparat perkebunan dalam bentuk ancaman dengan penyerangan fisik jumlahnya persis sama. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa antara penyerangan fisik dengan ancaman terjadi dalam satu kejadian.

Dari Tabel 5.7 juga dapat dilihat bahwa tidak satupun staf kulit putih yang mati akibat serangan buruh. Malahan untuk administratur, hanya terjadi satu kasus ancaman padahal kasus pemukulan oleh mereka terhadap buruh sering terjadi. Ini membuktikan bahwa administratur di perkebunan karet di Aceh Timur merupakan golongan yang *untouchable* dan paling berkuasa. Sebaliknya, mandor sebagai perpanjangan tangan staf kulit putih, yang selalu berhubungan langsung dengan buruh, mendapat ancaman dan penyerangan fisik paling banyak. Fakta ini membuktikan bahwa mandor di perkebunan karet di Aceh Timur berada pada posisi yang sulit.

BAB VI

KESIMPULAN

Studi ini membahas tentang komunitas dalam suatu wilayah khusus di Aceh, yaitu komunitas buruh perkebunan karet di Aceh Timur pada masa kolonial. Mengacu pada semua pertanyaan yang diajukan pada bagian pertama, kajian ini menghasilkan beberapa temuan yang dirangkum dalam bentuk kesimpulan.

Pertama, perkembangan perkebunan karet di Aceh Timur berkaitan erat dengan ekspansi modal Swasta Barat pada awal abad ke-20. Wilayah yang luas dengan penduduknya yang jarang telah menyebabkan ekspansi perkebunan karet di Aceh Timur berkembang sangat cepat. Ekspansi ini juga tidak terlepas dari tingginya harga karet di pasaran dunia saat itu.

Kedua, buruh *onderneming* karet di Aceh Timur adalah buruh migran yang sebagian besar didatangkan dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan perkebunan karet Swasta Barat yang berkembang pesat sejak tahun 1907. Kehadiran buruh Jawa ini karena tidak tersedianya buruh lokal.¹ Adanya penghasilan tetap yang lebih baik dari menanam lada, pinang dan kelapa, dan

¹ Kelangkaan buruh lokal juga terjadi pada kasus Sumatra Timur. W. F. Wertheim, W. F. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 71.

adanya penilaian negatif terhadap pekerjaan di perkebunan, yang ditambah lagi dengan semangat anti Belanda yang masih hidup dalam masyarakat Aceh menyebabkan rakyat Aceh Timur enggan bekerja pada perkebunan Swasta Barat.

Ketiga, berdasarkan suku dan bangsa dan jenis pekerjaan, buruh migran yang bekerja di Aceh dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu: buruh Jawa yang umumnya bekerja pada *onderneming* karet dan pertambangan di Aceh Timur; buruh Cina bekerja pada perkebunan tembakau dan proyek-proyek Pemerintah seperti pembuatan jalan; dan suku-suku pribumi lainnya bekerja pada *onderneming-onderneming* perkapalan dan kehutanan di Sabang dan Simeuleu. Pengkategorian ini juga terjadi pada tingkat upah minimum harian. Buruh Cina mendapatkan upah tertinggi, buruh Jawa mendapat upah terendah, dan buruh pribumi lainnya berada di tengah.

Keempat, motivasi buruh Jawa datang ke Aceh Timur pada umumnya untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik sebagaimana dipromosikan oleh agen-agen pencari kerja di Jawa tidak pernah terwujud. Dengan ikatan kontrak yang mengacu pada *koeliordonantie* 1880, mereka telah menjadi buruh kontrak yang harus mencurahkan kekuatan fisik untuk keuntungan *onderneming* dengan upah hanya cukup untuk tetap bertahan hidup (*subsistence*). Kontrol buruh dengan *koeliordonantie*, yang

sangat ketat dan pelanggaran terhadapnya dapat berakibat pada hukuman (*poenale sanctie*) dan tidak jarang pada tindak kekerasan, menjadikan buruh *onderneming* karet di Aceh Timur tidak punya pilihan selain harus menuruti keinginan perusahaan. Akibatnya, kehadiran mereka ke Aceh Timur telah menyebabkan terciptanya kemiskinan baru di wilayah ini. Kemiskinan ini pula merupakan salah satu faktor penyebab banyak buruh yang malu kembali ke Jawa. Sebagian dari mereka tetap bertahan sebagai buruh pada perkebunan karet di Aceh Timur, sesuai dengan keinginan pemilik *onderneming*, dan selebihnya hidup bebas dalam kampung-kampung baru yang muncul di sekitar *onderneming-onderneming* besar.

Keempat, buruknya kondisi sosial ekonomi buruh Jawa pada perkebunan karet di Aceh Timur sangat berkaitan dengan tingkat upah yang sangat rendah yang hanya cukup untuk bertahan hidup (*subsistence*). Tingkat upah minimum buruh hanya disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok dan kondisi finansial perusahaan. Oleh karenanya, tingkat kesejahteraan buruh perkebunan karet di Aceh Timur tidak terjadi perubahan sama sekali walaupun upah naik sampai berakhirnya masa kolonial Belanda. Malahan sebaliknya, saat terjadi krisis ekonomi tahun 1930-an, kondisi ini terpuruk sampai pada tingkat terendah dalam sejarah buruh di Aceh.

Kelima, kemampuan adaptasi terhadap sistem kapitalisme perkebunan antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan di Aceh Timur tidak sama. Adaptasi buruh perempuan terhadap lingkungan kerja maupun tekanan-tekanan dari perusahaan sedikit lebih baik dibandingkan dengan buruh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata angka kematian buruh perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan buruh laki-laki, dan rata-rata jumlah desersi buruh perempuan dari *onderneming* hanya setengah dari laki-laki.

Terakhir, perkembangan *onderneming* karet yang sangat cepat, dan mendatangkan buruh migran dalam jumlah yang sangat besar, telah berdampak pada terjadinya perubahan ruang ekonomi di Aceh Timur. Banyaknya jumlah pendatang ini, yang mencapai sepertiga jumlah penduduk, telah berdampak pada aktivitas pasar-pasar yang sudah ada menjadi lebih maju, dan bermunculan pasar-pasar baru di sekeliling *onderneming* karet. Dengan demikian, terbuka pula peluang-peluang pekerjaan baru bagi masyarakat Aceh Timur, seperti pedagang dan penyedia jasa angkutan. Selain itu, pesatnya perkembangan *onderneming* karet telah pula berdampak pada adaptasi terjadinya ekonomi sebagian masyarakat Aceh Timur dengan mencoba membudidaya tanaman karet atas kemauan dan pada lahan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Arsip

ANRI, Film no. 11, W. Steinbuch, *Algemene Memorie van de Afdeeling Oostkust van Atjeh*, 30 Maret 1931.

ANRI, Film no. 11, *MvO*. Asisten Residen Van Exel, *Beschrijving van het Zelfbestuurend landschap Bago' en Bugeng, Afdeeling Oostkust van Atjeh* 1935.

ANRI, Film no. 11, *MvO* J. J. C. H. van Waardenberg, *Onderafdeeling Langsa, Afdeeling Oostkust van Atjeh* Juni 1931.

II. Sumber Resmi Tercetak

Algemeene Platenteelt. Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1911.

Jaarenslag A.V.R.O.S., 1915.

Koloniaal Verslag tahun 1879-1920.

Monografi Kabupaten Daerah TK II Aceh Timur. Langsa: Staf Sekretariat Daerah TK II Kabupaten Aceh Timur, 1970.

Nederladsch-Indie Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling, Deel II; Tabellen. Batavia: Drukkerijen Ruygrok & Co., 1922.

Opgave Omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verschepping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh, 1914-1921.

PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun VI No. 1, *Laporan politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Pertengahan Pertama Tahun 1928*, Alih Bahasa : Aboe Bakar. Banda Aceh : PDIA, 1982.

PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun III, No. 6, *Memori Umum Daerah Aceh oleh Gubernur H. N. A. Swart dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur A. H. Philips*, Alih Bahasa : Aboe Bakar. Banda Aceh: PDIA, 1979.

PDIA, Seri Informasi Aceh VI, Van Aken, *Laporan Politik Polisionil Aceh Tahun 1933*, Alih Bahasa : Aboe Bakar. Banda Aceh : PDIA, 1977.

PDIA, Seri Informasi Aceh Tahun V, No. 1, *Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1939*, Alih Bahasa : Aboe Bakar. Banda Aceh : PDIA, 1981.

Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultures (Rubber, Koffie, Klappers, Thee en Olipalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli, 1923-1924.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, tahun 1911 no. 540, 1515 no. 421, 1916 no. 46, 138, 334, dan 447, 1919 no. 776, 1920 no. 535, 1921 no. 39, dan 1931 no. 94.

Verslag van Arbeidsinspectie, 1912-1939.

III. Buku

Abeyasekere, Susan.1986. "Health as a Nationalist Issue in Colonial Indonesia" dalam David P. Chandler and M.C. Ricklefs (ed.), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia*.Victoria: Southeast Asia Studies, Monash University.

Allen, G. C. dan Donnithorne, Audrey G. 1968. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya; A Study in Economic Development*. New York: The Macmillan Company.

Anderson, J. 1971. *Mission to the East Cost of Sumatra 1823*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Bambang Purwanto. 1992. "From Dusun to the Market; Native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890-1940." *Disertasi Doktor*, University of London.

- Barlow, Colin dan Drabble, John. 1988. "Pemerintah dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia, 1900-1940" dalam Anne Booth et al. *Sejarah ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Beckford, George L. 1972. *Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*. New York: Oxford University Press.
- Blankenstein, M. 1929. *De Poenale Sanctie in Practijk*. Amsterdam: Nuijck & Van Ditmar Uitg. Mij.
- Boeke, J.H. 1942. *The Structure of Netherlands Indian Economy*. New York: International Secretariat Institute of Pacific Relation.
- . 1984. *Onwikkelinfgang en Toekomst van Bevolking en Ondernemings Landbouw in Nederlands-Indie*. Leiden: E.J. Brill.
- Boersma, R. 1923. *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*. Utrecht: Boekhandel Cohen.
- . 1919. *Oostkust van Sumatra* Batavia: De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij.
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajajhan Hindia Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Terj. Koesalah Soebagyo dkk. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Djambatan.
- dan Brown, Ian. 2000. "The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression; An Introduction", dalam Peter Boomgaard dan Ian Brown (ed.), *Weathering the Storm; The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Breman, Jan. 1989. *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in South East Asia*. London : Oxford University Press.
- Brown, Colin. 2004. *Soekarno; Perempuan dan Pergerakan Nasional*, Terjemahan: Tubagus Arie Rukmantara. Yogyakarta: Ombak.

- Clemens, A.H.P. dan Linblad, J. Thomas. 1989. *Het Belang van de Buitengewesten; Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*. Amsterdam: NEHA.
- Clerkx, Lily dan Wertheim, Wim F. 1991. *Living in Deli; Its Society as Imaged in Colonial Fiction*. Amsterdam: VU University Press.
- Das Gupta, AK. 1962. "Aceh and Indonesia Trade and Politics 1600-1641", *Disertasi Doktor*, Cornel University.
- Djoko Suryo. 1997. "Pendidikan, Diferensiasi Kerja, dan Pluralisme Sosial ; Dinamika Sosial Ekonomi 1900-1990", *Makalah*, Kongres Nasional Sejarah 1996, Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III. Jakarta : Departemen P&K RI.
- Evens, Peter. 1979. *Dependent Development; The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. East Fordham Road, New York: Fordham University Press.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Gonggrijp, J.R.C. 1944. *Overzicht van de Economische Ontwikkeling van Atjeh Sedert de Pacificatie (tijdperk 1923-1938)*. Den Haag: W.P. van Stockum & Zoon.
- Houben, Vincent J. H. et al. 1999. *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Islands, c. 1900-1940*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Hurgronje, C. Snouck. 1893. *De Atjehers*, Jilid I dan II. Leiden: E.J. Brill.
- Jones, W.O., "Plantation," dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 12, 1968, hlm. 154.
- Jongejans, J. 1939. *Land en Volk van Atjeh: Vroeger en Nu*. Baarn: Hollandia Drukkerij.
- Kielstra, E. B. 1883. *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog*, Jilid I, 'Gravenhage: De Gebroeders van Cleef.

- Kreemer, J. 1918. "De Rijscultuur in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden", *TAG* 35, II.
- _____. 1923. *Atjeh*, Jilid I dan II. Leiden: E.J. Brill.
- Kruyt, J. A. 1877. *Atjeh en de Atjehers: Twee Jaaren Blokkade..*
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Langhout, J. 1923. *Viiftig Jaren, Economische Staatskunde in Atjeh*. Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
- Leenarts, Ellen. 1999. "Coolie Wage in Western Enterprises in the Outer Island, 1919-1938", dalam Vincent J. H. Houben et al. *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Island, c. 1900-1940*. Weisbaden: Harrassowitz Verslag.
- Lindblad, J. Thomas. 1989. "Ontwikkeling van de Buitengewesten", dalam A.H.P. Clemens dan Thomas Linblad, *Het Belang van de Buitengewesten; Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*. Amsterdam: NEHA.
- _____. 1999. "New Destinations; Conditions of Coolie Labour Outside East Sumatra, 1910-1938", dalam Vincent J. H. Houben et al., *Coolie Labour in Colonial Indonesia; A Study of Labour Relations in the Outer Island, c. 1900-1940*. Weisbaden: Harrassowitz Verslag.
- _____. 2000. "Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa, 1910-1940", dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2002. "The Outer Island in the 19th Century: Contest for Periphery" dalam Howard Dick et al. *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. New South Wales & Honolulu : ALLEN & UNWIN and University of Hawaii Press.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2000. *Women and the Colonial State*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lombard, Denys. 1991. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka.

- Lukitaningsih. 2003. "Buruh Perempuan di Perkebunan Karet Sumatera Timur, 1900-1940. Tesis S-2 UGM.
- M. Gade Ismail. 1991. "Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni, Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur 1840-1942". *Disertasi Doktor Universitas Leiden*.
- M. Isa Sulaiman 1997. *Sejarah Aceh; Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad Said. 1977. *Koeli Kontrak Tempo Doeloe; Dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Waspada.
- Nazaruddin Sjamsuddin. 1985. *The Republican Revolt: A Study of the Achehnese Rebellion*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- O'Malley, William J. 1988. "Perkebunan 1830 - 1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth, et al., *Sejarah ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede Druk, Eerste Deel. Leiden : E. J. Brill.
- Pelzer, Karl J. 1978. *Planter and Peasant; Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Piekaar, A. J. 1949. *Atjeh en Oorlog Met Japan*. Bandung: Vitgeverij W. Van Hoeve S'Grovnhage.
- Reid, Anthony. 1979. *The Blood of the People*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- _____. 1969. *The Contest for North Sumatra; Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858-1898*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rusdi Sufi. 1980. *Beberapa Catatan tentang Daerah Aceh Tahun 1928-1942*. Banda Aceh : Toko Buku Mita Rezeki.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Schadee, W.H.M. 1919. *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*. Amsterdam: Sumatra Institut.
- Siegel, James T. 1969. *The Rope of God*. Berkeley: University of California Press.
- Soegijanto Padmo. 1994. *The Cultivation of Vorstenlans Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and its Impact on the Preasure Economy and Society, 1860-1960*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Stoler, Ann Laura. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. London: Yale University Press.
- Szekely, Ladislao. 1985. *Tropic Fever; The Advantures of a Planter in Sumatra*, translated by Marion Saunders. Singapore : Oxford University Press.
- Szekely-Lulofs, M. H. 1985. *Berpacu Nasib di Kebun Karet*. Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 1985. *Kuli*, Jakarta: Grafiti Press.
- Swart, H.A.G.N. 1911. *Rubber Companies in the Netherlands East Indies*. London: The Netherlands commission for the International Rubber Exhibition.
- Taufik Abdullah (ed). 1988. *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Teuku Ibrahim Alfian. 1967. *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Thee Kian Wie. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research.
- Thomson, Virginia. 1947. *Labor Problems in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- van de Velde, J.J., 1987. *Surat-surat dari Sumatra 1928-1949*, terj. Pustaka Ajat. Jakarta: Grafiti Press.

- van Laanen, J.T.M. 1982. *The World Depression (1929-1935) and the Indigenous Economy in Netherlands Indie*. Queensland: James Cook University of North Queensland.
- van Veer, Paul. 1969. *Perang Belanda di Aceh*, terj. Aboebakar. Banda Aceh: Dinas P & K D.I. Aceh.
- Wertheim, W. F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Zulfan. 1995. "Kelompok Pengusaha Pada Masa Kemerdekaan di Aceh, 1945-1949. Tesis S-2 Universitas Indonesia.

IV. Artikel Majalah

- Anonim, "De Langsarbaai" dalam *IG* no. II, 1905. Amsterdam: J. H. De Bussy, hlm. 1656-1661.
- _____, "De Koeli Werving, *IG* no. II, 1913, hlm. 1237.
- _____. "Kolonisatie bij Langsa" dalam *IG* no. II, 1929, hlm. 1245-1246.
- Boomgaard, Peter, "Smallpox, Vaccination, and the Pax Neelandica Indonesia, 1550-1930", *BKI* no. 159.4, 2003, Leiden : KITLV.
- Ezerman, R. A., "Een en Ander Omtrent de Koeliwerving", *IG* no. II, 1912, hlm. 1261-1262.
- Ibrahim Hasan, "Masalah Ekonomi dan Perdagangan di Kerajaan Aceh Darussalam", sebuah Kajian Pendahuluan, dalam *Sinar Darussalam*, No. 96/97, 1978.
- Kreemer, J. "De Rijscultuur in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden", *TAG* No.35, 1918, Jld. II, hlm. 396.
- Lulofs, C., "Een Kijkje te Langsar en op de Gouvernement Rubber-Onderneming Aldaar", dalam *TBB* no. 47, 1914, hlm.232-238.
- M. Syaref Isa, "Perkembangan Historis Pengusaha di Daerah Aceh, Suatu Tinjauan", dalam *Sinar Darussalam*, No. 104/105, 1981.

- Razif, "Pengasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan di Sumatra Timur; Tinjauan Historis, dalam *Prisma* No. 4 Tahun XX, April 1991, hlm. 43-44.
- Sjafri Sairin, "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatera Timur", dalam *Prisma*, No. 4 Tahun XX, April 1991.
- S. Margana, "Perdagangan dan Perkembangan Ekonomi Aceh, 1900 – 1940", dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1, No. 1, 1997: Jurusan Sejarah Fakultas sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 44-80.
- Syamsuddin Mahmud, "Sejarah Ekonomi dan Keuangan dalam Kerajaan Aceh Darussalam", dalam *Sinar Darussalam*, No. 96/97, 1978.
- van Eijbergen, G.J., "Atjeh up to Date", *TBB* 46, 1915, hlm. 309-310.
- Veth, P. J., "Geographische Aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh", dalam *TAG* II, Amsterdam: C. F. Stemler, 1877.

V. Surat Kabar

Pewartar Deli, 11 Juli 1917, Terbitan Medan.



Lampiran 3 :
Luas Penanaman *Onderneming-onderneming* Karet
di Aceh Timur, 1915-1930

Perusahaan	Onderneming	Kantor Pos	Luas Penanaman (H.A.)			
			1915	1920	1925	1930
Algemeene Cul. Mij.	Birim Rajeu	Langsa	-	-	185	-
Amsterdam Langsa Rub. Mij.	Boekit pandjang	„	-	-	164	-
Atjeh Cult. Mij.	Kemoening	„	350	-	-	-
Bajan Sumatra Rubber Mij.	Bajan	„	463	-	-	-
Batang Ara Cultuur Mij.	Medang Ara	Kw. Simpang	394	-	982	-
	Batang Ara	„	293	-	-	-
	Gedong Biara	„	-	-	962	1.516
Cult. Mij. "Pajatampah"	Pajatampah	Langsa	-	64	-	183
Cult. Mij. "Ngredjo"	Boekit Pandjang	„	-	-	-	511
Engelkamp, B.C.J.	Boekit Tinggi	„	-	-	-	120
Cultuur Mij. "Serangdjaja"	Salahadji	Kw. Simpang	-	-	-	-
	Serangdjaja	„	-	-	-	447
Deli Tamiang Syndicaat	Sungai Ijoe	„	99	100	424	826
Gouvernement Caoutch. Ond.	Langsa	Langsa	354	219	760	538
Handelsvereniging "Amsterdam"	Aloer Djamboe	Kw. Simpang	-	50	-	1.628
	Poelau Tiga	„	-	-	-	2.017
's Land Caoutchouc Bedrijf	Langsa	Langsa	-	-	-	1.096
	Soengei Loeng	„	-	-	-	970
Krebs J. W.	Wassenaar	Kw. Simpang	-	-	25	-
Koning J.	Seroeway	„	70	-	-	-
LandbouwMij. "Peureula"	Peureula	Peureula	17	32	150	220
Landbouw Mij. Seroeway	Seroeway	Kw. Simpang	-	-	499	494
Langsar Land. Syndicaat	Paja Ramboeng	Langsa	58	58	-	-
Langsa Rubber Onderneming	Gadjah	„	-	-	640	819
	Meuntah	„	-	-	-	-
N.V. Mij. Paja Rambong	Paja Rambong	„	-	-	119	270
Langsar Sum. Rubber Mij.	Langsar Estate	„	850	-	-	-
Noord Sum. Rubber Cul. Mij. (Tamiang Rubber Estate Ltd.)	Tamiang	Kw. Simpang	1.061	950	2.619	2.010
	Oepah	„				
	Rantau	„				1.513
Palmeraies de Simpang Kanan	Simpang Kanan	„	37	154	-	-
Reuter H. C.	Rimba Sawang	„	-	40	-	-
Remfield Rubber Estate Ltd.	Rimbag Sawang	Semadam	-	-	100	606

Rubber Cul. Mij. "Soengei Raja"	Gadjah Meuntah	Langsa	563	259	-	-
Semadam Cult. Mij.	Semadam	Kw. Simpang	117	-	346	-
Sp. Kiri Cultuur Mij.	Simpang Kiri	„	294	176	-	-
Soc. anon. Les Palmerais	Mopoli	„	517	-	-	-
Mopoli	Tj. Genteng	„	48	-	-	-
Soengei Lipoet Cultuur Mij.	Mopoli	„	-	-	622	622
	Soengei Lipoet	„	1.951	512	1.871	1.798
	Boekit Rata	„	440	161	-	-
	Semadam	„	-	-	-	646
Rub. Cult. Mij. "Tj. Semantoh" /Borneo Rub. Cy.Ltd.	Tj. Semantoh	„	220	184	-	798
	Paja Tampah	Langsa	-	-	-	236
Sum. Rub. Cult. Mij. Serbadjadi	Simpang Kiri	Kw. Simpang	-	-	663	770
	Simpang Kanan	„	-	-	683	904
Sum. Coconuts Ltd.	Gedong Biara	„	71	-	-	-
Tengoelan Plant. (W.T. Rupper)	Tengoelan	„	-	45	418	600
Timbang Deli Sum. Rub. Co. Ltd.	Timbang Langsa	Langsa	-	-	-	742
Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen	Langsar Estate	„	-	432	1.458	1.995
	Balei Gadjah	„	-	325	-	-
	Kemoening	„	-	72	-	-
	Bajan	„	-	625	-	-
	Aloer Gadeng	„	-	65	-	-
	Damar Sipoet	„	-	289	759	808

Sumber: Opgave Omtrent Aanplant, Produceerenden Aanplant Oogst en Verscheping van Rubber en Koffie der Ondernemingen ter Oostkust van Sumatra, Tamiang en Oostkust van Atjeh, tahun 1915 dan 1920. Statistiek van Aanplant, Produceerende Aanplant en Productie van de Groot-Cultures (Rubber, Koffie, Klapper, Thee & Olipalmen) van Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanuli, tahun 1925 dan 1930.

Lampiran 4 :
Onderneming-onderneming di luar Aceh Timur Tahun 1927.

Wilayah	Maatschapij	Onderneming
Sabang	Stoomvaart Mij. Nederland	S.M.N. Sabang
	Zeehaven & Kolenstation Sabang	Zeehaven & Kolenstation
	Houthand. v/h P.N. en S.J. Jongeneel	R.E.T. Sabang
Takengon	's Land Caoutchouc Bedrijf	Baleq
	Takegeun Syndicaat	Bandar Lampahan
	W.A. Veenhuijzen	Paja Toempi
	Serdang Cultuur Maatschapij	Redelong Noord
Lhok Seumawe	Blang Ara Cultuur Maatschapij	Aloer Poerba
Lhok Sukon	Tambira Rubber Estates Ltd.	Pirah
Calang	Van de Watering	Lho Sukon
	G.P.C. Harsen te Sinabang	Lho Gloepang Raneu
Sinabang	G. Ungerer te Koeta Radja	Keumala
	G.P.C. Harsen te Sinabang	Poeloe Lassia & Babi
	Vereenigde Jav. Houth. Mij.	Simaloer
	Sumatra Maatschapij	Poeloe Pandjang & Poeloe Silaoet
Singkel	Cultuur Mij. Atjeh	Lae Boetar
Meulaboh	Cultuur Mij. Atjeh	Meureuboh
	” ” ”	Seunagan

Sumber : Verslag van Arbeidsinspectie, Jilid XII, Tahun 1927.

Lampiran 5 :
Jumlah Buruh di Aceh, 1910-1938.

Thn	Kuli Kontrak						Kuli Bebas						Jml
	Lk	%	Pr	%	Jml	%	Lk	%	Pr	%	Jml	%	
1910	-	-	-	-	1.280	49	-	-	-	-	1.337	51	2.617
1911	-	-	-	-	3.325	71	-	-	-	-	1.335	29	4.660
1912	3.514	64	1.942	36	5.456	75	-	-	-	-	1.799	25	7.255
1913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.852
1914	-	-	-	-	4.647	59	-	-	-	-	3.222	41	7.869
1915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.409
1916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.036
1917	8.801	67	4.359	33	13.160	90	1.375	97	46	3	1.421	10	14.581
1918	10.553	67	5.208	33	15.761	92	1.218	94	74	6	1.292	8	17.053
1919	12.503	70	5.469	30	17.972	88	-	-	-	-	2.435	12	20.407
1920	13.300	70	5.559	30	18.559	98	-	-	-	-	300	2	18.859
1921	7.731	81	1.844	19	9.575	59	-	-	-	-	6.692	41	16.267
1922	11.644	91	1.179	9	12.823	90	-	-	-	-	1.418	10	14.241
1923	-	-	-	-	7.756	85	-	-	-	-	1.390	15	9.146
1924	-	-	-	-	8.613	78	-	-	-	-	2.461	22	11.074
1925	6.291	79	1.670	21	7.961	78	1.841	71	441	19	2.282	22	10.243
1926	10.158	73	3.778	27	13.936	85	1.961	82	439	18	2.400	15	16.336
1927	12.553	71	5.146	29	17.696	85	2.616	84	506	16	3.122	15	20.818
1928	-	-	-	-	22.959	85	-	-	-	-	3.951	15	26.910
1929	18.307	72	7.019	28	25.326	84	3.901	85	713	15	4.614	16	29.940
1930	13.189	63	7.856	37	21.045	81	4.021	84	776	16	4.797	19	25.842
1931	6.746	52	6.294	48	13.040	66	6.193	92	545	8	6.738	34	19.778
1932	2.010	37	3.401	63	5.411	37	8.321	88	1.086	12	9.407	63	14.820
1933	3.310	88	437	12	3.747	28	8.056	83	1.599	17	9.655	72	13.402
1934	2.996	94	208	6	3.204	21	10.140	85	1.729	15	11.869	79	15.073
1935	2.806	98	62	2	2.868	20	9.745	83	2.027	17	11.772	80	14.640
1936	2.484	89	301	11	2.785	18	10.499	81	2.538	19	13.037	82	15.822
1937	3.970	81	921	19	4.891	23	13.333	81	3.172	19	16.505	77	21.396
1938	3.556	75	1.211	25	4.767	21	12.769	73	4.663	27	17.432	79	22.199

Sumber : *Verlag van Arbeidsinspectie 1910-1938*; Lihat juga J. Thomas Lindblad, (1999), hlm. 104.

Lampiran 6 :
Jumlah Buruh Kontrak dan Buruh Bebas pada *Onderneming*
di Aceh Berdasarkan Suku dan Kebangsaan,
per-1 Januari 1912-1938

Buruh Kontrak											
Thn	Jawa			%	Cina	%	Ke- ling	%	Lain- lain	%	Jml
	Lk	Pr	Jml								
1912	2.870	1.937	4.807	87,9	305	5,6	3	0,05	351	6,4	5.466
1917	8.204	4.359	12.563	97,7	284	2,2	15	0,12	-	-	12.862
1918	10.272	5.208	15.480	99,9	-	-	10	0,06	-	-	15.490
1919	12.227	5.469	17.696	98,5	-	-	5	0,03	271	1,5	17.972
1920	5.085	1.945	7.030	99,0	-	-	72	1,0	-	-	7.102
1922	6.267	1.149	7.416	98,6	-	-	1	0,01	102	1,4	7.519
1925	6.839	1.670	8.509	98,8	-	-	-	-	104	1,2	8.613
1926	8.005	2.495	10.500	99,1	-	-	-	-	100	0,9	10.600
1929	15.723	7.019	22.742	99,1	164	0,7	-	-	53	0,2	22.959
1930	17.283	7.856	25.139	99,3	136	0,5	-	-	51	0,2	25.326
1931	14.575	6.294	20.869	99,2	140	0,7	-	-	36	0,1	21.045
1932	9.543	3.401	12.944	99,3	87	0,7	-	-	9	0,07	13.040
1937	1.856	929	2.785	100	-	-	-	-	-	-	2.785
1938	3.680	1.211	4891	100	-	-	-	-	-	-	4.891
Buruh Bebas											
1912	75	-	75	41,9	10	5,6	6	3,4	88	49,2	179
1917	820	46	866	74,1	290	24,8	12	1,03	-	-	1.168
1918	870	74	944	86,6	136	12,5	10	0,92	-	-	1.090
1920	2.002	356	2.358	94,1	107	4,3	1	0,04	39	1,6	2.505
1925	1.790	441	2.231	90,7	62	2,5	8	0,3	160	6,5	2.461
1926	1.508	472	1.980	86,8	72	3,1	6	0,3	224	9,8	2.282
1927	1.565	439	2.004	83,5	123	5,1	1	0,04	272	11,3	2.400
1929	2.455	713	3.168	80,2	144	3,6	100	2,5	539	13,6	3.951
1933	7.291	1.599	8.890	94,5	176	1,9	9	0,1	334	3,5	9.409
1934	7.571	1.729	9.300	96,3	105	1,1	4	0,04	246	2,5	9.655
1935	9.375	2.072	11.447	96,5	106	0,9	3	0,02	318	2,7	11.860
1936	8.848	2.538	11.386	96,7	93	0,8	4	0,03	294	2,5	11.772
1937	9.427	3.172	12.599	96,4	95	0,7	6	0,05	373	2,9	13.075
1938	11.370	4.663	16.033	97,1	98	0,6	4	0,02	370	2,2	16.505

Catatan : - Data tahun 1920 hanya untuk buruh onderneming di Langsa.
- Lain-lain terdiri dari suku Nias, Padang, Batak dan Dayak.

Sumber: Verslag van Arbeidsinspectie, 1920-1938.

Lampiran 7 :
Rumah Sakit Pusat Rujukan *Onderneming* Karet
di Aceh Timur

Nama Rumah Sakit	<i>Onderneming</i>	Maskapai
Centraal Hospitaal te Langsa	Langsar	Vereenigde Indische Cultuur Onderneming
	Damar Sipoet	
	Kemoening	
	Aloer Gading	
	Gouv. Caoutchouc	Gouv. Caoutchouc Ond. Langsa
	Gadjah Meuntah	N.V. Rub. Cult. Soengei Raja
	Paja Ramboeng	Francis Peek & Co.Ltd. Bandoeng
	Karang Inoue	N.V. Ned. Oliepalmen Cult. Ond.
Centraal Hospitaal te Kwala Simpang	Peureula	N.V. Landb. Mij. Peureula
	Batang Ara	Batang Ara Cultuur Mij.
	Medang Ara	
	Seleleh	
	Soengai Lipoet	N.V. Soengai Lipoet Cultuur Mij.
	Boekit Rata	
	Tanjong Genteng	
	Mopoli	N.V. Palmboomen Cultuur Mij.
	Semadam	Semadam Cultuur Mij.
	Tangoelan	Tangoelan Plantage
	Simpang Kanan	Palmeries de Simpang Kanan
	Simpang Kiri	Simpang Kiri Cultuur Mij.
	Soengei Ijoe	Deli Tamiang Cultuur Mij.
	Tandjong Semantok	Borneo Rubber Company
	Aloer Djamboe	Handelsvereniging Amsterdam
	Boekit Boender	Tamiang Landb. Syndicaat
	Tamiang	N.V. Noord Sum. Rub. Cult. Mij.
	Oepah	
	Rantau	
	Serang Djaja	Cultuur Mij. Serang Djaja

Sumber : Verslag van Arbiedsinspectie Jilid VI, Tahun 1919.

Lampiran 8 :
Rata-rata Harga Karet di London, 1910-1939
(dalam *shilling* dan *pence* per lb.)

Tahun	Harga		Tahun	Harga	
	Shilling	Dolar		Shilling	Dolar
1900	4	3	1920	-	10
1901	3	7	1921	-	9
1902	4	3	1922	1	9
1903	4	5	1923	1	3
1904	5	3	1924	2	1
1905	6	3	1925	1	11
1906	5	10	1926	1	11,75
1907	4	11,50	1927	-	6
1908	4	2,75	1928	-	10,75
1909	7	1	1929	-	10,25
1910	8	9	1930	-	5
1911	5	5,50	1931	-	3
1912	4	9	1932	-	2
1913	3	0,25	1933	-	3,25
1914	2	3,50	1934	-	6,25
1915	2	6	1935	-	6
1916	2	10,25	1936	-	7,75
1917	2	9,75	1937	-	9,50
1918	2	2,75	1938	-	7
1919	1	0,75	1939	-	9

Sumber : Bambang Purwanto (1992), Lampiran 10, halaman 405.

Lampiran 9 :
Jumlah Pemilikan Mobil Pribadi di Amerika Serikat,
1900-1917

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1900	8.000	1909	306.000
1901	15.000	1910	458.000
1902	23.000	1911	619.000
1903	33.000	1912	902.000
1904	55.000	1913	1.190.000
1905	77.000	1914	1.664.000
1906	106.000	1915	2.332.000
1907	140.000	1916	3.368.000
1908	194.000	1917	4.727.000

Sumber : Bambang Purwanto (1992), Lampiran 8, halaman 404.

Lampiran 10 :
Konversi Berat dan Ukuran

Satuan	Konversi
1 kilogram	2,2046 lb.
1 pikul	61,761 kg ; = 100 kati
1 kati	617,613 gram
1 ton	1000 kg ; = 16,19 pikul
1 bouw	1,7537 are ; = 0,7096 hektar
1 hektar	1,4091 bouw ; 2,4711 are
1 are	0,57 bouw ; 0,4047 hektar
1 kilogram	1,25 liter

Sumber : Bambang Purwanto (1992), Lampiran 1, halaman 400.
Lihat juga Sjafrin Sairin, "Tingkat Upah Buruh Perkebunan di Sumatera Utara" dalam *Prisma* No. XX, April 1991, hlm. 31.

Lampiran 11 :
 Pasal-pasal dalam *Koelieordonnantie* 1915
 yang Dilanggar oleh Buruh di Aceh

Artikel 9. 3. Buruh wajib menaati semua perintah majikan atau bawahannya dengan menuruti terhadap perintah semua menjalankan kewajiban kontrak.

Artikel 19. 3. Dianggap melakukan pelanggaran kontraknya bila:

- a. Tidak memenuhi kewajiban kerjanya dan meninggalkan perkebunan tempatnya bekerja tanpa melapor pada majikan
- b. Desersi
- c. Melanjutkan keingkaran terhadap kewajiban kerja

Artikel 20. Melawan atau mengancam majikan atau bawahannya dikenakan denda uang paling banyak f. 50, atau bekerja pada fasilitas umum paling lama satu bulan tanpa bayaran. Menghina majikan atau bawahannya, mengganggu keamanan, mengingkari kewajiban kerja, berkelahi, mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban dikenakan denda uang paling banyak f. 25, atau bekerja pada fasilitas umum paling lama 12 hari tanpa bayaran.

Artikel 23. Melakukan kebohongan, untuk orang pribumi dan asia lain dikenakan denda uang paling banyak f. 25, atau bekerja pada fasilitas umum paling lama 12 hari tanpa bayaran.

Lampiran 12 :
Pasal-pasal dalam *Koelieordonnantie* 1931
yang Dilanggar oleh Buruh di Aceh

Artikel 34. 1. Akan dilakukan penahanan ringan paling lama satu bulan atau denda uang paling banyak f. 100, bagi buruh yang:

- a. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin majikan selama 24 hari berturut-turut
- b. Melanjutkan pengingkaran terhadap kewajiban kerja sesuai kontrak kerja
- c. Melakukan kekerasan atau mengancam majikan atau bawahannya, dan buruh asing

Artikel 35. Akan dilakukan penahanan ringan paling lama 12 hari atau denda uang paling banyak f. 50 bagi buruh kontrak yang tidak memberitahukan data pribadi yaitu, nama, usia, daerah asal, bangsa dan asal-usul, dan nama isteri/suami.

Artikel 36.1. Akan dilakukan penahanan ringan paling lama 1 bulan atau denda uang paling banyak f. 100, terhadap buruh yang melakukan perlawanan, menghina atau mengancam majikan atau bawahannya, mengganggu keamanan, melakukan perkelahian, dan mabuk di tempat umum.

Lampiran : 13
Besluit Pendirian Perkebunan Karet pemerintah di Langsa

Ontvangen bij de Afdeling 106
den Redacteur

Ontvangen bij den Gouvern. Secretaris
Afgedaan door hem M. S.

Afgedaan door idem H. M. M. M.
Geresumeerd door H. M. M. M.

Ag. 203/07
(Afd. III/13) - 18.55. H. M. M. M.
Commissie.
Andere.
Protesten.
Kasch. Reg.

BESLUIT.

Nr 149. Binkamang, den 21 Januari 1907.

GEARRESTEERD.

Gelet op de besluiten van 4 Januari
en 15 Mei 1906 No. 35 en 15 en 10 Januari
1907 No. 8; (Staatblad No. 11)

Gelezen het rapport van den Directeur
van Landbouw van 8 Januari 1907 No. 197;

Is goedgevonden en verstaan:

Krachtsn machting der Koningin:
a. te bepalen dat in het landschap Langsa,
Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, van
Gouvernementswege wordt opgericht eene ca-
outchoue-onderneming;

b. den Directeur van Landbouw te machtigen om
voor personeel, administratie en verdere uit-
gaven ten behoeve van die onderneming te
beschikken

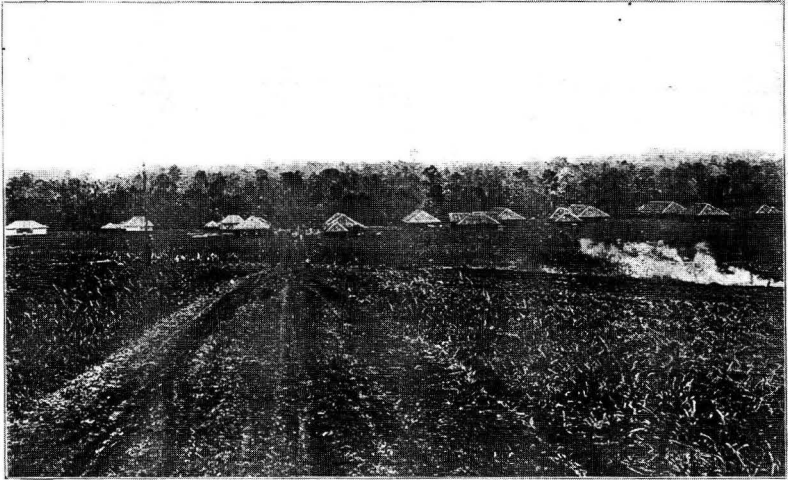
REG.
EXP.
MIN.
IND.
NOT.

107

Sumber : ANRI.

Sumber : ANRI.

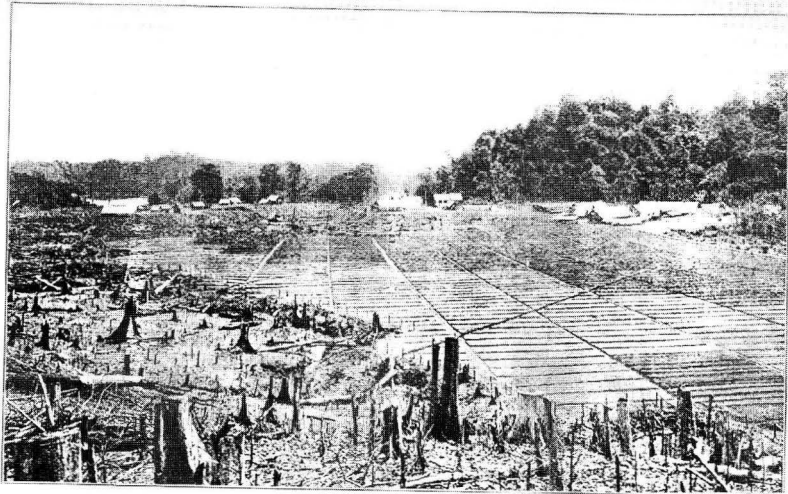
Lampiran: 15
Foto Lahan yang Baru Dibersihkan untuk Penanaman Karet
Milik Handelsvereeniging "Amsterdam" (H.V.A)
Di Boeloh Blang Ara (Aceh Utara)



VOLLEDIG EMPLACEMENT BOELOE BELANG ARA. (ZIE BLZ. 172-175).

Sumber : J. Langhout (1923), hlm. 178.

Lampiran: 16
 Foto Lahan yang Sudah Siap untuk Penanaman Karet
 Milik Handelsvereniging "Amsterdam" (H.V.A)
 Di Alur Jambu (Aceh Timur)



ALOER-DJAMBOE.
 AANPLANT IN ATJEH VAN DE H.V. A. GEZICHT OP ZANDBEDDEN EN VOORLOOPIG EMPLACEMENT.

Sumber : J. Langhout (1923), hlm. 175.

Lampiran : 17
 Foto Kompleks Pondok Buruh pada Satu Perkebunan Karet
 Milik Handelsvereniging "Amsterdam" (H.V.A) di Aceh



PONDOK-COMPLEX VAN EEN ONDERNEMING DER H. V. A. IN ATJEH. JONGE AANPLANT.

Sumber : J. Langhout (1923), hlm. 171.

Lampiran : 18
Foto Pondok Buruh Perkebunan Karet di Langsa



Sumber : ANRI, No. Neg. 530731 AA.1-1.

Langsa, 31 Juli 1953.

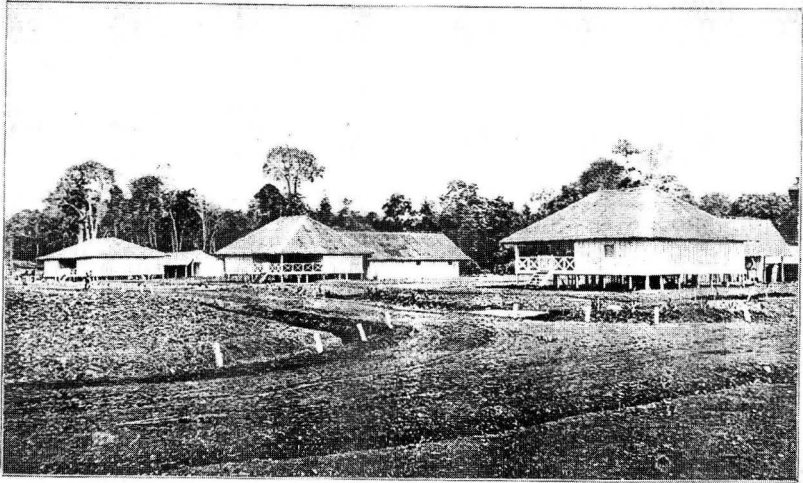
Perumahan Buruh Karet di Langsa yang Belum Dapat Perbaikan.

Lampiran : 19
Foto Tempat Tidur Buruh Perkebunan Karet di Langsa



Sumber : ANRI, No. Neg. 530731 AA. 1-2.
Langsa, 31 Juli 1953.
Tempat Tidur dari Rumah Buruh Karet di Langsa yang
Belum Dapat Perbaikan.

Lampiran : 20
 Foto Perumahan Asisten dan Pasanggrahan pada
 Perkebunan Karet Milik Handelsvereniging "Amsterdam" (H.V.A)
 di Boeloh Blang Ara (Aceh Utara)



ASSISTENTENWONINGEN EN PASSANGGRAHAN BOELOE BELANG ARA (OOSTKUST VAN ATJEH)
 ONDERNEMING DER H.V. A. (ZIE BLZ. 172-173).

Sumber : J. Langhout (1923), hlm. 173.

MENGADU NASIB DI KEBUN KARET



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. 23123.
Telp./Fax Kantor: 0651-23226
Email: bpnbbandaaceh@yahoo.co.id

ISBN:

Perpustakaan
Jenderal Ke

305.51
MAW
m

Umar